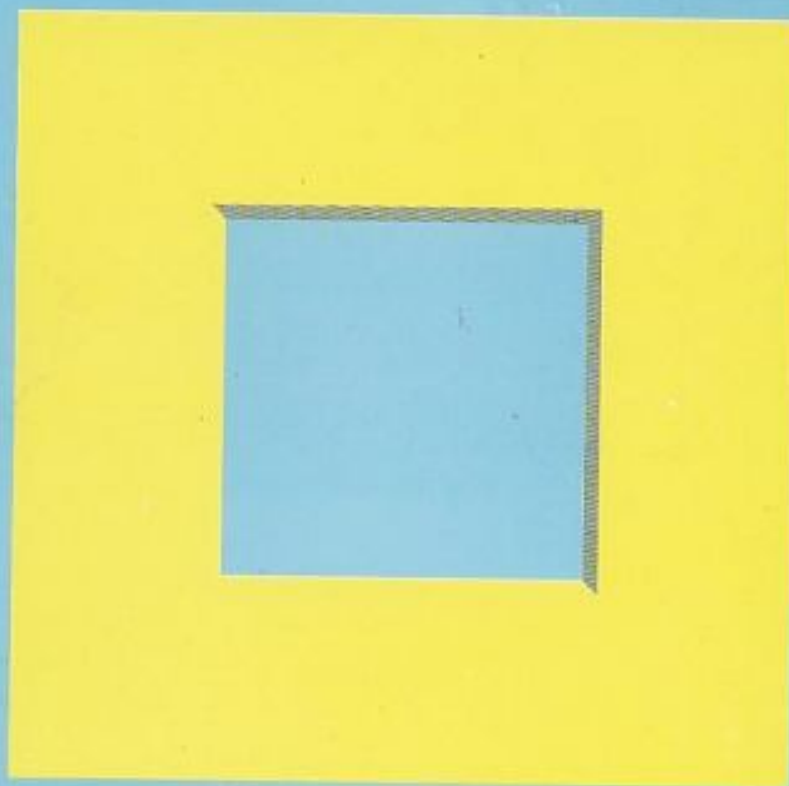


STUDIA KULTURA

Jurnal Ilmiah Ilmu Budaya



Agustus 2003

Tahun 2 No. 4

**Fakultas Sastra
Universitas Sumatera Utara**

STUDIA KULTURA
Jurnal Ilmiah Ilmu Budaya, ISSN: 1412-8586

Studia Kultura diterbitkan dua kali setahun setiap Februari dan Agustus oleh Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara. dengan tujuan untuk menyebarkan tulisan atau informasi ilmiah berupa analisis, kajian pustaka, atau hasil penelitian dalam bidang Ilmu-ilmu Budaya

Pembina:

Rektor Universitas Sumatera Utara

Penanggung Jawab:

Dekan Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara

Ketua Penyunting:

Prof. Bahren Umar Siregar, Ph.D.

Dewan Penyunting:

Prof. Amin Ridwan,, Ph.D. (Universitas Sumatera Utara)
Dr. Mohd Anis Md Noor (Universiti Malaya)
Prof. Dr. Mursal Esten (ASKI Padang Panjang)
Dr. Mohd Anis Md Nor (Universiti Malaya)
Prof. Margareth Kartomi, Ph.D. (Monash University)
Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, S.H., M.S. (Universitas Udayana)
Prof. Dr. Ayat Rohaedi (Universitas Indonesia)

Penyunting Pelaksana:

Drs. Irwansyah, M.S.
Drs. Namsyah Hot Hasibuan, M.Ling.
Dra. Rithaony Hutajulu, M.A.
Drs. Marzaini Manday, M.S.P.D.
Drs. Pertampilen Brahmana, M.Si.
Drs. Muhammad Takari, M.Hum.
Drs. Edi Sumarno, M.Hum..

Alamat Penyunting:

Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara
Jalan Universitas No. 19 Medan 20155, Indonesia
Telefon/Faks: 061-8215956; e-mail: takarimhd@yahoo.co.id

Studia Kultura menerima sumbangan tulisan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Pedoman penulisan tercantum pada halaman dalam sampul belakang. Penulis yang artikelnya dimuat dalam *Studia Kultura* akan memperoleh imbalan dua eksemplar Jurnal *Studia Kultura*. Semua tulisan yang diterbitkan dalam *Studia Kultura* tidak harus menggambarkan pendapat dan pikiran para penyunting.

Harga langganan per tahun untuk 2 nomor *Studia Kultura* adalah Rp 30.000,00 untuk pelanggan pribadi dan Rp 50.000,00 untuk pelanggan lembaga/perpustakaan, ditambah ongkos kirim Rp 10.000,00.

Dari Penyunting

Tak terasa sudah sang waktu telah mengantarkan Jurnal Ilmiah Ilmu Budaya *Studia Kultura* pada tahun yang kedua dengan nomor keempat. Dalam usia yang relatif muda ini, berbagai pembenahan dilakukan oleh penyunting baik itu tampilan, pencetakan, bahasa, dan terutama eksplorasi dengan memasukkan gambar-gambar, meskipun masih dalam bentuk hitam putih. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya komunikasi dalam bentuk lisan maupun bukan lisan dalam penyampaian ide-ide keilmuan.

Dalam terbitan kali ini ada tiga topik utama yang menjadi tumpuan, yaitu: (1) etnografi dan pertunjukan budaya; (2) perilaku masyarakat Indonesia dalam menghadapi permasalahan kontemporer khususnya integrasi, konflik masyarakat multietnik dan penegakan keadilan, serta pelestarian warisan nasional dalam pariwisata; (3) masalah kebahasaan yang mencakup teori hermeneutik dan peranan orang tua terhadap kemampuan bahasa anak usia 4 sampai 5 tahun. Dari segi disiplin ilmu, para penulis kali ini, adalah para sejarawan, sosiolog, ahli linguistik, dan ahli pengkajian pariwisata. Empat penulis berasal dari *civitas akademika* Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara, dan kali ini ada dua penulis dari luar FS USU, yaitu satu penulis dari Universitas Padjadjaran Bandung dan satu lagi dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja Bali. Dengan demikian keberagaman penulis kali ini akan menyumbangkan berbagai keilmuannya kepada kita.

Hasil kajian para penulis yang mengarah ke generalisasi menunjukkan bahwa kondisi budaya Indonesia adalah multikultur, serta memiliki berbagai persoalan konseptual dan perilaku. Begitu juga dalam bidang kebahasaan, kiranya diperlukan berbagai pendekatan teoretis maupun enkulturasi yang baik antargenerasi dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berwawasan dan berilmu. Polarisasi kebudayaan Indonesia, berdasarkan kajian para penulis, paling tidak mencakup tiga ranah budaya, yaitu: etnik, nasional, maupun dunia. Ketiga ranah budaya ini kemudian dikelola secara alamiah dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia dan masing-masing wilayah budaya. Semoga ke depan keanekaragaman budaya adalah potensi untuk maju dan bersatu.

Dari enam tulisan yang diterbitkan kali ini, tampak bahwa para penulis ada yang berdasar pada sebuah bidang ilmu saja, namun ada pula yang mengaplikasikan berbagai disiplin ilmu. Ini tampaknya menjadi kecenderungan para ilmuwan budaya, yang selalu melihat sebuah fenomena sosiokultural dengan menggunakan berbagai disiplin untuk dapat menguji tingkat validitas kenyataan yang sesungguhnya, baik yang menggunakan metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Tujuannya adalah dengan mengkaji manusia dan budaya yang dihasilkan, kita lebih memahami keadaan manusia dari banyak sisi, dan menjadi lebih arif dan bijaksana dalam mengambil simpulan-simpulan yang mendekati realitas. Selain itu, penelitian budaya akan menyumbangkan berbagai pemikiran dalam pengambilan keputusan politis dan kultural dalam konteks pengembangan suatu masyarakat.

Edi Sumarno

DAFTAR ISI

Dari Penyunting	i
Daftar Isi	iii
Seni Pertunjukan dalam Budaya Karo Samsul Tarigan	261-276
Integrasi dan Konflik pada Masyarakat Multietnik dalam Perspektif Pendidikan Sejarah I Made Page	277-291
Penegakan Keadilan di Indonesia: Suatu Telaah Historis Prospektif Reiza D. Dienaputra	292-302
<i>Heritage Tourism</i> dan Pelestarian Warisan Nasional Marzaini Manday	303-310
Hermeneutik: Sebuah Metode Penelitian Sastra Ikhwanuddin Nasution	311-317
Peran Orang Tua Terhadap Kemampuan Berbahasa Indonesia Anak Usia 4-5 Tahun Gustianingsih	318-328
Pola Fonotaktis Komponen Konsonan Akhir Suku Kata Bahasa Indonesia Namsyah Hot Hasibuan	329-340

SENI PERTUNJUKAN DALAM BUDAYA KARO

Samsul Tarigan
Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara

Abstract

Karonese ethnic, is one of some ethnics in North Sumatra Province Indonesia. Their culture based on *rakut sitelu* (three group in the context of exogamus clan) and the *merga silima* (five major clan system). This concept always expressed in the performing art culture. Karonese have musical culture which called *gendang lima sidalanen* (the ensemble consist of five instrument), *landek* (dance), and traditional theater which called *tembut-tembut*. The Koronese performing art always functioning in their culture, organic, vitalic, and developed in time and space.

1. Latar Belakang

Setiap kelompok masyarakat di dunia ini, dalam bentuk etnik, religi, ras, bangsa, dan lainnya selalu memiliki ciri-ciri, cita-cita, atau tujuan yang sama, atau didukung oleh gagasan kolektif yang bersamaan. Mereka membentuk kebudayaan atau peradaban yang digunakan untuk menanggapi tantang yang datang, baik dari luar maupun dari dalam kebudayaannya. Mereka mengekspresikan wujud kebudayaan dalam tiga bentuk, yaitu: ide, aktivitas, dan artifak. Sementara isi kebudayaan manusia di dunia ini terdiri dari tujuh unsur kebudayaan universal, yaitu: agama, organisasi sosial, teknologi, pendidikan, bahasa, ekonomi, dan kesenian.

Kesenian adalah unsur dan ekspresi kebudayaan manusia, yang berhubungan erat dengan unsur-unsur kebudayaan lain. Sampai sekarang dalam kajian saintifik kesenian dibagi menjadi rumpun-rumpun: (a) seni pertunjukan (*performing art*) atau pertunjukan budaya (*cultural performance*) yang terdiri dari: musik, tari, dan teater—kadang kala meluaskan kajian pada bidang olahraga, sirkus, kabaret, *nyekar*, prosesi, ritual, dan lain-lain; (b) seni rupa atau seni visual yang terdiri dari: seni murni, seni lukis, seni patung, seni

pahat, seni kriya, kerajinan, dan lainnya; (c) seni media rekam, yang terdiri dari: radio, televisi, komputer, dan lain-lainnya.

Secara saintifik, pengkajian seni pertunjukan adalah sebuah disiplin yang relatif baru dalam perkembangan keilmuan. Pengkajian seni pertunjukan adalah sebuah disiplin yang mencoba menerapkan berbagai kajian dan metodologi, yang bersifat integratif dan lintas disiplin. Studi komparatif dilakukan antara tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, olahraga, perayaan-perayaan masyarakat, upacara, sampai dalam pertunjukan tari, musik, dan teater yang menekankan aspek estetika. Dalam kuliah teori dan metodologinya, dilakukan usaha untuk mengembangkan sekumpulan konsep dan pendekatan yang spesifik, menjelajahi teori-teori pertunjukan natif dari Afrika, Asia, dan Eropa, dan tempat-tempat lain di dunia - serta mempertemukannya dengan teori-teori dan metodologi-metodologi dalam disiplin sains antropologi, sosiologi, sejarah, teori sastra, semiotika, estetika,¹ analisis struktural, teori feminisme, etnologi, analisis gerak, psikologi perseptual, estetika, dan teori pertunjukan itu sendiri.

Dalam kajian pertunjukan, warisan budaya Eroamerika hanyalah merupakan bagian dari sejarah pertunjukan dunia. Perspektif interkultural ditumbuhkan dengan mengkaji modus-modus pertunjukan yang secara radikal berbeda dengan tradisi pertunjukan Eroamerika. Selain itu diberikan pula sejumlah mata kuliah yang membantu pemahaman esensial perkembangan utama dalam pertunjukan *avant garde*. Untuk memberi perspektif pertunjukan yang integratif, tari dan musik tidak hanya dipelajari sebagai pertunjukan yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai bagian penting dari teater, ritual, dan kehidupan sosial.

Tulisan ini akan mendeskripsikan secara umum keberadaan seni pertunjukan yang terdapat dalam kebudayaan masyarakat Karo di Provinsi Sumatera Utara.

2. Masyarakat Karo

Masyarakat Karo, berdasarkan etnosains mereka, membagi wilayah budayanya ke dalam dua kategori: (a) *Karo gugung* atau orang-orang Karo yang berada di wilayah pegunungan, terutama di kawasan Kabupaten Karo, Langkat, dan Deliserdang; (b) *Karo jahe*, yaitu mereka yang berada di kawasan pesisir terutama di wilayah Kabupaten Deliserdang dan Langkat. Masyarakat Karo Gugung dianggap lebih murni menerapkan kebudayaan Karo, sedangkan Karo Jahe lebih banyak mengalami akulturasi dengan kebudayaan sekitarnya terutama dengan etnik Melayu. Misalnya Guru Patimpus yang mendirikan Medan. Satu hal yang paling penting dalam masyarakat Karo adalah adanya sistem klen eksogamus, yang mendasarkan hubungan perkawinan kepada kelompok klen luarnya.

Seperti halnya suku-suku lain, masyarakat Karo mempunyai sistem kemasyarakatan. Hal ini terjadikarena masyarakat ingin mempertahankan

sistem kehidupan keluarga untuk kelangsungan hidup dalam mempertahankan nilai-nilai yang dimilikinya, terutama yang berkaitan dengan jati dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Evans-Pritchard (1986:154) bahwa dalam tiap-tiap masyarakat, walaupun dalam bentuk yang paling sederhana sekali, kita akan dapat menemui suatu bentuk kehidupan keluarga, pengakuan mengenai ikatan kekeluargaan, sistem ekonomi dan politik, status sosial, ibadah agama, cara menyelesaikan konflik dan hukuman terhadap penjahat dan lain-lain di samping kebudayaan material, suatu kumpulan pengetahuan mengenai alam semesta, teknik dan tradisi.

Pada masyarakat Karo sistem kemasyarakatan dikenal dengan nama *merga silima*, *tutur siwaluh*, dan *rakut sitelu*. Masyarakat Karo mempunyai sistem *merga* (klen). *Merga* tersebut disebut untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut *beru*. *Merga* atau *beru* ini disandang di belakang nama seseorang. *Merga* dalam masyarakat Karo terdiri dari lima kelompok, yang disebut dengan *merga silima*, yang berarti *merga yang lima*. Kelima *merga* tersebut adalah: (1) *Karo-karo*, (2) *Tarigan*, (3) *Ginting*, (4) *Sembiring*, dan (5) *Peranginangin*. Kelima *merga* ini masih mempunyai sub *merga* masing-masing. Setiap orang Karo mempunyai salah satu dari *merga* tersebut. *Merga* diperoleh secara otomatis dari ayah. *Merga* ayah juga *merga* anak, tetapi adakalanya *merga* diberikan kepada seseorang yang diabsahkan secara adat. Misalnya beberapa waktu yang lalu Tengku Rizal Nurdin diberi *merga* Barus oleh masyarakat Karo (lebih jauh lihat Tridah Bangun 1990).

Bagi masyarakat Karo, *merga* sangat penting gunanya dalam kehidupan. *Merga* berguna untuk mengekspresikan identitas diri serta hubungannya dengan ertutur (menceri hubungan kekerabatan). *Merga* dan *beru* dipakai di belakang nama diri. Di samping itu, masyarakat Karo tidak hanya mempunyai *merga* atau *beru* saja, tetapi sekaligus mewarisi *beru* dari ibu kandungnya yang disebut *bere-bere*. Jadi setiap pribadi mempunyai *merga* atau *beru* dan *bere-bere*. Lain halnya dengan orang Karo yang melakukan kawin campuran atau kawin antar etnik.

Jika dilihat sepintas pada masyarakat Karo orang beranggapan bahwa dalam menarik garis keturunan secara patrilineal, akan tetapi kalau diteliti lebih mendalam lagi barulah dimengerti letak kekhasan masyarakat Karo dalam menarik garis keturunannya. Mereka bukan patrilineal melainkan *parental (bilateral)* yang menarik garis keturunan melalui ayah dan ibu sekaligus (Roberto Bangun 1989:18).

Namun demikian, dalam pelaksanaan sehari-hari *bere-bere* tidak pernah dicantumkan sebagai identitas diri. *Bere-bere* akan ditanya dalam kegiatan *ertutur*, untuk mengetahui hubungan kekeluargaan seseorang. Walaupun masyarakat Karo mempunyai sistem *parental* akan tetapi yang paling penting adalah *merga* dan *beru*. Hal ini terbukti bahwa *merga* dan *beru* tetap dicantumkan setelah seseorang meninggal dunia. Kebiasaan ini merupakan hal yang lazim bagi masyarakat Karo. Oleh sebab itu setiap orang Karo

mencantumkan *merga* dan *berunya* telah menunjukkan pembuktian bahwa ia orang Karo.

Orang yang mempunyai *merga* atau *beru* yang sama, dianggap bersaudara dalam arti mempunyai nenek moyang yang sama. Kalau laki-laki *bermerga* sama, maka mereka disebut *ersenina*, demikian juga antara perempuan dengan perempuan yang mempunyai *beru* sama, maka mereka disebut juga *ersenina*. Namun antara seorang laki-laki dengan perempuan yang *bermerga* sama, mereka disebut *erturang*, sehingga dilarang melakukan perkawinan, kecuali pada *merga Sembiring* dan *Peranginangin*.²

Kekerabatan dalam masyarakat Karo disebut *perkadekaden* dan kerabat disebut *kade-kade*. Pengertian kekerabatan dalam masyarakat Karo sangat luas, jika diabstraksikan pada masyarakat Karo akan terbentang suatu jaringan kekerabatan yang menyangkut semua orang Karo, dalam arti bahwa setiap orang Karo jika dicari silsilahnya maka akan terjadi hubungan kekerabatan. Dalam hal inilah pentingnya *merga* tersebut.

Walau pada dasarnya hubungan kekerabatan pada masyarakat Karo berdasarkan *merga*, namun dua hal yang penting mempengaruhi hubungan kekeluargaan itu, yaitu kelahiran dan perkawinan. Karena kedua hubungan tersebut akan menimbulkan hubungan darah, karena hubungan darah itulah dapat diketahui jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan di dalam masyarakatnya.

Hal lain yang penting dalam susunan masyarakat Karo adalah *rakut sitelu* atau *daliken sitelu* (artinya secara metaforis adalah tungku nan tiga), yang berarti ikatan yang tiga. Arti *rakut sitelu* tersebut adalah *sangkep nggeluh* (kelengkapan hidup) bagi orang Karo. Kelengkapan yang dimaksud adalah lembaga sosial yang terdapat dalam masyarakat Karo yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu: (1) *kalimbubu*, (2) *anak beru*, dan (3) *senina*. *Kalimbubu* dapat didefinisikan sebagai keluarga pemberi isteri, *anak beru* keluarga yang mengambil atau menerima isteri, dan *senina* keluarga satu galur keturunan *merga* atau keluarga inti.

Tutur siwaluh adalah konsep kekerabatan masyarakat Karo, yang berhubungan dengan penuturan, yaitu terdiri dari delapan golongan: (1) *puang kalimbubu*, (2) *kalimbubu*, (3) *senina*, (4) *sembuyak*, (5) *senina sipemeren*, (6) *senina sepengalon/sendalanan*, (7) *anak beru*, dan (8) *anak beru menteri*.

Dalam pelaksanaan upacara adat, *tutur siwaluh* ini masih dapat dibagi lagi dalam kelompok-kelompok lebih khusus sesuai dengan keperluan dalam pelaksanaan upacara yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut.

Puang kalimbubu adalah pihak *kalimbubunya kalimbubu*, yaitu suatu bentuk perluasan *kalimbubu*.

Kalimbubu adalah kelompok pemberi isteri kepada keluarga tertentu, *kalimbubu* ini dapat dikelompokkan lagi menjadi:

- a. *Kalimbubu bena-bena* atau *kalimbubu tua*, yaitu kelompok pemberi isteri kepada kelompok tertentu yang dianggap sebagai kelompok

pemberi isteri asal dari keluarga tersebut. Misalnya A bermerga Sembiring *bere-bere* Tarigan, maka Tarigan adalah *kalimbubu* Si A. Jika A mempunyai anak, maka *merga* Tarigan adalah *kalimbubu bena-bena/kalimbubu tua* dari anak Si A. Jadi *kalimbubu bena-bena* atau *kalimbubu tua* adalah *kalimbubu* dari ayah kandung.

- b. *Kalimbubu simada dareh* adalah berasal dari ibu kandung seseorang. *Kalimbubu simada dareh* adalah saudara laki-laki dari ibu kandung seseorang. Disebut *kalimbubu simada dareh* karena mereka lah yang dianggap mempunyai darah, karena dianggap darah merekalah yang terdapat dalam diri keponakannya.
- c. *Kalimbubu iperdemui*, berarti *kalimbubu* yang dijadikan *kalimbubu* oleh karena seseorang mengawini putri dari satu keluarga untuk pertama kalinya. Jadi seseorang itu menjadi *kalimbubu* adalah berdasarkan perkawinan.

Senina, yaitu mereka yang bersaudara karena mempunyai *merga* dan *submerga* yang sama.

Sembuyak, secara harfiah *se* artinya satu dan *mbuyak* artinya kandungan, jadi artinya adalah orang-orang yang lahir dari kandungan atau rahim yang sama. Namun dalam masyarakat Karo istilah ini digunakan untuk *senina* yang berlainan *submerga* juga, dalam bahasa Karo disebut *sindauh ipedeher* (yang jauh menjadi dekat).

Sipemeren, yaitu orang-orang yang ibu-ibu mereka bersaudara kandung. Bagian ini didukung lagi oleh pihak *sibaribanen*, yaitu orang-orang yang mempunyai isteri yang bersaudara. Jadi seseorang itu menjadi *ersenina* (bersaudara) karena hubungan perkawinan, dan isteri mereka bersaudara.

Senina Sepengalon atau *Sendalanen*, yaitu orang yang bersaudara karena mempunyai anak-anak yang memperisteri dari *beru* yang sama.

Anak beru, berarti pihak yang mengambil isteri dari suatu keluarga tertentu untuk diperisteri. *Anak beru* dapat terjadi secara langsung karena mengawini wanita keluarga tertentu, dan secara tidak langsung melalui perantaraan orang lain, seperti *anak beru menteri* dan *anak beru singikuri*. *Anak beru* ini terdiri lagi:

- a. *Anak beru tua*, adalah *anak beru* dalam satu keluarga turun temurun. Paling tidak tiga generasi telah mengambil isteri dari keluarga tertentu (*kalimbubunya*). *Anak beru tua* adalah *anak beru* yang utama, karena tanpa kehadirannya dalam suatu upacara adat yang dibuat oleh pihak *kalimbubunya*, maka upacara tersebut tidak dapat dimulai. *Anak beru tua* juga berfungsi sebagai *anak beru singerana* (sebagai pembicara), karena fungsinya dalam upacara adat sebagai pembicara dan pemimpin keluarga dalam keluarga *kalimbubu* dalam konteks upacara adat.
- b. *Anak beru cekoh baka tutup*, yaitu *anak beru* yang secara langsung dapat mengetahui segala sesuatu di dalam keluarga *kalimbubunya*.

Anak beru sekoh baka tutup adalah anak saudara perempuan dari seorang kepala keluarga. Misalnya Si A seorang laki-laki, mempunyai saudara perempuan Si B, maka anak Si B adalah *anak beru cekoh baka tutup* dari Si A. Dalam panggilan sehari-hari anak beru disebut juga *bere-bere mama*.

Anak beru menteri, yaitu *anak berunya anak beru*. Asal kata *menteri* adalah dari kata *minteri* yang berarti meluruskan. Jadi *anak beru minteri* mempunyai pengertian yang lebih luas sebagai petunjuk, mengawasi serta membantu tugas *kalimbubunya* dalam suatu kewajiban dalam upacara adat. Ada pula yang disebut *anak beru singkuri*, yaitu *anak berunya anak beru menteri*. *Anak beru* ini mempersiapkan hidangan dalam konteks upacara adat. Ia juga bertanggung jawab penuh atas jalannya upacara adat, karena hubungan kekeluargaan yang relatif jauh, dia ikut mempersiapkan hidangan hanya untuk membantu *kalimbubunya* sebagai *anak beru menteri*.

3. Sistem Religi

Sebelum masuknya agama-agama *samawiyah*, masyarakat Karo mempunyai sistem religinya sendiri, yang disebut *Perbegu*. Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini baik yang dapat dilihat maupun yang tak dapat dilihat adalah diciptakan oleh *Dibata*, yang disebut *Dibata Kaci-kaci*, berjenis kelamin wanita. *Dibata Kaci-kaci* ini mempunyai tiga wilayah kekuasaan, yaitu: dunia atas, tengah, dan bawah. Setiap wilayah kekuasaan ini diperintah oleh seorang *Dibata* sebagai wakil dari *Dibata Kaci-kaci*. Ketiga *Dibata* itu merupakan satu kesatuan yang disebut *Sitelu*. Berdasarkan tempatnya memerintah, orang Karo percaya kepada *Dibata Datas*, *Dibata Tengah*, dan *Dibata Teruh*. *Dibata Datas* disebut juga *Guru Batara*, yang memiliki kekuasaan dunia atas (angkasa). *Dibata Tengah* disebut juga *Tuhan Padukah ni Aji*, *Dibata* inilah yang menguasai dan memerintah di bagian dunia kita ini. *Dibata Teruh* juga disebut *Tuhan Banua Koling*. *Dibata* inilah yang memerintah di bumi bagian bawah (Tarigan 1990:83-84).

Religi *Perbegu* mempercayai bahwa setiap orang mempunyai *tendi* (roh). Apabila seseorang meninggal dunia, maka *tendi* tersebut berubah menjadi *begu*. Agama *perbegu* di daerah Karo pada tahun 1946 diganti namanya menjadi *pemena* oleh para pengetua adat dan *guru-guru mbelin*. Perubahan nama ini disebabkan karena banyak mendapat tekanan-tekanan pahit dari pemerintah Belanda bersama penyiur-penyaur agama yang dibawa bangsa Eropa yang menyebut *perbegu* sebagai agama penyembah setan-setan (Putro 1979:32). Kini masyarakat Karo sebagian besar telah beragama Protestan, Katolik, Islam, dan Hindu.

4. Seni Pertunjukan

Seni pertunjukan atau seni persembahan dalam kebudayaan masyarakat Karo mencakup seni musik yang lazim disebut dengan *gendang*, seni tari yang lazim disebut dengan *landek*, dan seni teater yang didukung oleh genre *tembut-tembut* atau *gundala-gundala* terutama di daerah Seberaya.

4.1 Gendang Lima Sidalanen

Dalam budaya masyarakat Karo, sebutan untuk pemusik (*musician*) adalah *sierjabaten*, yang secara denotatif artinya adalah yang memiliki tugas. *Sierjabaten* terdiri dari pemain *sarune*, *gendang singanaki*, *gendang singindungi*, *gendang penganak*, dan *gung*. Setiap pemain alat musik, dalam etnosains tradisional Karo mereka memiliki nama masing-masing, yaitu: pemain *sarune* disebut *panarune*, pemain *gendang* (*singanaki* dan *singindungi*) disebut *penggual*, dan pemain *penganak* disebut *simalu penganak*, dan pemain *gung* disebut *simalu gung*, serta pemain *mangkuk michiho* disebut *simalu mangkuk michiho*.

(A) *Sarune*, alat musik ini adalah sebagai pembawa melodi dalam ensambel *gendang lima sidalanen* atau ensambel *gendang sarune*. Alat musik ini dapat diklasifikasikan ke dalam golongan aerofon *reed* ganda berbentuk konis. *Sarune* ini terbuat dari bahan kayu mahoni (*Swetenia mahagoni*) atau yang sejenisnya. *Sarune* ini secara taksonomis (struktural) terdiri dari: (a) *anak-anak sarune*, terbuat dari daun kelapa dan *embulu-embulu* (pipa kecil) diameter 1 mm dan panjang 3-4 mm. Daun kelapa dipilih yang sudah tua dan kering. Daun dibentuk trianggel sebanyak dua lembar. Salah satu sudut dari kedua lembaran daun yang dibentuk diikatkan pada *embulu-embulu*, dengan posisi kedua sudut daun tersebut; (b) *tongkeh sarune*, bagian ini berguna untuk menghubungkan *anak-anak sarune*. Biasanya dibuat dari timah, panjangnya sama dengan jarak antara satu lobang nada dengan nada yang lain pada *lobang sarune*; (c) *ampang-ampang sarune*, bagian ini ditempatkan pada *embulu-embulu sarune* yang berguna untuk penampang bibir pada saat meniup *sarune*. Bentuknya melingkar dengan diameter 3 cm dan ketebalan 2 mm. Dibuat dari bahan tulang (hewan), tempurung, atau perak; (d) *batang sarune*, bagian ini adalah tempat lobang nada *sarune*, bentuknya konis baik bagian dalam maupun luar. *Sarune* mempunyai delapan buah lobang nada. Tujuh di sisi atas dan satu di belakang. Jarak lobang I ke lempengan adalah 4,6 cm dan jarak lobang VII ke ujung *sarune* 5,6 cm. Jarak antara tiap-tiap lobang nada adalah 2 cm, dan jarak lubang bagian belakang ke lempengan 5,6 cm; (e) *gundal sarune*, letaknya pada bagian bawah *batang sarune*. *Gundal sarune* terbuat dari bahan yang sama dengan *batang sarune*. Bentuk bagian dalamnya barel, sedangkan bentuk bagian luarnya konis. Ukuran panjang *gundal sarune* tergantung panjang *batang sarune* yaitu 5/9.

B. *Gendang*, alat musik *gendang* adalah berfungsi membawa ritme variasi. Alat ini dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok membranofon

konis ganda yang dipukul dengan dua stik. Dalam budaya musik Karo gendang ini terdiri dari dua jenis yaitu *gendang singanaki* (anak) dan *gendang singindungi* (induk). *Gendang singanaki* ditambahi bagian *gerantung*. Bagian-bagian gendang anak dan induk adalah sama, yang berbeda adalah ukuran dan fungsi estetis akustiknya. Bagian-bagian gendang itu adalah: (a) *tutupgendang*, yaitu bagian ujung konis atas. *Tutup gendang* ini terbuat dari kulit *napuh* (kancil). Kulit napuh ini dipasang ke bingkai bibir penampang gendang. Bingkainya terbuat dari bambu, (b) *Tali gendang* lazim disebut dengan *tarik gendang*, terbuat dari kulit lembu atau kerbau, (c) *Kayu gendang* yang telah dilubangi yang disebut badan gendang terbuat dari kayu nangka (*Artocarpus integra sp*).

Salah satu sampel contoh ukuran untuk bagian atas gendang anak adalah 5 cm, diameter bagian bawah 4 cm dan keseluruhan 44 cm. Ukuran gendang kecil yang dilekatkan pada gendang anak, diameter bagian atas 4 cm, diameter bagian bawah 3 cm, dan panjang keseluruhan 11,5 cm. Alat pukulnya (stik) terbuat dari kayu jeruk purut. Alat pukul gendang keduanya sama besar dan bentuknya. Panjangnya 14 cm dan penampang relatif 2 cm. Untuk *gendang indung*, diameter bagian atas 5,5 cm, bagian bawah 4,5 cm, panjang keseluruhan 45,5 cm. Bahan alat pukulnya juga terbuat dari kayu jeruk purut. Ukuran alat pukul ini berbeda yaitu yang kanan penampangnya lebih besar dari yang kiri, yaitu 2 cm untuk kanan dan 0,6 cm untuk kiri. Panjang keduanya sama 14 cm.

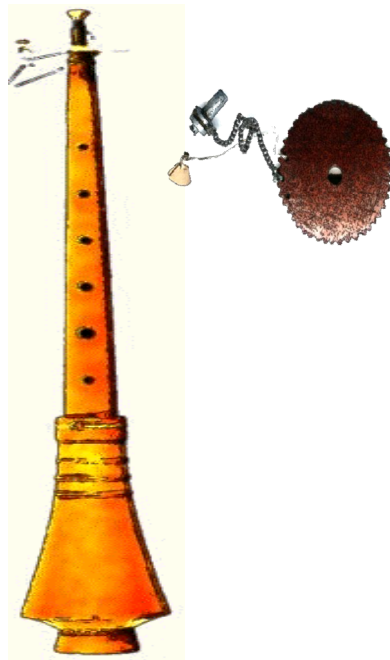
C. *Gung dan penganak*, yaitu pengatur ritme musik tradisional Karo. *Gung* ini diklasifikasikan ke dalam kategori idiofon yang terbuat dari logam yang cara memainkannya digantung. *Gung* terbuat dari tembaga, berbentuk bundar mempunyai pencu. *Gung* dalam musik tradisional Karo terbagi dua yaitu *gung penganak* dan *gung*. Salah satu contoh ukuran *gung penganak* diameternya 15,6 cm dengan pencu 4 cm dan ketebalan sisi lingkarannya 2,8 cm. Pemukulnya terbuat dari kayu dan dilapisi dengan karet. *Gung* mempunyai diameter 64 cm dengan pencu berdiameter 15 cm dan tebal sisi lingkarannya 10 cm. Pemukulnya terbuat dari kayu dan dilapisi karet.

D. *Mangkuk michiho*, yaitu mangkuk yang diisi air, yang fungsinya secara musikal adalah untuk membawa ritme ostinato (konstan).

Gambar 1.1 *Gung*



Gambar 1.2 *Sarune*



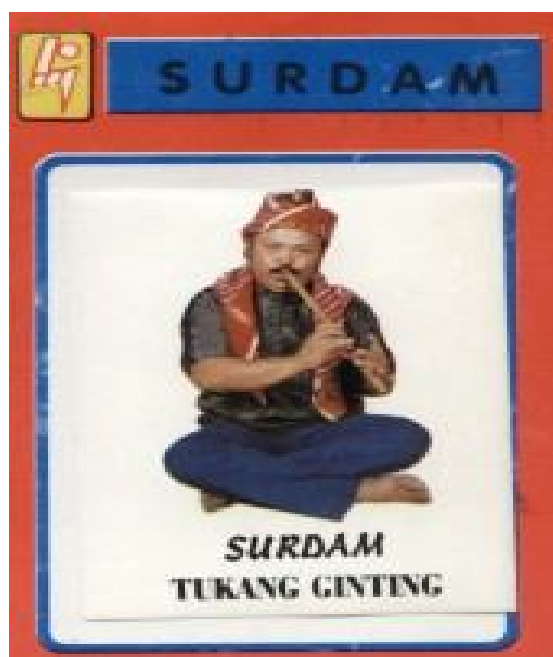
Gambar 1.3 Teknik memainkan *sarune*



Gambar 1.4 Teknik memainkan *gendang singanaki* dan *Singindungi* untuk iringan prosesi upacara



Gambar 1. 5 Pemain *surdam* terkenal Tukang Ginting



4.2 Landek

Istilah *landek* dalam bahasa Karo adalah memiliki denotasi yang hampir sama dengan tari dalam bahasa Indonesia. Menurut masyarakat Karo, masing-masing gerakan *tari (landek)* selalu berhubungan dengan perlambangan tertentu. Masing-masing perlambangan tersebut selalu menggambarkan sifat manusia maupun hubungan seseorang dengan orang lain di dalam kehidupan sosialnya.

Menurut Bujur Sitepu secara garis besar tari Karo dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu: (1) tari religius, (2) tari adat, dan (3) tari muda-mudi. Di antara tari religius adalah: *tari guru*, *mulih-mulih*, *tari tungkat*, *tari peselukken*, dan *tari tembut-tembut*. Tari-tarian tersebut biasanya dibawakan oleh golongan *dukun* atau *guru*. Tarian adat biasanya dilakukan pada upacara adat, dimana pihak-pihak yang menari adalah golongan keluarga dekat, antara lain *anak beru*, *kalimbubu*, dan *senina*. Jadi tujuan tari ini adalah sebagai suatu adat dengan penuh penghormatan. Pada tarian muda-mud norma ritual dan religi tak begitu mengikat. Hanya usaha untuk menunjukkan kelincahan dan keindahan menari. Tari ini lebih menekankan fungsi hiburannya, oleh karena

itu sering dilakukan bersama-sama dengan *perkolong-kolong* dengan membentuk pasangan menari.

Dalam setiap aktivitas tari di Karo, baik tari religius, adat, maupun mudamudi, terdapat tiga aspek pokok berkaitan dengan gerak tari. Ketiga aspek ini dapat dikategorikan sebagai unsur pembentuk tari Karo, yaitu gerak: *endek* (turun dan naik); *jole* (yaitu goyang badan); dan *lempir tan* (yaitu lentik jari). Sedangkan geseran kaki, gerak pinggang, dan main mata biasanya tidak banyak dieksplorasi dan diperkenankan menurut norma adat istiadat Karo, karena diapandang tidak sopan. Namun belakangan ini, dalam budaya kontemporer Karo, terutama setelah populernya lagu-lagu Karo versi baru, maka terciptalah beberapa tari baru dengan peraturan tertentu seperti *Piso Surit*, *Tari Terang Bulan*, *Tari Mbuah Page*, dan lain-lain. Dengan demikian terjadi juga perubahan-perubahan norma dalam budaya Karo dalam konteks global.

Gambar 1.6 *Landek Karo*



Di antara makna-makna perlambangan dalam tari Karo adalah sebagai berikut. (1) Gerak tangan kiri naik, gerak tangan kanan ke bawah, melambangkan *tengah rukur*, maknanya adalah menimbang-nimbang sebelum berbuat; (2) Gerakan tangan kanan ke atas, gerakan tangan kiri ke bawah melambangkan *sisampat-sampaten*, maknanya adalah saling tolong-menolong dan saling membantu; (3) Gerakan tangan kiri ke kanan ke depan melambangkan *ise pe la banci ndeher adi langa sioraten*, artinya siapa pun

tak boleh mendekat jika belum tahu hubungan kekerabatan, ataupun tak kenal maka tak sayang; (4) gerakan tangan memutar dan mengepal melambangkan *perarihen enteguh*, yaitu mengutamakan persatuan, kesatuan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat; (5) gerakan tangan ke atas, melambangkan *ise pe la banci ndeher*, siapa pun tak bisa mendekat dan berbuat secara sembarangan; (6) gerak tangan sampai ke kepala dan membentuk posisi seperti burung merak, melambangkan *beren rukur*, yang maknanya adalah menimbang sebelum memutuskan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna; (7) gerak tangan kanan dan kiri sampai di bahu melambangkan *beban simberat ras simenahang ras ibaba*, artinya mampu berbuat harus mampu pula menanggung akibatnya, atau berarti juga sebagai rasa sepenanggungan; (8) gerakan tangan di pinggang melambangkan penuh tanggung jawab; (9) gerakan tangan kiri dan tangan kanan ke tengah posisi badan berdiri melambangkan *ise pe reh adi enggo ertutur ialo-alo alu mehuli*, maknanya tanpa memandang bulu siapa pun manusianya apabila sudah berkenalan akan diterima dengan segala senang hati.

4.3 Teater Tembut-tembut

Salah satu teater tradisional di Sumatera Utara yang cukup terkenal dalam konteks pariwisata adalah *tembut-tembut* dari budaya Karo. Di Simalungun terdapat teater *Toping-toping* atau *Huda-huda*. Sementara dalam kebudayaan Melayu contohnya adalah *bangsawan*, *tonil*, dan *sandiwara*. Pada masyarakat Toba adalah *Opera Batak*. *Tembut-tembut* di daerah Karo yang terkenal sampai sekarang adalah yang ada di daerah Seberaya sehingga sering disebut *tembut-tembut* Seberaya. Tema ceritanya adalah hiburan bagi raja yang ditinggal mati anaknya.

Bilakah terciptanya *tembut-tembut* Seberaya tidak dapat dipastikan secara tepat. Namun menurut penjelasan para informan, dapat diperkirakan berdasarkan tahun serta penyajiannya di Batavia Fair yaitu tahun 1920. Berdasarkan tahun di atas, para informan memperkirakan terciptanya *tembut-tembut* adalah sekitar tahun 1915. Awalnya berfungsi hiburan. Dalam arti digunakan untuk menyenangkan hati masyarakat yang menontonnya. Namun dalam perkembangan selanjutnya penyajiannya digunakan dalam konteks upacara *ndilo wari udan* (upacara memanggil hujan). Kapan mulai pemakaian *tembut-tembut* dalam konteks *ndilo wari udan* pun tidak diketahui secara pasti.

Tembut-tembut Seberaya terdiri dari dua jenis karakter (perwajahan) yaitu karakter manusia dan karakter hewan. Karakter manusia terdiri dari empat tokoh (peran) yaitu satu *bapa* (ayah) satu *nande* (ibu), satu *anak dilaki* (putra), dan satu *anak diberu* (putri). Karakter binatang hanya mempunyai satu tokoh (peran) yaitu si *gurda-gurdi* (burung enggang).

Jalannya pertunjukan *tembut-tembut* adalah dimulai dengan membawa *tembut-tembut* serta kelengkapannya ke tempat penyajian. Di tempat

penyajian masing-masing pemain memakai *tembut-tembut* dan pakainnya sesuai dengan perannya masing-masing. Selepas itu, pemimpin penyajian menyuruh pemain musik supaya memainkan gendang dengan ucapan: “*Palu gendang ena*” artinya “Mainkan musiknya.” Pemain musik memainkan *gendang* dan pemain *tembut-tembut* mulai menari. Posisi pemain *tembut-tembut* menari pada mulanya sejajar membelakangi pemain musik. Posisi ini dipertahankan hingga pemusik memainkan dua buah lagu yaitu lagu *Perang Empat Kali* dan lagu *Simalungen Rayat*.

Pada lagu ketiga, yaitu lagu *Kuda-kuda* posisi penari mulai berubah, pola tarinya tidak mempunyai struktur yang baku dilakukan secara improvisasi. Penari yang memainkan karakter burung enggang selalu seolah-olah ingin mematak tokoh (peran) *anak diberu* (anak perempuan). Penari yang berkarakter ayah berusaha menghalangi gangguan burung enggang tersebut.

Bila pemain yang berkarakter ayah gagal menghalanginya maka pemain yang berkarakter anak laki-laki datang membantu. Demikian lakon pemain penari dapat dilihat pada waktu pertunjukan diiringi dengan lagu *Kuda-kuda* dan lagu *Tembutta* tetapi gerakan tari yang diiringi lagu *Tembutta* lebih cepat karena meter lagu *Tembutta* lebih cepat dibandingkan meter lagu *Kuda-kuda*.

5. Penutup

Seni pertunjukan dalam masyarakat Karo merupakan bagian integral dari kebudayaannya. Seni pertunjukan ini mencerminkan ide-ide budaya yang terwujud dalam aktivitas dan artifak. Dalam seni pertunjukan masyarakat Karo dapat dijumpai sistem-sistem nilai yang relevan diterapkan dalam konteks global sampai sekarang ini. Di dalamnya juga terkandung aspek-aspek perlambangan semiotis, yang hanya dapat dipelajari melalui teknik *being native* (melakukan seperti etnik pendukungnya) serta diverifikasi dengan teknik *verstehen*. Dalam seni pertunjukan Karo terkandung juga keunikan-keunikan yang memperjelas dan mempertajam jatidiri manusia Karo. Kini situasi dalam konteks pemikiran global seperti misalnya posmodernisme, orang-orang seluruh dunia termasuk orang Karo ditantang untuk merespons segala dampak dari globalisasi ini. Mampu atau tidaknya tergantung dari kebijakan yang diatur oleh peradaban mereka. Kita tunggu saja.

Catatan:

1. Estetika dan seni (musik serta tari) mempunyai hubungan. Beberapa filosof mengemukakan pandangannya. Konfucius (551-487 Seb. M.) mengemukakan bahwa musik penting untuk mendukung moral yang universal. Musik dapat menunjukkan wibawa penguasa--dan sebagai sebuah perjalanan yang menyenangkan. Plato (428-348 Seb. M.) memandang musik sebagai salah satu bagian dari etika--ada hubungan antara karakter manusia dan musik yang

- diekspresikannya. Gottfried von Leibniz (1446-1716) sebagai seorang filosof dan ahli matematika Jerman, mengemukakan bahwa musik dan tari merefleksikan sebuah ritme universal, mencerminkan dasar-dasar matematika, disertai pengalaman dan kesadaran akan hubungan numerik. Rene Descartes (1596-1690) memandang bahwa dasar-dasar musik merupakan kegiatan matematis.
2. Khusus pada kedua *merga* ini antara *submerga* dengan *submerga* yang berbeda dalam satu *merga* ada yang diperkenankan melangsungkan pernikahan.

6. Daftar Pustaka

- Bangun, Tridah, 1992, *Manusia Batak Karo*. Jakarta: Inti Indramayu.
- , 1990, *Penelitian dan Pencatatan Adat-istiadat Karo*. Jakarta: Yayasan Merga Silima.
- Merriam, Alan P., 1992, *The Anthropology of Music*, Evanston: North Western University Press.
- Nurkariana, 1992, "Studi Deskriptif tentang Aspek Musik Vokal pada Upacara Nendong di Desa Kineppen." Medan: Skripsi Sarjana Etnomusikologi FS USU.
- Putro, Brahma, 1999, *Karo dari Zaman ke Zaman*. Medan: Ulih Saber.
- Radcliffe-Brown, A.R., 1992, *Structure and Function in Primitive Society*, Glencoe: Free Press).
- Sitepu, Anton, 1992, "Deskriptif Musik Vokal Katoneng-katoneng dalam Konteks Kerja Mengket Rumah pada Masyarakat Karo." Medan: Skripsi Sarjana Enomusikologi FS USU.
- Sitepu, Bujur, 1992, *Adat-Istiadat Karo*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Steward, Julian H., 1976, *Theory of Culture Change: the Methodology of Multilinear Evolution*, Urbana, Chichago, London: University of Illinois Press.
- Tarigan, Henry Guntur, 1990, *Percikan Budaya Karo*. Jakarta: Yayasan Merga Silima.
- Tarigan, Kumalo, 1992, *Aspek Metafora dan Onomatopea dalam Tradisi Budaya Musik Karo*. Medan: Fakultas Sastra USU.

Tentang Penulis

Samsul Tarigan lahir di Peceren, Karo, 4 November 1958. Ia adalah alumni Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara tahun 1984. Menamatkan Sekolah Rakyat 1971 di Pecerene, sekolah Menengah Pertama tahun 1974 di Berastagi, Sekolah Menengah Negeri III Medan tahun 1977. Mengikuti Kursus Ketahanan Nasional tahun 1977. Pernah menduduki jabatan Sekretaris Jurusan Sejarah FS USU, Staf Ahli Dekan, dan kini menjabat Pembantu Dekan III FS USU. Ia aktif melakukan penelitian terhadap masyarakat Karo dari aspek sejarah sosial maupun budaya dan seni.

INTEGRASI DAN KONFLIK PADA MASYARAKAT MULTIETNIK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN SEJARAH

I Made Pageh

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja Bali

Abstract

This study is to examine how conflict should be managed especially in history education that it leads to integration, not disintegration. The founding fathers of this country realized that unitary republic of Indonesia was established on the ground of pluralism – multi-ethnicity, multi-culture, and multi-religion. With this condition, conflict and disintegration cannot be avoided because conflict appears together with the objective of the pluralistic Indonesian while integration is something continuously created. To anticipated the split of nationalism, a model of history education that can answer the challenge in the future needs to be made. New nationalist needs to be introduced and developed by manipulating the students' IQ, EQ, and SQ. Consequently, the history education should be arranged by: (1) emphasizing the objective of learning process on the future context, (2) emphasizing context approach, (3) finding basic concept and structures of historical events, (4) developing criticism among the students in finding history as actuality, and (5) arranging teaching materials that fit in the latest development of history of science. This attempt is expected to be able to produce critical and smart students against stupidity and poverty.

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki beberapa keistimewaan. Dilihat dari posisinya ia terletak pada silang dua benua dan dua samudera. Demikian pula penduduknya yang sangat padat dan bersifat multi-etnik dan multikultur. Semua ini merupakan anugerah sekaligus tantangan di masa depan terutama dalam menghadapi perkembangan yang tidak dapat diprediksi. Keadaan alam, sifat bakat bangsa Indonesia, cita-cita bangsa asing, kepadatan penduduk, pembagian kerja, pembentukan modal, serta masuknya Indonesia

dalam kancah pergaulan dunia di era globalisasi, sangat menentukan arah perkembangan masa depan bangsa Indonesia (Gonggrijp, 1928:5).

Di sekitar awal abad XX, pemerintah kolonial Belanda menggerakkan masyarakat Indonesia melalui westernisasi. Implikasinya, terjadi semacam pemaksaan sistem budaya Barat di Indonesia, dan menembus sendi-sendi kehidupan masyarakat yang paling dasar. Akibatnya, berbagai sifat merasuki bangsa Indonesia, seperti komersialisasi, industrialisasi, penguasaan teknologi komunikasi, transportasi, dan diwarnai pula oleh sistem teknokrasi birokrasi Barat (lihat Suryo, 1991; Hardono, 1999:1). Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai tradisional menuju modernisasi. Sendi nilai dasar dalam kehidupan masyarakat seperti kekeluargaan, gotong royong, rasa bakti dan kesetiakawanan sosial dalam berbagai bentuknya makin memudar (Burger, 1971). Perubahan paradigma masyarakat yang berorientasi pada nilai ekonomi pasar dan adanya pergeseran-pergeseran nilai itu, banyak memunculkan konflik nilai pada masyarakat.

Teknologi telah mengubah pikiran manusia bahkan pandangan dunianya. Budaya teknologis (*newtownian*) tidak ramah lingkungan dan peradaban lokal memunculkan konflik-konflik keruangan di mana-mana. Manusia secara mental, pelan tetapi pasti, diperbudak oleh alat/teknologi itu sendiri (Jacob, 1988). Perubahan nilai budaya dari keseimbangan ekologis (georelegio-magis) ke mekanistik ternyata sangat berpengaruh terhadap pertahanan jati diri manusia (Capra, 2000:1). Kartodirdjo (1999) menyebut dampak negatif industrialisasi dan teknologi perlu diwaspadai agar akar identitas lokal tidak tercabuti, bahkan diharapkan tetap menjadi unsur pokok dalam mengembangkan kepribadian bangsa di masa depan (Kartodirdjo, 1999). Dalam konteks ini dianggap penting untuk memahami konflik, terutama upaya untuk mengubah konflik baik internal maupun eksternal menjadi tenaga untuk berkompetisi secara positif.

Masyarakat Indonesia sedang mengalami pelbagai diskontinuitas tatanan nilai, psiko-morfik, perilaku sosial, sosial-ekonomi, politik, kultural, dan sebagainya. Pendidikan nilai dan sejarah (pengalaman kolektif) diharapkan dapat berfungsi sebagai ordinar ceruk sosial (*social niche*). Jiwa jaman dan ikatan budaya jaman (nasionalisme) sering dipahami hanya menjadi tanggung jawab pendidikan sejarah, bahkan dijadikan tumpuan utama untuk menunjukkan arah transisi itu. Namun, secara faktual pendidikan sejarah tidak mampu mengatasi permasalahan kognisi bangsa yang sedang suram dan kalap ini. Dehumanisasi itu, gagal ditangkal dengan nasionalisme tingkat tinggi, ideologi tingkat tinggi, bahkan dengan senjata api pun jua. Dalam kondisi demikian, model pendidikan sejarah di masa lalu dianggap bermasalah, baik materi, proses, dan sistem pengajarannya (Widja, 1989, 2002).

Dari uraian itu beberapa permasalahan perlu dibahas lebih lanjut, yaitu bagaimana integrasi dan konflik dalam masyarakat multietnik itu dipahami, bagaimana *zeitgeist* dan *culturgebundenheit* yang ada dalam transisi dikaitkan dengan integrasi bangsa, dan pendidikan sejarah yang bagaimana diperlukan dalam kondisi masyarakat yang sedang berubah. Topik-topik di atas dijadikan bahan diskusi dalam tulisan ini dengan harapan dapat menjadi alternatif solusi dalam menghadapi kemungkinan disintegrasi bangsa, atau terbelahnya integrasi bangsa oleh berbagai akses negatif.

2. Integrasi dan Konflik dalam Masyarakat Multietnik

Masyarakat multietnik selalu dibayangi konflik dan keinginan integrasi. Oleh karena itu konflik dan integrasi merupakan bagian integral dari masyarakat multietnik. Secara ideal mereka menghendaki integrasi, sedangkan di pihak lain konflik secara struktural dan fungsional tidak dapat dihindari. Konflik sering dianggap sebagai patologi sosial, padahal jika dikelola dengan baik bisa menjadi kekuatan pembangunan bangsa (lihat Atmadja, 2000; Miall *et al.*, 2000).

Latar belakang timbulnya integrasi maupun konflik dalam masyarakat multietnik perlu diidentifikasi dengan baik, sehingga sisi penguat dan pelemah integrasi bermanfaat untuk menciptakan kedamaian bersama dan demi keutuhan bangsa Indonesia. Terintegrasinya multietnik di Indonesia merupakan produk sejarah yang khas Indonesia. Kita tahu betapa beratnya mempertahankan persatuan dan kesatuan negara ini, terbukti dengan banyaknya korban darah, jiwa, perasaan, dan harta benda di Nusantara selama ini. Berbagai suka duka bersama telah dirasakan, sejak Indonesia berdiri sebagai negara bangsa, tanggal 17 Agustus 1945 (Abdullah, 1985).

Secara teoretik ada beberapa penyebab tumbuhnya integrasi suatu bangsa sehingga perlu dikelola agar dapat menjadi kekuatan, di antaranya adalah kesepakatan sistem budaya fundamental koordinatif (tidak dapat dipungkiri Pancasila merupakan *to be or not to be*), adanya kebudayaan dominan, kuantitas sosio-demografis (migrasi etnik Madura dan Jawa di Bali, orang Bugis di sekitar pelabuhan, pecinan di Nusantara). Dibutuhkan adanya kelompok sosial menyilang dan memotong (berbagai organisasi yang anggotanya multietnik, seperti klub sepak bola, *volly* misalnya), dan penciptaan budaya komplementer yang saling melengkapi. Beberapa fakta sosial itu perlu diupayakan secara bersama-sama dan terus-menerus agar kerukunan sosial antar-segmen bangsa itu terjadi (Atmadja, 2001).

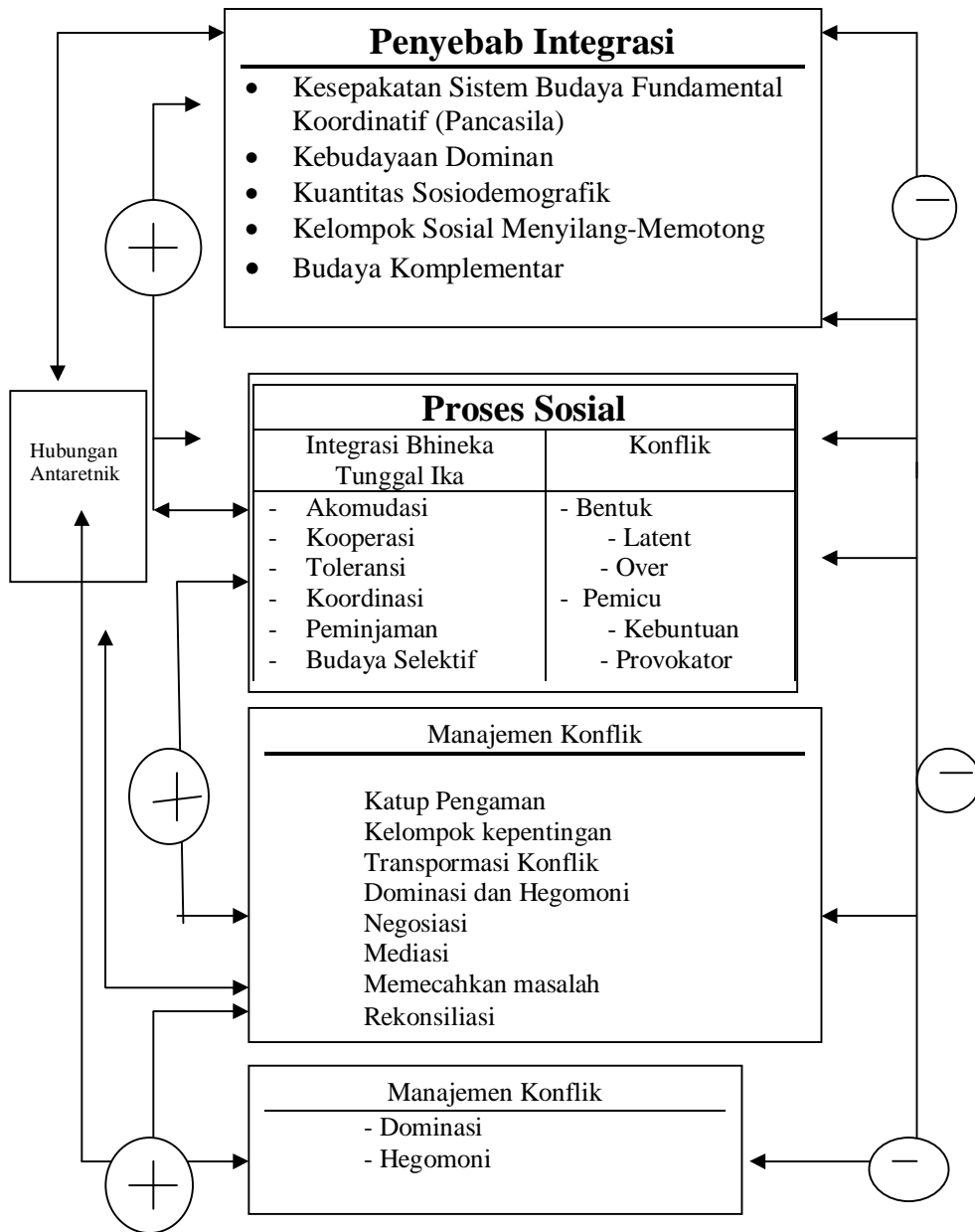
Proses sosial dalam masyarakat multietnik memberi peluang adanya dua kemungkinan, yaitu konflik dan atau integrasi masyarakat bercorak multietnik. Konflik bisa berbentuk *latent* atau terbuka (*over*) dan pemicunya bisa datang dari seorang provokator atau karena terjadi kebuntuan dialog di antara komponen konflik. Di sisi lain integrasi multikultural dapat berbentuk

akomodatif, kooperatif, toleran, koordinatif, pemimjaman unsur budaya selektif, dengan penuh kesadaran agar terjadi integrasi sosial secara damai.

Penyelesaian konflik umumnya mengambil bentuk penciptaan katup pengaman, mengisolasi kelompok kepentingan, transformasi konflik, dominasi dan hegemoni, negosiasi, mediasi, memecahkan masalah bersama, dan berbentuk rekonsiliasi (Miall *et al.*, 2000; Geertz, 1981). Usaha apa pun yang dipergunakan untuk mengurangi kemajemukan Indonesia, entah dilakukan oleh Soekarno dengan nasionalisme, Islam, atau negara komunisnya, dan Soeharto dengan ideologi tingkat tingginya, akan menimbulkan bencana, karena Indonesia terdiri dari banyak suku (Geertz, 1999:52). Pada zaman Orde Baru penanganan konflik lebih banyak bersifat hegemoni dan dominasi negara serta kekuasaan dengan ideologi tinggi, sehingga tidak dapat memuaskan pihak-pihak yang berkonflik. Dengan demikian warisan permasalahan zaman Orde Baru sekarang bagaikan “tumpukan gunung es yang baru mencair” (Tjondronegoro, 1999; Wiradi, 1984:286) yang mengakibatkan terjadinya “banjir bandang” (*belabar agung*) yang berupa gejolak reformasi yang sumber dan arahnya mulai tidak jelas.

Dari hasil penelitian mutakhir terhadap *trend* konflik internasional terakhir ternyata bukan konflik antar-negara atau sosial-internasional yang terjadi, tetapi lebih merefleksikan melemahnya struktur negara, runtuhnya kedaulatan dan ikatan lokal dalam sistem negara bangsa. Sumbangan eksternal terhadap konflik berskala lokal dapat dilihat dalam banyak kasus keterlibatan institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa yang terkesan sangat berlebihan. Sumbangannya bukan mencari solusi terbaik, tetapi terkadang lebih memicu konflik menjadi lebih meluas dan atau menginternasional (Miall *et al.*, 2000: 49; Faruk, 2001). Dalam aras teori konflik dapat digambarkan sebagai berikut.

Bagan Gambaran Teoretis Integrasi dan Konflik pada Masyarakat Multietnik



Diadaptasikan dari berbagai buku dengan kertas kerja Atmadja, *Integrasi, Konflik dan Manajemen Konflik pada Desa Multietnik di Bali Utara*. (IKIP Negeri Singaraja: 2002)

3. *Zeitgeist* dan *Cultuurgebundenheid*¹

Pembukaan UUD '45 memberikan kerangka dasar kehidupan berbangsa, dan bernegara. Secara garis besar dapat disebutkan ada beberapa *consensus gentium* yang perlu diaktualisasi sebagai kesepakatan dasar, yaitu kemerdekaan, kesatuan bangsa, negara nasional, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, negara hukum, dan kesetiakawanan internasional (Suseno, 1992: 146).

Pancasila sebagai kesepakatan dasar yang fundamental, sesungguhnya merupakan aktualisasi secara kontinu. Nilai-nilai dasar itu tetap terbuka terhadap tafsir karena pengaruh perubahan zaman (*zeitgeist*) dan ikatan budaya zaman (*cultuurgebundenheid*). Berbagai pembahasan mengenai Pancasila yang selama ini telah dimasyarakatkan secara luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan pendekatan yuridis, filosofis, dan pendekatan historis ternyata mengalami kegagalan. Pendekatan historis yang dipergunakan, lebih banyak merupakan legitimasi sejarah dibandingkan dengan memaknai *zeitgeist* dan *cultuurgebundenheid* yang ada dalam sejarah pemikiran perjuangan bangsa menuju kemerdekaan. Dengan banyaknya terjadi pengingkaran fakta sejarah maka pendekatan sejarah terkesan hanya menjadi bahan legitimasi dan *lip service* sehingga cerita sejarah berubah menjadi karya persembahan (babad modern).

Manusia sebagai bagian dari sejarah terkait erat dengan pengalamannya, sedangkan kehidupan bangsa termasuk *nation-building* terkait erat dengan pengalaman kolektifnya. Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) menuliskan "*history is the witness of times, the torch of truth, the life of memory, the teacher of life, the messenger of antiquity*" (dalam Gie, 1998:7) ("sejarah adalah saksi dari sang kala, obor dari kebenaran, nyawa dari ingatan, guru dari kehidupan, pembawa berita dari zaman kuno).

Melihat pentingnya sejarah dalam kehidupan manusia, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah maukah kita belajar dari sejarah? Bukankah kita dapat belajar dari sejarah? Sejarah dapat dipahami sebagai bahan dasar berpikir. Setiap ilmu dalam pengembangannya membutuhkan sejarah sebagai *entry behavior*-nya (lihat Collingwood, 1973). Penguasa dalam mengotentikkan dirinya, paling sering mencekoki cerita sejarah (politisasi historis) untuk tujuan itu. Dalam setiap penggalan sejarah dapat digali roh jamannya (*zeitgeist*-nya) dan di dalamnya ada lingkup budaya yang mengiringi jiwa jaman itu (*cultuurgebundenheid*) atau *alihan gumi* (istilah Bali) yang dapat memberikan dasar-dasar logika pencerahan pada

masyarakat yang menyejarah (Pageh, 2001). Kesadaran terhadap negara bangsa ini sangat dibutuhkan. Adanya perubahan jaman, dan keberlanjutan jiwa zaman (*continuity and discontinuity*) akan memberikan keluwesan bangsa dalam menghadapi masa transisi menuju kedewasaan.

Pendidikan sejarah yang dibutuhkan dalam konteks ini adalah pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya kritis tinggi dalam melestarikan kehidupan bersama. Sejarah memberikan pelajaran, bahwa Nusantara ini telah beberapa kali jatuh-bangun dan terjadi pergantian bentuk negara dan ideologi mulai dari zaman Sriwijaya, Mojopahit, kerajaan Islam, kolonial, sampai republik, tetapi sebagai bangsa yang perlu hidup di muka bumi ini tetap saja menggunakan kawasan Nusantara-Asia Tenggara sebagai *lebensrumnya*. Kawasan Asia Tenggara, tidak beda dengan aliran sungai yang tersumbat di sana-sini, oleh tanggul (sistem negara nasional) sehingga aliran airnya mengalami perubahan arah. Sementara sambil menunggu tanggul-tanggul itu bobol satu per satu atau bersama semuanya, kepentingan luar menikmati kondisi ini dengan menanamkan pelbagai kepentingannya. Akankah Indonesia (salah satu tanggulnya) bahkan terbesar di Asia Tenggara dalam waktu dekat akan bobol, tidak dapat dipastikan, karena hal itu adalah rahasia sejarah (lihat Dick, 1997; Pageh, 1998).

Dalam wacana sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang berlangsung selama tiga bulan diwarnai oleh semangat nasionalisme dan demokrasi yang religius. Hatta dan Drijarkara—secara konseptual dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu: sila pertama dan kedua sebagai landasan moral dari Republik yang akan didirikan; dan sila ketiga sampai kelima sebagai landasan politik. Usaha untuk memerdekakan diri di dalam wilayah RI dari Sabang sampai Merauke, jelas melanggar semangat pendiri negara. Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Sembilan di bawah pimpinan Soekarno, ada anak kalimat “... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Penghapusannya sangat mudah karena adanya jiwa kebersamaan tanpa membedakan agama dan suku, dan tidak ada alasan di alam demokratis yang multietnik untuk memaksakan kehendak dalam urusan agama yang dianut oleh warga negaranya (lihat Kuntowijoyo, 1991; Bahar, 1996:18; Robison, 1990). Dalam pendidikan nilai, pengembangan pendekatan *cross cultural*, serta inter dan antar-etnik, merupakan kebutuhan mendesak untuk mengaktualisasikan nilai-nilai “*e pluribus unum*” (model USA) dan *bhineka tunggal ika a la* Indonesia (Al-Rasid, 2002: 161).

Bersatunya pluralisme etnik itu didasari oleh rasa senasib dan sepenanggungan, yang merupakan reaksi dari penjajah Belanda (lihat Kohn, 1984; Hobsbawm, 1992; Kartodirdjo, 1999). Reaksi itu memunculkan kesepakatan untuk memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 (Abdulgani, 1962), di wilayah “bekas jajahan Hindia Belanda di

Indonesia”. Proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia dalam mengatasi kesukuan, kedaerahan, dan penetrasi asing. Peristiwa heroik itu memunculkan tokoh-tokoh nasional yang disebut pahlawan dan ada pula yang sekaligus dianggap pengkhianat oleh generasi kemudian. Hal ini tentu merupakan wujud dari nasionalisme Indonesia, yang kini ada dalam persimpangan antara kekuatan etnosentrisme dan kekuatan pengaruh globalisasi (Faruk, 2001; Sukadi, 2002). Nasionalisme kita perlu diperhatikan dan ditata kembali sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Tidak satu pun warga negara Indonesia ingin mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjadinya tanda-tanda penyapihan di berbagai daerah, tidak lebih hanya sebuah reaksi dari ketidakadilan politik, ekonomi, dan sosial daerah dengan pusat. Sebagai embun penyejuk mungkin sangat perlu menengok masa lalu Indonesia, seperti misalnya tersirat dalam pidato Soekarno yang berjudul “Jasmerah”, jangan sekali-kali melupakan sejarah (Soekarno, 1963).

4. Pendidikan Sejarah: Pengembangan Nasionalisme yang Kritis

Dari sub topik ini, muncul pertanyaan reflektif mendalam, mengapa sejarah dikaitkan dengan proses pendidikan dalam kehidupan suatu bangsa baik secara formal maupun informal? Apakah karena substansi sejarah adalah yang paling mudah untuk diinterpendensi dalam proses edukasi-instruktifnya dengan muatan politik, atau tujuan-tujuan lainnya? Ada banyak pertanyaan untuk persoalan itu dan yang paling umum ditemukan adalah sejarah diajarkan sebagai sarana pewarisan nilai (*value heritage*), transmisi budaya (*cultural transmission*) dalam rangka proses sosialisasi dan enkulturasi jati diri kelompok (Hatta, 1978). Sejarah sering juga dikatakan sebagai sumber nilai pengikat integritas kelompok (*moral precepts*). Di samping itu ada pula yang mengaitkan dengan durasi temporal, sehingga sejarah dapat dipergunakan untuk memahami masa lalu, masa kini dan sebagai bekal untuk menghadapi tantangan masa depan (Widja, 2002:56).

Pemilihan substansi permasalahan berupa konsep-konsep dasar tentang nilai-nilai kesejarahan perlu dikembangkan dari sebuah cerita sejarah. Proses, dan cara pembelajarannya, perlu pula disinergikan sehingga maksud dan tujuan dapat tercapai. Komponen ini diharapkan dapat menghasilkan sosok atau format tatanan kognitif manusia yang diharapkan. Dalam konteks di atas, tanggung jawab menghasilkan rekonstruksi cerita sejarah yang objektif adalah menjadi tanggungjawab moral sejarawan kritis, sedangkan proses dan cara pembelajarannya ada pada sejarawan pendidik. Sinergi antara dua kekuatan ini akan dapat menghasilkan materi dan sistem edukasi sejarah yang ideal. Hasil kajian sejarah kritis model karya sejarah sosio-kultural, seperti dapat dilihat dari karya Sartono Kartodirdjo, Djoko Suryo, Kuntowijoyo, Ibrahim Alfian, A.B. Lafian, Putra Agung, Parimarta (lihat

disertasi mereka), dan sebagainya, belum dimanfaatkan dalam pendidikan sejarah. Sebenarnya sejak tahun 1970-an historiografi Indonesia telah banyak mengalami kemajuan dalam garapannya, terutama dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial dalam historiografi (lihat Klien, 1996: 11; Berkhofer, 1971; Gardiner, 1988; Kuntowijoyo, 1994; Kartodirdjo, 1992). Akan tetapi kepentingan politik penguasa mengakibatkan materi pengajaran sejarah tidak berkembang karena dijaga ketat agar sesuai dengan pesanan penguasa, seperti Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang pernah diperkenalkan oleh mantan Mendikbud Nugroho Notosusanto.

Kajian sejarah kritis tersebut di atas sebenarnya dapat membantu pengembangan model pembelajaran sejarah kritis-analitis, yang dapat memberikan pencerahan pada siswa, dan dapat berfungsi menyambung perluasan wawasan kolektif siswa ke belakang. Dengan demikian sejarah sebagai dasar berpikir akan berperan secara fungsional, kritisisme intelektual siswa terasah jauh melampaui umurnya karena dapat menerobos windu dan abad-abad sebelumnya. Sementara waktu yang sedang berjalan bersamaan dengan umurnya akan dilalui sambil melakoni hidupnya. Kebijakan menghargai waktu (*sense of times*), menemukan pola-pola sistem sosial dalam sejarah, termasuk konflik dan integrasi dalam proses sosial dengan lebih mudah dapat ditemukan. Siswa tidak dapat didiktekan nilai berupa barang jadi milik generasi usang yang mungkin tidak lagi sesuai dengan jiwa jaman (Dray, 1980:99; Burke, 1992:28; Klien, 1996:11).

Proses edukatif nilai sejarah sering dikritik oleh banyak kalangan karena dianggap lebih menonjolkan nilai instrumental dibandingkan dengan instrinsiknya. Sejarah tidak lebih dipahami sebagai mesin cetak manusia dengan format cetak biru yang telah ditentukan sebelumnya, baik dalam rangka transmisi budaya maupun dalam penyiapan *moral precepts* bagi peserta didik. Dalam kerangka pikir seperti itulah muncul kecenderungan pemujaan berlebihan terhadap pahlawan masa lampau, bahkan menjadi makhluk setengah dewa, yang pada saatnya memberikan peluang terhadap kekaburan kebenaran realitas sejarah, karena “nabi-nabi sang kala” menjadi terpasung oleh kepentingan sesaat penguasa (lihat Abdullah, 1996; Widja, 2002; Gie, 1998:7).

Pendidikan sejarah model baru bukan untuk menciptakan barang jadi untuk dicontoh, sehingga menghasilkan perilaku kolektif seperti generasi pewarisnya. Kita sadar bahwa setiap zaman akan menuliskan sejarahnya kembali, sesuai dengan tantangan zamannya (Brunner, 1990:33). Sejarah dalam hal ini, seharusnya merupakan “*lessons history*”, yang menghasilkan kesiapan mental, intelektualitas yang tinggi, kritis, responsif terhadap perubahan jaman yang selalu berubah. Seperti pendapat Toffler yang dikutip Widja (2002:34) pendidikan diorientasikan pada kecepatan dan ketepatan mengantisipasi serta adaptasi problema yang setiap saat muncul dalam

hidupnya, *learn how to learn*, di era *super-industrial education system* nanti. Tantangan ke depan yang perlu direspons adalah pembentukan nasionalisme baru, yaitu manusia Indonesia yang sadar iptek, kreatif, memiliki solidaritas etis-relegius (Moertopo, 1977:50). Dengan demikian empat sendi pendidikan seperti dianjurkan oleh UNESCO, yaitu *learning to know* (belajar untuk mendapat pengertian), *learning to do* (belajar untuk dapat berbuat secara kreatif di lingkungannya), *learning to live together* (belajar untuk dapat hidup bersama), dan *learning to be* (belajar menjadi diri berkepribadian) dapat dilaksanakan dalam pembelajaran sejarah.

Model pembelajaran perlu juga mengembangkan seluruh potensi peserta didik sesuai dengan teori pengembangan potensi dasar manusia secara integratif. Pengembangan potensi dasar secara integratif antara lain pengembangan aspek intelegensia berupa kecerdasan, *intellectual question* (IQ), *emotional question* (EQ), dan *spiritual questions* (SQ) sangat penting. Seperti kata Zohar “*we use SQ to deal with existential problems*”, sebagai perkembangan psikologi mutakhir yaitu psikologi transpersonal (lihat Zohar, 2002:16).

Pendidikan sejarah memiliki peluang paling besar untuk mengembangkan model pembelajaran yang berdimensi integratif itu. Tumbuhnya jiwa kepemangkuan di masyarakat sesungguhnya dapat dilihat dalam konteks pemahaman sejarah secara integratif dan tidak selalu dikaitkan dengan komersialisasi eranya. Dengan kata lain, makna pembelajaran sejarah dapat pula mengacu pada pertanyaan: *how to think much, how to do much, how to be the best, and how to live together*. Dalam pendidikan sejarah perlu diperhatikan beberapa prinsip dasar seperti: (1) perlunya penekanan sasaran proses belajar yang berorientasi ke masa depan dalam mempelajari sejarah; (2) perlunya ditekankan pendekatan ketrampilan proses dalam kegiatan belajar-mengajar sejarah, yang berarti pula penekanan aktivitas dan kreativitas siswa; (3) dalam belajar sejarah, di arahkan untuk menemukan konsep-konsep serta struktur-struktur dasar dari gambaran peristiwa masa lampau; (4) materi dan model yang menantang dan menggugah sifat kritis peserta didik terhadap logika historis, kronologis, sudut pandang, objektivitas cerita sejarah dalam berbagai perspektif, untuk menemukan gambaran *history as actuality*-nya.

Semua gambaran kenyataan di atas tentu saja harus diikuti dengan prasyarat wajib dalam praktik pendidikan sejarah, yaitu perlu dibenahi sistem pengajaran sejarah yang tidak lagi mengambil model ceramah belaka dengan mendiktekan peristiwa dan angka tahun. Pengajaran model ini akan menimbulkan kesan bahwa pelajaran sejarah hanya hafalan belaka. Bahkan, kurikulum hanya dipandang sebagai beban karena tidak terlalu dibutuhkan, hanya menjadi alat politik, atau indoktrinasi ideologi yang dipaksakan. Juga tidak boleh ada pendapat lagi bahwa pelajaran sejarah hanya sejarah

pewarisan (alih generasi) yang menghasilkan generasi entropi karena ideal masa lalu akan cepat usang di waktu yang akan datang. Pokoknya perlu dijaga jangan sampai berkembang persepsi Nietzsche seperti dikutip Carr (1972:29) bahwa sejarah hanya semacam bayangan nostalgia dari orang-orang yang sudah kehilangan keyakinan diri dan semangat hidup masa kini.

Tantangan sejarawan dan sejarawan pendidik sekarang adalah mengangkat citra dan derajat ilmu sejarah (pendidikan sejarah) dari keterpurukan di mata peserta didik dan masyarakat. Sejarah harus dapat mengangkat citra keilmuannya, sebagai ilmu yang sangat bertumpu pada kritisisme dan keunikan. Sejarah tidak mesti menjadi ilmu sosial, walau banyak meminjam konsep ilmu sosial dalam analisisnya. Membangun sebuah makna tekstual dalam sebuah konteks peristiwa tanpa mengembangkan sifat-kritis tidaklah mungkin dapat menangkap jiwa jaman dan ikatan budaya yang ada dalam kurun tertentu. Sesungguhnya untuk mendapatkan makna sejarah sangat dibutuhkan ketajaman pikiran, keluasan wawasan, serta integritas dan kejujuran pribadi seorang sejarawan.

5. Simpulan

Pendiri negara (*the founding fathers*) Indonesia memiliki penuh kesadaran bahwa bangunan negara yang mereka rintis ada di atas pluralisme yang sangat renik, yaitu multietnik, multikultur, multi agama, dan lain-lain. *Bhineka tunggal ika* telah dijadikan moto dalam lambang negara, bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional, dan prinsip *unity in diversity* perlu pula dikembangkan dengan pendekatan berpikir kritis dan analitis. Namun dalam negara multietnik konflik dan pengintegrasian tidak dapat dihindarkan. Konflik adalah lahir bersama kondisi objektif bangsa yang pluralistik, sementara integrasi adalah perlu proses penciptaan secara terus menerus. Tumpuan utama yang dibebankan dalam pendidikan sejarah secara formal dan informal di masyarakat mengandung beberapa konsekuensi, karena banyaknya kepentingan yang masuk terkait dengan penguasaan aset dan sumber daya langka yang ada di Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi terbelahnya nasionalisme oleh berbagai tantangan baru yang muncul sesuai dengan perkembangan, terutama etnosentrisme dan globalisasi, sangat perlu dikemas model pendidikan sejarah yang dapat menjawab tantangan itu ke depan. Nasionalisme baru untuk menuju Indonesia baru, patut dikembangkan seluruh potensi peserta didik (IQ, EQ, dan SQ), sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi antara pendidikan formal dengan lembaga pendidikan keagamaan. Konsekuensi dari semuanya itu, pendidikan sejarah dan pengajarannya harus ditata, dengan beberapa prinsip dasar penataannya sebagai berikut: (1) perlunya penekanan sasaran proses belajar yang berorientasi ke masa depan dalam mempelajari sejarah; (2) perlunya ditekankan pendekatan ketrampilan

proses dalam kegiatan belajar-mengajar sejarah, yang berarti pula penekanan aktivitas dan kreativitas siswa; (3) dalam belajar sejarah, di arahkan untuk menemukan konsep-konsep serta struktur-struktur dasar dari gambaran peristiwa masa lampau; (4) menantang dan menggugah kritisisme peserta didik terhadap logika historis, kronologis, sudut pandang, objektivitas *history as a written* dalam berbagai perspektif, untuk menemukan gambaran *history as actuality*-nya; dan (5) menyusun model materi baru seperti yang dihasilkan oleh sejarawan mutakhir. Semua tersebut di atas di arahkan untuk menciptakan nasionalisme yang kritis dalam melawan kebodohan dan kemiskinan.

Catatan:

1. *Zeitgeist* dan *cultuurgebundenheid* (bahasa Belanda), sebuah konsep yang memiliki makna jiwa jaman terkait dengan *sense of time* dalam kronologi, sedangkan *cultuurgebundenheid* bermakna kontinuitas dan diskontinuitas budaya yang melingkupi manusia.

6. Daftar Pustaka

- Abdulgani, H. Roeslan. tt. *Resapkan dan Amalkan: Pancasila*. Prapantja, Jakarta.
- Abdullah, Taufik.1985. *National Integration and Social Sciences*. Jakarta: T2ES.
- 1996. "Pengajaran Sejarah yang Reflektif dan Inspiratif", *Artikel dalam Jurnal Sejarah* No.6 Februari 1996.
- Al-Rasid, Harun. 2002. "Negara Kesatuan versus Federal: Mencari Bentuk Ideal Negara Indonesia di Masa Depan", dalam *Kontroversi Negara Federal: Mmencai Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan*. Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (pen.) Jakarta: Mizan
- Atmadja, I Nengah Bawa. "Integrasi, Konflik dan Manajemen Konflik Desa Multietnik", *Kertas Kerja*, pada Jurusan Sejarah IKIP Negeri Singaraja, 2002.
- Berkhofer, Robert F. 1969. *A Behavioral Approach to Historical Analysis*. New York: Macmillan Company
- Berry, John W. *et al.* . 1999. *Psikologi Lintas-Budaya: Riset dan Aplikasi*. Edi Suhardono (pen.) dan M. Fauzy (penyunting). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Boeke J.H. dan Bueger, D.H.1971. *Ekonomi Dualis Dialog antara Boeke dan Burger*. Jakarta: Bharata.
- Burke, Peter. 1988. *History and Social Theory*. British: T.J Press.
- Carr, E.H. 1972. *What is History*. New York: Alfred A. Knopf.
- Collingwood, R.G. 1973. *The Idea of History*. London: Oxford University Press.

- Dick, Howard, James J. Fox, Jamie Mackie. 1997. *Balance Development: East Java in the New Order*. Bambang Sumantri (pen.). Jakarta: Gramedia.
- Djoko Suryo, 1991. "Pengajaran Sejarah dan Globalisasi Kehidupan", dalam *Makalah*. Seminar Pengajaran Sejarah dan Perubahan Sosial di IKIP Semarang, 13 Maret 1991.
- Dray, William. 1980. *Perspektif on History*. London: Boston and Henley.
- Faruk. 2001. "Globalisasi, Reimajinasi, Deimajinasi: Sosial Negara Bangsa dan Kita", dalam *Nasionalisme-Etnisitas: Pertaruhan Sebuah Wacana Kebangsaan*. Jakarta: Seri Dian VII Tahun VIII, 2001.
- Gardiner, Juliet. 1988. *What Is History Today...?*. London: Macmillan Education.
- Geertz Clifford. 1992. *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 1999. "Awat Buaya: Tentang Keragaman Masyarakat Indonesia", dalam *Negara Demokrasi*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Geertz, Hildred. 1981. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. Jakarta: Yayasan IIS dan FISIP UI.
- Gie, The Liang: 1998. *Lintasan Sejarah Ilmu*. Yogyakarta: PUBIB.
- Hatta, Muhammad 1978. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Mutiara.
- Hobsbawm, E.J.. 1992. *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*. Hartian Silawati (penerjemah). Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Jacop, T. 1988. *Manusia Ilmu dan Teknologi*. Yogyakarta:Tiara Wacana.
- Kartodirdjo,Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia: Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono. 1994. "Kebudayaan, Sejarah Nasional, dan Proses Integrasi", *Makalah*. Disampaikan tanggal 16 Juni di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Kartodirdjo, Sartono. 1995. "Seputar Yogyakarta dan Beberapa Tokoh Kepemimpinannya", *Makalah* dalam Ceramah Pemberian Anugrah HB IX di Yogyakarta, Tanggal 19 Desember 1995.
- Klien, P.W. 1996. "Writing about the National Economy in Indonesia" dalam *Historical Foundations of a National Economy in Indonesia, 1890s-1990s*. J.Th. Lindblad Editor. Netherlands: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. A.E. Priyono (ed.). Mizan: Bandung.
- Kuntowijoyo. 1994. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ma'oed, Mohtar . 1994. *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar: Jogjakarta.
- Ma'oed, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru, 1966-1971*. LP3ES: Jakarta.

- Maliki, Zainuddin. 2000. *Birokrasi Militer dan Patai Politik dalam Negara Transisi*. Jakarta: Galang Press
- Mial Hugh, et al., 2000. *Resolusi Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Tri Budhi Sastrio (peny.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moertopo, Ali. 1978. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Yayasan Proklamasi.
- Pageh, I Made. 2001. "Dampak Pendidikan Terhadap Perubahan Sosial di Bali Utara pada Jaman Kolonial Belanda Awal Abad XX", Hasil Penelitian, 2001. IKIP Negeri Singaraja.
- Pageh, I Made. "Dari Tengkulak Sampai Subandar: Perdagangan Komuditas Lokal di Bali Utara Jaman Kolonial Belanda, 1850-1942". Yogyakarta: tesis S-2 Univeritas Gadjah Mada.
- Robison, Richard. 1990. "Power and Economy in Suharto,s Indonesia", *Kumpulan Journal of Contemporary Asia Publishers: Manila, Philippines and Wollongong, Australia*.
- Robison, Richard. 1990. "Power and Economy in Suharto's Indonesia", dalam *Kumpulan Journal of Contemporary Asia Publishers: Manila, Philippines and Wollongong, Australia*.
- Soekarno, 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Panitia Penerbit: Jakarta.
- Suhartono. *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa : Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sukadi. 2002. "Nasionalisme: di Antara Gelombang Etnisitas dan Globalisasi (Tantangan dan Peluang bagi Pendidikan dan Demokrasi di Indonesia)", *Makalah*, Seminar 24 Mei 2002 di Jurusan PPKn IKIP Negeri Singaraja.
- Suseno, Franz Magnis. 1992. *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-butir Pemikiran Kritis*. Jakarta: Gramedia.
- Suwarno. 1994. "Integrasi Nasional, Integrasi Negara 1945-1950", *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar tanggal 16 Juni 1994 di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Tjondronegoro, Sediono M.P. 1999. *Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih*, M.T. Felix Sitorus dan Gunawan Wiradi (peny.). Bandung : Akatiga.
- , 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. Singaraja Post: Singaraja.
- Widja, I Gde. 2002. *Menuju Wajah Baru Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Lepra Pustaka Utama.
- , 1989. *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Dirjen Dikti.

Zohar, Danah dan Ian Marshall. 2000. *SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan*. Rahmani Astuti, et al. (pen.). Jakarta: Mizan.

Tentang Penulis

I Made Pageh lahir di Tabanan, Bali, 31 Desember 1962. Beliau menyelesaikan studi S1 di Jurusan Sejarah FKIP Universitas Udayana Bali tahun 1986, dan tamat S2 tahun 1988 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dalam bidang Ilmu Sejarah. Beliau adalah staf pengajar FP-IPS IKIP Negeri Singaraja, Bali, sejak 1987 sampai sekarang. Ia pernah menjadi ketua jurusan Pendidikan Sejarah (1988-2001), dan saat ini menjabat sebagai PD III FP-IPS IKIP Negeri Singaraja Bali.

PENEGAKAN KEADILAN DI INDONESIA: SUATU TELAHAH HISTORIS PROSPEKTIF

Reiza D. Dienaputra
Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran

Abstract

This study historically analyzes the justice in Indonesia from colonial to present era and the prospect of its enforcement in the future. This historical review reveals several forms of injustice in Indonesia. In the colonial era, injustice occurred because of difference of rights and obligation based on social status, race, and language. While in the era of independence, injustice is seen the forms of imbalanced development between central and regional government's domination in politic, law, economy, and social affairs. In the future, justice enforcement need to be materialized by making laws and programs that support the materialization of justice enforcement, and establishing institutions that execute and monitored the justice enforcement implementation.

1. Pengantar

Keadilan telah lama menjadi permasalahan dalam kehidupan, bahkan bisa jadi telah ada sejak pertama kali bumi ini ditinggali manusia. Hal ini bisa dipahami karena keadilan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Masalah-masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang harus dan yang tidak boleh dilakukan ataupun berkaitan dengan apa yang akan diperoleh manusia akibat tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya senantiasa bersinggungan dengan keadilan. Demikian pula halnya dalam hubungan sosial antar-manusia, antar-kelompok ataupun antara manusia dengan kelompok dan sebaliknya. Keadilan menjadi tema pembicaraan yang dapat mengakibatkan suatu

hubungan sosial menjadi baik atau buruk, erat atau renggang, atau bahkan berlanjut terus atau terputus.

Seiring dengan perkembangan peradaban, keadilan sebagai bagian dari kehidupan manusia pun terus meluas ekstensi dan eksistensinya. Jika awalnya keadilan hanya berkisar pada tataran hubungan-hubungan informal antar-manusia, dalam perkembangannya secara perlahan tapi pasti, ruang lingkup keadilan pun meluas ke hal-hal yang formal, baik antar-manusia, antara manusia dengan kelompok maupun dengan institusi. Keadilan pun tidak hanya berada pada tataran kehidupan yang sederhana tetapi meluas ke wilayah lain yang lebih kompleks. Kosakata lain yang kemudian paling sering digandengkan dengan kata keadilan adalah “sosial.”

Perbincangan tentang keadilan sosial akan semakin menarik ketika dirasakan adanya ketidakadilan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik sebagai akibat hubungannya dengan orang atau kelompok lain maupun dengan institusi yang bernama negara. Dalam perkembangannya kemudian, kajian-kajian tentang keadilan sosial yang semula lebih terfokus pada masalah ekonomi merebak pula pada bidang lain. Kini, keadilan sosial juga menjadi topik pembicaraan kesehatan (lihat Waddel & Petesen, 1994; Daniels, 1985), organisasi (lihat Greenberg, 1996; Vermunt & Steesma, 1991), politik (lihat Russel, 1988; Magnis-Suseno, 1987; Rafsanjani, 1994), lingkungan (lihat Clayton & Opatow, 1994), sejarah (lihat Dienaputra dalam *Pikiran Rakyat*, 30 September 2002 dan 7 Juni 2003), hingga masalah gender (lihat Devasia & Devasia, 1990; Martin & Jurik, 1996).

Dalam kaitan itu, jelas bahwa setiap upaya penegakan keadilan sosial perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, mencakup semua, serta dilakukan secara terbuka. Hal yang tidak kalah penting adalah upaya penegakannya juga harus diikuti dengan langkah-langkah konkrit yang mampu meningkatkan pemahaman dan wawasan setiap anggota masyarakat tentang keadilan atau keadilan sosial. Bagi negara, masalah penegakan keadilan sosial ini harus menjadi perhatian penting. Terlebih, amanah bagi penegakan keadilan ini telah digariskan secara jelas di dalam Pembukaan UUD 1945. Tegaknya keadilan sosial tidak hanya akan berwujud pada tercapainya kesejahteraan rakyat tetapi juga pada terciptanya stabilitas politik dan ekonomi yang pada akhirnya akan menghantarkan bangsa ini pada tujuan yang dicita-citakan. Untuk itu pula, negara harus memiliki indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh dan dalam penegakan keadilan sosial telah dilakukan di Indonesia.

2. Realitas Keadilan di Indonesia

Perjuangan bangsa Indonesia untuk menegakkan keadilan telah berlangsung lama. Berbagai upaya yang dilakukan bangsa ini untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan sejak awal kedatangan bangsa

asing pada abad ke-16 sesungguhnya merupakan manifestasi perlawanan dari berbagai bentuk pengingkaran atas prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, perjuangan bangsa ini membebaskan diri dari kekuasaan Portugis, VOC, pemerintah kolonial Belanda, maupun pemerintah pendudukan Jepang, pada hakekatnya merupakan perwujudan untuk menegakkan keadilan di tanah tumpah darahnya. Perjuangan untuk menegakkan keadilan dalam masa penetrasi asing ini berlangsung relatif tanpa henti selama lebih dari tiga abad di berbagai wilayah tanah air.

Buah dari berbagai perlawanan ini telah berhasil menghambat upaya bangsa-bangsa asing, khususnya Belanda, untuk dapat dengan mudah menguasai seluruh wilayah Indonesia. Sejarah mencatat, hingga awal abad XX, perlawanan untuk menegakkan keadilan ini masih berlangsung di wilayah paling Barat Indonesia, yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Para pejuang penegak keadilan dari Serambi Mekah, seperti Teuku Umar dan Tjoet Njak Dhien membuktikan kegigihannya dalam upaya menegakkan keadilan di tanah airnya. Demikian pula para pejuang lain, seperti Karaeng Galesong, Prawatasari, Tuanku Imam Bonjol, Haji Wasid, Bagus Rangin, Pangeran Diponegoro, Pangeran Hidayatullah, Kiai Tapa, Patimura, maupun Hasanudin, telah menjadikan dirinya sebagai martir bagi tegaknya keadilan di bumi pertiwi.

Manifestasi perlawanan atas berbagai bentuk ketidakadilan yang digelar kekuatan asing di Indonesia dalam perkembangannya tidak hanya dilakukan melalui perlawanan bersenjata tetapi juga dengan perjuangan yang bersifat non fisik melalui organisasi-organisasi pergerakan nasional. Keberadaan para elit intelektual pribumi di tanah air sejak awal abad ke-20 menjadi awal terjadinya perluasan strategi perjuangan dalam menegakkan keadilan. Bekal pengetahuan dan pengalaman bergaul dengan komunitas internasional yang dimiliki kalangan intelektual pribumi semakin memperkuat kesadaran bahwa berbagai bentuk ketidakadilan memang digelar dengan jelas oleh pemerintah kolonial. Bentuk-bentuk ketidakadilan dimaksud tidak hanya tampak di lapangan politik, tetapi juga terjadi di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Berbagai peraturan yang dibuat pemerintah kolonial Belanda jelas-jelas memperlihatkan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip keadilan. Era ini sekaligus pula menjadi awal terjadinya pengkotak-kotakan sosial (*social exclusion*), di mana nilai dasar kemanusiaan tidak dilihat dari harkat dan martabat manusia itu sendiri tetapi dilihat berdasarkan status sosial, warna kulit, dan bahasa. Akibatnya, bangsa Indonesia ditempatkan sebagai bangsa kelas tiga di rumahnya sendiri berada di bawah bangsa yang dipandang lebih super, yaitu, Eropa dan Timur asing. Di bidang pendidikan, bangsa Indonesia yang seharusnya bebas mengenyam pendidikan dimanapun dia menginginkannya, umumnya hanya dapat belajar di sekolah-sekolah khusus untuk pribumi, yang kualitasnya jauh lebih rendah dibanding

sekolah-sekolah yang dikhususkan bagi orang Eropa ataupun Timur Asing. Di bidang politik, kesempatan bangsa Indonesia untuk dapat menyuarakan aspirasi politik sangat dibatasi oleh berbagai peraturan yang sangat represif. Akibatnya, penjara atau pembuangan ke luar Jawa menjadi “menu” para tokoh pergerakan yang dipandang kritis oleh pemerintah kolonial. *Volksraad* (Dewan Rakyat) yang diresmikan sejak tanggal 18 Mei 1918 terbukti hanyalah sebagai formalitas belaka. *Volksraad* yang dibangga-banggakan tidak lebih sebagai “komedi omong,” “stempel karet” dan kepanjangan tangan kepentingan pemerintah kolonial Belanda.

Kenyataan-kenyataan atas pengingkaran terhadap prinsip-prinsip keadilan di atas semakin menggugah para elit intelektual bangsa ini untuk terus melanjutkan perjuangan para pendahulunya dalam memerangi berbagai bentuk ketidakadilan. Menyadari bahwa keadilan tidak akan mungkin ditegakkan tanpa terlebih dahulu membebaskan bangsa ini dari belenggu kekuasaan asing maka perjuangan untuk memerangi ketidakadilan pun harus diawali dengan membebaskan bangsa ini dari belenggu penetrasi asing. Perjuangan tanpa kenal lelah dari para elit pergerakan nasional ini pada akhirnya membuahkan hasil saat Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia.

Pernyataan kemerdekaan ini di samping menjadi momen penting yang mengawali lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu kekuasaan asing juga sekaligus menjadi awal dibukanya lembaran baru penegakan keadilan di Indonesia. Bila sebelum pernyataan kemerdekaan dibacakan penegakan keadilan lebih terfokus pada perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu kekuasaan asing maka sesudahnya lebih ditujukan untuk merealisasikan amanah yang terkandung dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Tegasnya, setelah kemerdekaan dikumandangkan maka perjuangan penegakan keadilan di Indonesia lebih merupakan perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dimaksud adalah keadilan sosial yang dilandasi oleh ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Melihat realitas yang terjadi, setelah lebih dari setengah abad merdeka, perjuangan bangsa ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dikatakan masih jauh dari apa yang dicita-citakan. Kebebasan yang diperjuangkan dengan susah payah oleh para kesuma bangsa selama bertahun-tahun ternyata belum diikuti oleh tegaknya pilar-pilar keadilan. Di alam kemerdekaan, perjuangan untuk meraih keadilan bukan lagi berhadapan dengan kekuasaan asing tetapi lebih banyak berhadapan dengan bangsa sendiri, yakni mereka yang memegang kekuasaan

secara otoriter. Selama era kemerdekaan ini, upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tampaknya belum pernah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari para penyelenggara negara. Keadilan sosial baru sebatas slogan dan cita-cita. Akibatnya, berbagai bentuk ketidakpuasan atas penyimpangan terhadap prinsip-prinsip keadilan, baik yang tersembunyi maupun kasat mata, halus maupun kasar, selalu mewarnai tahun demi tahun perjalanan republik ini. Berbagai bentuk ketidakpuasan atas lemahnya penegakan keadilan ini tidak hanya tampak di lapangan ekonomi, tetapi juga di politik, sosial, maupun budaya. Ketidakpuasan juga tidak hanya berlangsung pada tingkat nasional tetapi juga lokal, tidak hanya terjadi antar tetapi juga intra-etnis, dan tidak hanya terjadi antar-umat beragama tetapi juga di dalam umat seagama.

Gerakan-gerakan perlawanan bersenjata yang terjadi di berbagai daerah pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, seperti PRRI dan Permesta merupakan contoh nyata dari ketidakpuasan terhadap praktek-praktek penyelenggara negara yang tidak menghiraukan penegakan keadilan (lihat Poesponegoro & Notosusanto, 1984:272-281). Ketidakseimbangan pembagian “kue” pembangunan antara pusat dan daerah, kesenjangan perkembangan pembangunan antara Jawa dan luar-Jawa, menjadi faktor-faktor penyebab penting timbulnya gerakan-gerakan perlawanan itu. Berbagai konflik vertikal dan horisontal yang terjadi di tengah masyarakat pada era tersebut juga merupakan manifestasi atas ketidakpuasan terhadap lemahnya penegakan keadilan. Di antara kebanyakan konflik horisontal yang terjadi, ketidakadilan secara ekonomi dan sosial dapat dikatakan menjadi faktor penyebab paling dominan.

Situasi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada saat bangsa ini berada di bawah rezim Soeharto. Pertumbuhan pesat di bidang ekonomi ternyata tidak diikuti oleh adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap upaya penegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rezim Orde Baru terbukti hanya menyuburkan kelompok masyarakat tertentu saja, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok yang beruntung dengan kelompok yang kurang beruntung atau tidak beruntung bukannya berkurang tetapi justru berkembang semakin tajam. Di bidang hukum, penyimpangan atas prinsip-prinsip keadilan tampak lebih jelas lagi. “Mata pedang” hukum baru benar-benar tampak tajam ketika berhadapan dengan rakyat kebanyakan atau mereka yang tidak beruntung. Sebaliknya, ketika berhadapan dengan para pemegang kekuasaan atau dengan kelompok yang beruntung “mata pedang” hukum akan terlihat sangat tumpul, untuk tidak mengatakan, menjadi tidak berfungsi sama sekali. Di bidang politik, penyimpangan atas prinsip-prinsip keadilan juga tidak jauh berbeda dengan bidang hukum. Kebebasan berbicara, berkumpul dan berpendapat, serta dari rasa takut, benar-benar sangat dibatasi dan sulit untuk

diwujudkan. Sikap kritis dinilai sebagai perilaku subversif, dan penafsiran atas ideologi Pancasila menjadi hak prerogatif presiden. Praktek-praktek ketidakadilan di bidang ekonomi, hukum, dan politik ini pada akhirnya tampil menjadi faktor penyebab paling dominan dari berbagai konflik yang terjadi di era Orde Baru, termasuk atas terjadinya krisis politik besar yang pada akhirnya menumbangkan rezim Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 (lihat Dienaputra, *et al*, 2000).

Era reformasi yang awalnya diharapkan mampu memberi stimulus yang lebih kuat bagi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sampai sejauh ini belum memperlihatkan tanda-tanda keberpihakan yang menggembirakan bagi upaya penegakan keadilan. Reformasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan darah dan bahkan nyawa ternyata hingga lebih dari lima tahun perjalanannya masih tetap lebih banyak didominasi oleh pesta pora para elit politik negeri dalam memperjuangkan kepentingan dan memperluas kekuasaan bagi kelompok. Reformasi yang diharapkan mampu mengubah peta buram keadilan sosial di era Orde Baru dan sebelumnya ternyata belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Akibatnya, tidak mengherankan bila berbagai ketidakpuasan atas lemahnya penegakan keadilan ini tetap terjadi di era reformasi. Bahkan, yang lebih menyedihkan manifestasi ketidakpuasan atas lemahnya penegakan keadilan di era reformasi ini tampak lebih subur dibanding era sebelumnya. Tengoklah kerusuhan Sambas di Kalimantan, konflik-konflik di Maluku, Poso, Aceh, dan Papua. Bahkan, berbagai ledakan bom di beberapa tempat, dari mulai yang berskala kecil hingga berskala besar, seperti bom Bali dan bom Marriot, sesungguhnya juga memperlihatkan adanya pesan tentang ketidakpuasan atas penyimpangan terhadap prinsip-prinsip keadilan yang semakin meluas, baik pada tataran nasional terlebih internasional. Kesimpulannya, sebagaimana sebelum reformasi, di era reformasi pun para penyelenggara negara ternyata masih melakukan apa yang dinamakan *state violence* (negara melakukan suatu tindakan yang sebenarnya terlarang baginya), terutama di bidang politik dan hukum serta *state denial* (negara mengingkari atau tidak mengerjakan apa yang diwajibkan kepadanya), terutama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

3. Penegakan Keadilan

Kapitalisme dan sosialisme memandang kebebasan dan keadilan sosial dalam perspektif yang berbeda. Kapitalisme menjunjung tinggi kebebasan tetapi kurang memperhatikan masalah keadilan sosial. Sebaliknya, sosialisme lebih menekankan pentingnya keadilan sosial tetapi kurang memberi ruang pada kebebasan. Bila seandainya diharuskan memilih di antara keduanya, tentu tidak ada satupun yang layak untuk dipilih. Tegasnya, keadilan sosial dan kebebasan harus diselenggarakan seiring dan sejalan.

Dalam kaitan itulah, jika seandainya keadilan ingin ditegakkan di bumi Indonesia hendaklah dilakukan dengan tidak mengorbankan nilai-nilai kebebasan. Demikian pula sebaliknya, bila nilai-nilai kebebasan hendak diusung ke permukaan hendaklah dilakukan dengan tetap menempatkan keadilan sosial sebagai prioritas yang perlu diselesaikan.

Berpijak pada catatan perjalanan sejarah bangsa ini dalam melaksanakan amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terlihat bahwa penegakan keadilan sosial di Indonesia belum pernah memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh. Penegakan keadilan sosial di Indonesia cenderung terpinggirkan atau hanya menjadi salah satu bagian dari suatu program pembangunan. Tegasnya, masalah penegakan keadilan belum pernah menjadi *password* bagi program-program pembangunan lainnya. Padahal, tegaknya keadilan sosial akan menjadi pertanda terwujudnya kesejahteraan sosial. Terwujudnya kesejahteraan sosial berarti pula menjadi pertanda terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi. Pepatah Timur mengatakan, “tak ada negara tanpa penguasa, tak ada penguasa tanpa uang, tak ada uang tanpa kesejahteraan, dan tak ada kesejahteraan tanpa keadilan”.

Era reformasi yang membuka keran kebebasan secara luas sebenarnya dapat dijadikan momentum penting bagi upaya penegakan keadilan, sekaligus mengubah peta keadilan sosial yang demikian buram. Sebelum semua terlambat, saatnya kini memberikan perhatian yang sungguh-sungguh bagi upaya penegakan keadilan. Langkah penegakan keadilan harus diarahkan pada upaya pencapaian pemerataan pembangunan di berbagai bidang, dengan memberikan prioritas perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan ini juga harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan antara pusat dan daerah serta antara Jawa dan luar-Jawa. Di luar itu, penegakan keadilan juga harus mampu mengikis habis penyimpangan-penyimpangan atas prinsip keadilan di bidang hukum dan politik.

Agar penegakan keadilan dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan tidak hanya sebatas di atas kertas maka penanganan penegakan keadilan harus memiliki program dan rencana yang jelas serta didukung oleh berbagai perangkat yang dapat mengikat semua pihak. Perangkat-perangkat tersebut di antaranya adalah berupa produk perundang-undangan atau peraturan-peraturan pemerintah, serta yang tidak kalah penting adalah institusi-institusi penyelenggara dan pemantau keadilan. Melihat realitas yang tengah terjadi, program-program penegakan keadilan sosial ini tidak hanya diarahkan pada upaya perbaikan peta keadilan sosial tetapi yang tidak kalah penting program-program penegakan keadilan tersebut harus mampu memperkuat kembali integrasi, sekaligus meminimalisasi kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa.

Dalam kaitan itulah, program-program penegakan keadilan harus memiliki beberapa dimensi sekaligus, yakni dimensi kerakyatan dan kebangsaan atau keindonesiaan. Program-program keadilan sosial yang menekankan dimensi kerakyatan hendaknya diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan serta perbaikan peta kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok yang beruntung dengan kelompok yang kurang beruntung atau tidak beruntung. Bila menggunakan teori keadilan yang dikembangkan John Rawls, maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan ini haruslah tetap memperhatikan dua prinsip keadilan (lihat Rawls, 1971). Pertama, program itu harus memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, ia harus mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Beberapa program penegakan keadilan berdimensi kerakyatan yang harus segera mendapat prioritas perhatian adalah program penyediaan lapangan pekerjaan, pengaturan sistem penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pengadaan sistem jaminan sosial (*social security system*) yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi setiap orang, terutama mereka yang kurang beruntung, *from the cradle to the grave*.

Program-program keadilan sosial yang berdimensi keindonesiaan harus pula diarahkan pada upaya terciptanya pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah, Jawa dan luar-Jawa, kehidupan yang harmonis antar-suku dan antar-umat beragama, serta perlakuan kesempatan yang adil dan hak yang sama di bidang hukum dan politik. Adapun program penegakan keadilan berdimensi keindonesiaan yang perlu mendapat prioritas untuk segera diselenggarakan adalah pengaturan kembali secara adil pembagian keuangan pusat dan daerah, percepatan pembangunan untuk daerah-daerah tertinggal di Jawa maupun luar-Jawa, pengembangan dan penguatan harmonisasi dan toleransi hubungan antar-suku dan antar-umat beragama, pembangunan karakter keindonesiaan yang didasarkan atas semangat *kebhineka tunggal ika-an*, pengembangan dan penguatan berbagai produk perundang-undangan yang mampu melahirkan perlakuan yang adil dan hak yang sama bagi setiap orang, dan pembangunan sistem politik Indonesia yang mampu memberi kesempatan yang adil serta hak yang sama bagi setiap orang untuk terlibat dalam setiap proses politik.

Kesemua program penegakan keadilan di atas pada akhirnya memerlukan “payung pelindung” hukum yang kuat. “Payung” pertama yang paling penting adalah berupa produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah. Sejalan dengan itu maka produk perundang-

undangan dan peraturan-peraturan pemerintah dimaksud harus mampu memberikan jaminan bagi terselenggaranya prosedur dan kesempatan yang adil bagi setiap orang dalam setiap program penegakan keadilan. Oleh karenanya, bisa jadi produk-produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersebut ada yang bersifat umum, dalam arti mampu memayungi secara menyeluruh semua program penegakan keadilan, dan ada pula yang bersifat khusus karena kekhasan program penegakan keadilan yang dijalankan. Lebih dari itu, produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersebut harus lahir dari prosedur yang adil serta mampu memberi perlakuan yang adil dan hak yang sama bagi setiap orang. Pembuatan produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mampu memayungi upaya penegakan keadilan, terutama program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan pada dasarnya telah didukung oleh pasal 34 UUD 1945 pasca amandemen. Dalam pasal 34 UUD 1945 pasca amandemen disebutkan: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Keberadaan pasal 34 UUD 1945 yang jelas-jelas berpihak pada program penegakan keadilan sosial berdimensi kerakyatan menjadi modal awal yang sangat penting dalam melahirkan produk perundang-undangan di bawahnya. Keberadaan pasal ini sekaligus pula memperlihatkan adanya *political will* negara dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini, tinggal bagaimana pesan yang tercantum dalam konstitusi ini harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tanpa upaya sungguh-sungguh bisa jadi pasal 34 itu hanya akan berhenti sampai tahapan pernyataan saja dan tidak akan pernah bisa diwujudkan dalam kehidupan yang sesungguhnya.

Selanjutnya, agar semua program penegakan keadilan dapat berjalan dengan baik, perlu pula dibangun institusi-institusi yang khusus bertugas sebagai penyelenggara sekaligus pemantau program-program penegakan keadilan. Dengan demikian, institusi tersebut tidak hanya diarahkan pada upaya penyelenggaraan program penegakan keadilan semata tetapi yang tidak kalah penting, juga sebagai pemantau pelaksanaan program penegakan keadilan. Institusi yang berfungsi sebagai lembaga preventif bagi kemungkinan timbulnya setiap bentuk penyimpangan atas prinsip-prinsip keadilan ini haruslah berupa institusi yang independen, memiliki wewenang yang luas, dan langsung berada di bawah presiden pada tingkat pusat serta gubernur dan bupati atau walikota pada tingkat daerah. Bahkan, jika memungkinkan, institusi penyelenggara dan pemantau penegakan keadilan

ini dibuat setingkat dengan posisi lembaga tinggi negara. Para anggota institusi ini haruslah mereka yang memiliki integritas tinggi serta memiliki kepedulian terhadap upaya penegakan keadilan, serta terbebas dari kepentingan politik kelompok ataupun partai politik tertentu. Hal ini diperlukan tidak lain agar institusi ini dapat terhindar dari pertikaian-pertikaian politik yang tidak perlu serta tidak akan dijadikan sebagai alat kekuasaan atau alat propaganda politik suatu kelompok ataupun partai politik. Tegasnya, institusi ini haruslah dibangun dengan hanya berlandaskan pada satu tujuan, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara dan pemantau penegakan keadilan ini, institusi ini tentunya harus memiliki parameter-parameter untuk mengetahui sejauh mana perkembangan program-program penegakan keadilan yang tengah dilakukan berjalan sebagaimana direncanakan. Ketika upaya-upaya penegakan keadilan memperlihatkan adanya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan, maka institusi ini harus secepatnya melakukan perbaikan-perbaikan dan menatanya kembali agar sejalan dengan program yang tengah dilaksanakan. Selanjutnya, apabila penyimpangan atas prinsip-prinsip keadilan tetap terjadi maka institusi ini harus diberi kewenangan untuk menindak para pelanggar atau setidaknya merekomendasikan kepada aparat penegak hukum agar diambil tindakan tegas sesuai konstitusi yang berlaku. Dengan cara pemantauan aktif seperti itu diharapkan setiap upaya penegakan keadilan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Di samping itu, melalui cara pemantauan aktif ini, program-program penegakan keadilan juga dapat terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan dan kesalahan yang tidak perlu.

4. Daftar Pustaka

- Clayton, S. & S. Opatow. 1994. "Green Justice: Conception of Fairness and the Natural World". *Journal of Social Issues*, 50 (3), 1-12.
- Devasia, L. & V.V. Devasia. 1990. *Women in India: Equity, Social Justice and Development*. New Delhi: Indian Social Institute.
- Dienaputra, Reiza D. dkk.. 2000. *Sukses Kepemimpinan Nasional: Studi tentang Peralihan Kekuasaan dari Soeharto ke Habibie*. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Dienaputra, Reiza D. "Penelusuran Kembali Peristiwa G 30 S 1965". *Pikiran Rakyat*, 30 September 2002.
- "Reinterpretasi dan Rekonstruksi Sejarah". *Pikiran Rakyat*, 7 Juni 2003.
- Faturochman. 2002. *Keadilan: Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas Psikologi UGM dengan Pustaka Pelajar.
- Greenberg, J. 1996. *The Quest for Justice*. London: Sage.

- Magnis-Suseno, Franz. 1987. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Martin, S.E. & Jurik N.C. 1996. *Doing Justice Doing Gender*. London: Sage Publications.
- Master, J.C. & W.P. Smith. 1987. *Social Comparison, Social Justice, and Relative Deprivation: Theoretical, Empirical, and Policy Perspectives*. London: Lawrence Erlbaum.
- N. Daniels, N. 1985. *Just Health Care*. Sydney: Cambridge University Press.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rafsanjani, Hashemi. 1994. *Social Justice & Problem of Racial Discrimination*. Teheran: Islamic Propagation Organization.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- . 1993. *Political Liberalism*. New York.
- Russel, Bertrand. 1988. *Power: A New Social Analysis*. Terjemahan oleh Hasan Basari. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ujan, Andre Ata. 2002. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Vermunt, R. & H. Steensma. 1991. *Social Justice in Human Relations*. Volume 1, Societal and Psychological Origin of Justice. New York: Plenum Press.
- Waddell, C. & A.R. Petersen. 1994. *Just Health: Inequity in Illness: Care and Prevention*. Melbourne: Churchill Livingstone.

Tentang Penulis

Reiza D. Dienaputra, lahir 10 April 1964 di Bandung Jawa Barat. Beliau menamatkan studi S1 di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung (1987), dan menyelesaikan S2 di Pogram Studi Ilmu Sejarah Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997). Menjadi staf pengajar di Fakultas Sastra Unpad (1989 – sekarang), beliau pernah menjabat Ketua Jurusan Sejarah FS Unpad (1998-2002, dan kini tercatat sebagai anggota senat fakultas di tempat yang sama periode 2003-2007. Saat ini ia juga merupakan salah satu tenaga ahli pada Kantor Staf Ahli Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

HERITAGE TOURISM DAN PELESTARIAN WARISAN NASIONAL

Marzaini Manday

Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara

Abstract

Heritage found in both urban and rural areas is currently one of the important segments in tourism industry. Many people visit these heritage sites to experience the historical authenticity of the heritage resources that reflects the lifestyle and history of a community. Based on the phenomenal relationship between heritage and tourism, this article aims at introducing *heritage tourism* and how it plays its role in preserving *national heritage* that can be used to help generate opportunities for local communities to gain side income through its development in their localities.

1. Pendahuluan

Heritage tourism yang dulunya juga dikenal sebagai *cultural heritage tourism* pada dasarnya adalah salah satu strategi yang digunakan dalam program pengembangan pariwisata pedesaan (*rural tourism strategy*) yang tujuan utamanya adalah mempromosikan keotentikan historis dan kesinambungan jangka-panjang dari daya tarik wisata warisan (*heritage tourism*) yang terdapat pada suatu daerah tujuan wisata (Brown, t.t.: 5).

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep dasar dari *heritage tourism* mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan waktu dan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat dalam dunia pariwisata sehingga masing-masing pihak cenderung membuat definisi *heritage tourism* yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memperkenalkan *heritage tourism* sebagaimana yang difahami dalam dunia pariwisata saat ini dan bagaimana ia berperan dalam melestarikan warisan nasional (*national heritage*) yang dapat membantu

menciptakan kesempatan kerja untuk mendapatkan *side income* (pendapatan sampingan) bagi para penduduk setempat.

2. Memahami *Heritage Tourism*

Dalam *The American Heritage Dictionary*, kata *heritage* dapat berarti *something passed down from earlier generation*. Kata *something* yang mempresentasikan *heritage* tersebut masih bersifat umum sehingga perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Dalam *Hornby's English Dictionary*, kata *heritage* dapat berarti *that which has been or may be inherited*. Kata *that* yang mempresentasikan *heritage* tersebut juga masih bersifat terlalu umum dan memerlukan penjelasan lebih lanjut. Guna dapat memahami makna yang terkandung dalam kata *heritage* tersebut, kita harus menjelaskan nosi atau pemahaman yang akurat dari kata *heritage* yang disesuaikan dengan disiplin ilmu atau bidang yang sedang dibicarakan.

Jamal (t.t.:1) menyatakan bahwa *the notion of 'heritage' includes natural, cultural and social aspects of heritage* (nosi atau ide atau pemahaman yang terkandung dalam kata warisan tersebut mencakup aspek-aspek natural, kultural, dan sosial dari warisan itu sendiri). Pemahaman ini bermakna bahwa warisan yang kita peroleh (warisi) dari leluhur kita dapat berbentuk sumber daya alam yang di dalam dunia pariwisata Indonesia dikenal sebagai objek wisata, dan berbentuk budaya/tradisi yang merupakan hasil buatan manusia itu sendiri yang dalam dunia pariwisata Indonesia dikenal sebagai atraksi wisata.

Dengan bergabungnya kata *heritage* dengan kata *tourism* yang kemudian membentuk suatu kata baru—*heritage tourism*, diperlukan suatu definisi yang tujuannya untuk menciptakan suatu kesepakatan dalam memahami apa yang dimaksud dengan *heritage tourism* tersebut.

3. Definisi *Heritage Tourism*

Pada tahun 1997, The National Heritage Tourism Research yang sebahagian kegiatannya dikoordinasikan oleh The Ohio Division of Travel and Tourism (Ohio Tourism, t.t.:1) mengembangkan satu definisi *heritage tourism* sebagai berikut:

Heritage tourism is traveling to experience the places and activities that authentically represent the stories and people of the past.

Kemudian pada tahun 1999, The National Trust for Historic Preservation mengumumkan niatnya untuk menggunakan definisi yang dikembangkan oleh The National Heritage Tourism Research Forum di dalam semua literatur yang mereka terbitkan (Ohio Tourism, t.t.:1) dengan

sedikit modifikasi (Hargrove, 2002) sehingga definisi tersebut berbunyi sebagai berikut:

Heritage tourism is traveling to experience the places, artifacts and activities that authentically represent the stories and people of the past and present.

Selanjutnya, dalam mendesain *visitor survey* untuk suatu kajian komprehensif dalam bidang heritage tourism yang dilaksanakan oleh The Department of Conservation and Natural Resources bekerjasama dengan The Department of Community and Economic Development, The Pennsylvania Historical and Museum Commission, Preservation Pennsylvania, dan The Federation of Museums and Historical Organizations pada tahun 1999 di Pennsylvania, Amerika Serikat, digunakan definisi *heritage tourism* sebagai berikut:

Heritage tourism is a leisure trip with the primary purpose of visiting historic, cultural, natural, recreational and scenic attractions to learn more about the past in an enjoyable way. (Pennsylvania State Government, t.t.).

Terlepas dari terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam definisi heritage tourism yang ada sekarang ini, Utah Heritage Tourism (t.t.: 1), menyatakan bahwa definisi heritage tourism yang digunakan ini pada dasarnya mencakup dua sudut pandang yang berbeda—sudut pandang para konsumen dan pengguna (*customers and users*) *heritage tourism* itu yang dikenal dengan istilah *demand-side* dan sudut pandang dari sumberdaya warisan itu sendiri (*the heritage resources*) yang dikenal dengan istilah *supply-side*. Dari *demand-sidenya*, *heritage tourism* dipandang sebagai suatu aktivitas dalam bentuk suatu perjalanan wisata untuk menikmati keunikan suatu objek/atraksi wisata yang secara historis diwarisi dari generasi yang terdahulu. Dari *supply-sidenya*, *heritage tourism* dipandang sebagai suatu bentuk wisata (*a form of tourism*) yang orientasi pelaksanaannya difokuskan pada perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya warisan (*heritage resources*) dengan fakta historis yang otentik sebagai suatu unsur sumberdaya wisata (*tourism resources*).

4. Keuntungan Yang Diperoleh Dari *Heritage Tourism*

Mengingat masih banyaknya orang yang senang mengunjungi tempat-tempat yang memiliki peninggalan-peninggalan bersejarah untuk menikmati ataupun mempelajari sesuatu yang ada hubungannya dengan gaya hidup dan sejarah masyarakat masa lalu, heritage tourism sangat berperan dalam proses

perlindungan dan pelestarian warisan nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa.

Melalui program heritage tourism semua sumber daya warisan (heritage resources) yang mencakup keindahan dan keunikan alam yang ada, arsitektur/bangunan kuno dan tata kota lama, festival-festival yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan atau tradisi, dan tempat-tempat bersejarah, dilindungi, dilestarikan, kemudian dikembangkan sedemikian rupa dan dijadikan sebagai salah satu unsur sumberdaya wisata (tourism resources) untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dalam bentuk pemasukan devisa bagi negara maupun kesempatan kerja bagi anak bangsa yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup dan timbulnya kebanggaan akan warisan bangsa di tengah-tengah masyarakat.

Namun keuntungan yang dapat diperoleh dari heritage tourism ini bukanlah tanpa tantangan. Tantangan yang paling besar dan harus diantisipasi adalah apa yang harus kita lakukan untuk dapat menjamin bahwa program heritage tourism yang sedang kita kembangkan ini tidak merusak sumberdaya warisan (heritage resources) yang kita gunakan untuk menarik minat wisatawan untuk mengunjungi situs warisan (heritage site) tersebut. Untuk mengantisipasi tantangan ini, diperlukan suatu perencanaan yang matang agar proses pengembangan heritage tourism dapat berjalan dengan baik sehingga hasil akhir yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan.

5. Proses Pengembangan Program Heritage Tourism

Sebelum memulai proses pengembangan program heritage tourism, sebaiknya kita mengetahui dan mengenal prinsip-prinsip yang dimiliki oleh heritage tourism tersebut. Dalam konteks Amerika Serikat, The National Trust telah mengembangkan lima prinsip yang digunakan sebagai langkah dasar yang harus dipertimbangkan dalam menciptakan suatu program heritage tourism yang berkesinambungan yaitu membentuk suatu kerjasama/kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, menemukan adanya kesesuaian antara suatu komunitas atau daerah dengan program pariwisata yang dikembangkan, membuat situs dan program-program heritage tourism menjadi hidup, fokus pada keotentikan dan kualitas sumberdaya/atraksi yang ditawarkan, dan punya komitmen untuk melestarikan dan melindungi sumberdaya warisan (heritage resources) yang dimiliki (Utah Heritage Tourism, t.t.:2).

Gambar 4.1 Istana Maimoon di Kota Medan sebagai Objek Pariwisata Warisan (*Heritage Tourism*)



sumberdaya wisata warisan (heritage tourism resources) yang baru, sehingga timbullah suatu pembohongan historis karena sumberdaya wisata warisan yang kita ciptakan tersebut hanya merupakan suatu hasil rekayasa yang dipaksakan. Oleh karena itu, kita disarankan untuk tidak menciptakan suatu sumberdaya warisan/atraksi yang baru karena sumberdaya yang baru itu tidak memiliki unsur otentik dan historis. Prinsip dasar yang paling penting untuk diingat adalah bahwa heritage tourism hanya menggunakan aset-aset warisan yang memang exist (wujud) saja (Hargrove, 2002) . Dan prinsip dasar inilah yang mengharuskan kita untuk melindungi dan melestarikan dan menjaga (maintain) kelangsungan hidup sumberdaya warisan (heritage resources) yang kita miliki itu.

Mengingat tujuan pengembangan heritage tourism adalah untuk memanfaatkannya sebagai salah satu unsur industri pariwisata (tourism industry) yang berkualitas, ada empat langkah yang bisa diterapkan (Utah Heritage Tourism, t.t.: 2). Langkah pertama adalah menginventarisasi dan mengases sumberdaya warisan yang kita miliki untuk menentukan sumberdaya warisan yang mana yang sudah bisa kita manfaatkan sebagai unsur industri pariwisata, kemudian melindunginya, kemudian kita membuat perencanaan interpretif, dan menyusun strategi pemeliharaannya.

Langkah kedua adalah mengorganisasi sumberdaya warisan (heritage resources) tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Cara-cara yang dapat digunakan untuk agar masyarakat dapat memahami dan belajar dari heritage tourism tersebut adalah dengan menciptakan dan mengimplementasikan mekanisme-mekanisme interaktif seperti study tour,

pusat informasi, perayaan-perayaan, menyebarkan audio/video tapes, dan penyuluhan dan kuliah umum.

Langkah ketiga adalah menyusun atraksi/aktivitas wisata yang bersifat interaktif yang dapat memberikan pengalaman yang memuaskan—yaitu kepuasan yang bersifat emosional, fisik, intelektual, atau inspirasional—bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke situs heritage tourism tersebut. Kepuasan pengunjung (*visitor's satisfaction*) ini penting sekali untuk dipertimbangkan karena rasa puas ini merupakan respons, tanggapan, atau kesan yang diberikan oleh para pengunjung terhadap sumberdaya warisan yang mereka kunjungi dan kesan ini merupakan suatu unsur yang paling berperan dalam proses kelangsungan hidup jangka panjang sumberdaya warisan tersebut.

Langkah keempat adalah menjamin bahwa *benefits* (keuntungan) yang diperoleh dari heritage tourism ini harus merata dinikmati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam proses kesinambungan program heritage tourism tersebut, yaitu, para wisatawan yang merupakan konsumen dari sumberdaya warisan yang ditawarkan sebagai produk wisata dan masyarakat yang menjadi *hosts* (tuan rumah) yang menawarkan sumberdaya warisan tersebut yang sering sekali merupakan pihak yang bertanggungjawab atas pemeliharaan dan perlindungan sumberdaya warisan tersebut.

6. Kesimpulan

Melalui heritage tourism warisan nasional (*national heritage*) yang terdapat di daerah pedesaan dan daerah perkotaan adalah aset yang berharga bagi suatu bangsa atau etnis dalam rangka mendapatkan devisa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas industri wisata tersebut.

Untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas program heritage tourism yang dikembangkan tersebut dalam memberikan keuntungan ekonomi (*economic benefits*) bagi negara dan masyarakat, sumberdaya warisan (*heritage resources*) yang dimiliki diinventarisasi dan diases atau dievaluasi terlebih dahulu untuk memilih sumberdaya warisan yang mana saja yang sudah pantas untuk dipasarkan sebagai atraksi wisata dan sumberdaya warisan yang mana yang masih harus direstorasi terlebih dahulu. Kemudian ditetapkan strategi perlindungan, pelestarian, dan pemeliharaannya (*maintenance*). Lalu ditetapkan mekanisme interaktifnya agar masyarakat luas dapat mengetahui, memahami, dan memanfaatkan sumberdaya warisan tersebut sebagai suatu aktivitas wisata disamping sebagai sarana untuk mengapresiasi dan mempelajari gaya hidup dan sejarah masyarakat yang hidup di masa yang lalu. Setelah itu tetapkan strategi penampilan mekanisme interaktif tersebut agar dapat memberikan kepuasan, yang mungkin bersifat emosional, fisik, intelektual dan inspirasional,

kepada para wisatawan yang berkunjung ke situs warisan nasional tersebut. Kemudian beri jaminan bahwa program heritage tourism yang dikembangkan ini memberikan keuntungan ekonomi kepada semua pihak yang berkolaborasi/bekerjasama dalam pelaksanaan program tersebut.

Akhirnya harus diingat bahwa sumberdaya warisan yang digunakan sebagai produk heritage tourism adalah sumberdaya warisan yang memang exist (wujud), bukan hasil rekayasa dari suatu sumberdaya warisan yang sudah lama hilang, agar produk heritage tourism yang kita jual kepada para wisatawan tersebut tetap memiliki nilai historis yang otentik dan original.

7. Daftar Pustaka

- Brown, Dennis M. (t.t.) *Rural Tourism: An Annotated Bibliography*, http://www.nal.usda.gov/ric/ricpubs/rural_tourism.html
- Hargrove, Cheryl M. (2002) *Heritage Tourism* dalam CRM No.1-2002, hal. 10-11, <http://www.crm.cr.nps.gov/archive/25-01/25-01-4.pdf-253k>
- Jamal, Tazim B. (t.t.) *Culture and Heritage in Tourism*, Course Syllabus, Department of Recreation, Park and Tourism Sciences, Texas A&M University, <http://www.rpts.tamu.edu/Courses/646/03c/Syllabus-646-03c.html>
- Ohio Tourism (t.t.) *What is Heritage Tourism?* <http://www.ohiotourism.com/industry/heritage/what/>
- Pennsylvania State Government (t.t. dan tanpa situs) *What is heritage tourism and why is it important for Pennsylvania?*
- Utah Heritage Tourism (tanpa tahun) *Utah Heritage Tourism Toolkit – The Big Picture* <http://history.utah.gov/httoolkit/gl.html>

Tentang Penulis

Marzaini Manday adalah staf pengajar yang mengasuh mata kuliah Ilmu Kepariwisata dan Bahasa Inggris pada Program Studi D3 Pariwisata, Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara. Memperoleh gelar Drs. dalam bidang English Literature dari Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara, pada bulan Nopember 1981. Memperoleh predikat Certified Teacher of English as a Second Language (CTESL) dari Save the Children Federation and the Experiment in International Living and UNCHR pada bulan

September 1986. Memperoleh gelar Master of Social Planning and Development (MSPD) dari the University of Queensland, Brisbane, Australia pada bulan September 1993.

HERMENEUTIK: SEBUAH METODE PENELITIAN SASTRA

Ikhwanuddin Nasution

Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara

Abstract

Hermeneutics is a method to understand a work basically and deeply by using the interpretation principle. This method demanded participation, carefulness, and neatness of interpreter toward the object so that can be found the intense meaning. One of the works which need interpretation like that is studying literature. This method can be used in studying literature such as an analysis of semiotic, structuralism (particularly structuralism-genetic), and sociology of literature.

1. Pendahuluan

Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan (Sumaryono, 1993:23; Wuisman, 1996:52). Menafsirkan atau interpretasi maksudnya mengungkapkan makna sesuatu secara mendalam atau dengan kata lain, mengungkapkan apa yang ada di balik sesuatu. Pengungkapan makna tersebut akan berkaitan dengan lingkungan budaya yang ditafsirkan. Misalnya sesuatu yang ada hubungannya dengan budaya Minangkabau, maka sesuatu itu akan lebih baik jika ditafsirkan dengan budaya Minangkabau.

Ada dua konsep dasar hermeneutik ini yakni penghayatan (*erlebnis*) dan pemahaman (*verstehen*). Pada saat proses penafsiran kedua konsep ini sangat berperan dan dalam prakteknya keduanya saling berkaitan. Pemahaman tidak akan terjadi tanpa penghayatan dan penghayatan atas sesuatu juga didasarkan pada pemahaman. Hal ini terus terjadi secara bolak-balik sampai menimbulkan penafsiran terhadap sesuatu.

Hermeneutik menggunakan logika dialektik karena konsep reduksi tidak lagi relevan. Gerak berpikir tidak lagi berjalan secara *unilinear*, tetapi lebih mirip “tarik tambang,” saling pengandaian dan salingantisipasi. Logika dialektik tidak bergerak dari khusus ke umum atau sebaliknya, melainkan berpikir secara bolak-balik antara yang khusus dan umum, antara bagian dan keseluruhan. Sifat holistiknya terletak dalam kenyataan bahwa keseluruhan selalu diandaikan (Kleden, 1986:185).

Ketika membaca bagian pertama dari novel *Ronggeng Dukuh Paruk*, maka bagian pertama itu baru jelas kalau dapat diantisipasi apa kiranya isi seluruh novel tersebut. Selanjutnya, isi seluruh novel itu akan menjadi lebih jelas jika sudah ada pengertian yang lebih luas tentang tradisi ronggeng Jawa pada umumnya dan tradisi ronggeng di Banyumas (Jawa Tengah) khususnya. Jadi, arti suatu bagian ditentukan oleh besarnya keseluruhan yang dikuasai. Inilah yang menyebabkan mengapa dalam membaca sebuah karya sastra yang sama diperoleh penafsiran yang berbeda antara pembaca yang satu dengan pembaca lainnya. Hal ini terjadi karena keseluruhan yang berupa *back ground information* yang dikuasai setiap pembaca berbeda-beda. Kemudian, pengertian keseluruhan pun akan bertambah sempurna setelah dipahami bagian demi bagian secara terperinci. Di samping itu, pembaca juga perlu membaca dua novel berikutnya, yakni *Lintang Kemukus Dini Hari* dan *Jantera Bianglala*, karena kedua novel itu merupakan sambungan dari *Ronggeng Dukuh Paruk*. Jadi, pengertian tentang keseluruhan novel *Ronggeng Dukuh Paruk* akan menjadi lebih jelas jika dipahami tiap bagian dengan cermat. Selanjutnya, pemahaman tentang tradisi ronggeng di Banyumas (Jawa Tengah) akan menambah pemahaman makna dari novel tersebut.

Schleiermacher (Ankersmit, 1987:161; Sumaryono, 1993:40) mengatakan bahwa bagian-bagian hendaknya ditempatkan dalam keseluruhan teks dan keseluruhan teks hendaknya dimengerti dengan bertitik tolak pada bagian-bagian. Pemahaman akan diperoleh dengan melihat bagaimana semua bagian berhubungan satu sama lainnya. Proses ini seakan-akan kontradiksi, akan tetapi hal ini merupakan suatu kenyataan yang harus diterima. Heidegger dan Gadamer (Bertens, 1981:226; Teeuw, 1984:123) menyebutkan proses ini sebagai lingkaran hermeneutik, yang dalam prakteknya dipecahkan secara dialektik. Sementara itu, Dilthey (Newton, 1994:57) berpendapat bahwa masalah itu dapat dipecahkan dengan cara memberi masukan yang terus-menerus antara bagian dan keseluruhan.

2. Hermeneutik sebagai Metode

Hermeneutik adalah metode yang lebih menekankan keterlibatan seorang penafsir terhadap objek yang diteliti dan lebih dipentingkan daripada mengambil jarak dari objeknya. Penghayatan, pemahaman, dan penafsiran terhadap objek merupakan ciri khas metode ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tingkat objektivitas yang sebaik-baiknya.

Seorang penafsir tidak boleh bersikap pasif, ia harus merekonstruksikan makna yang terdapat dalam sebuah karya dan berusaha menginterpretasikan pesan dan tujuan dari si pengarang. Penafsir sebaiknya melihat aspek dalam dan luar dari karya itu dengan tujuan agar sampai pada makna yang terkandung di dalamnya. Makna bukanlah sekadar isyarat yang dibawa oleh

suatu bahasa, sebab bahasa sekaligus dapat menunjukkan dan menyembunyikan makna tersebut. Palmer (1982:43) mengatakan bahwa hermeneutik merupakan proses menelaah isi dan maksud yang mengejawantah dari sebuah karya sampai kepada maknanya yang terdalam dan laten.

Tujuan pemahaman, secara hermeneutik bukanlah semata-mata menyusun kembali maksud dari si pengarang dan juga bukan hanya memahami kausalitasnya saja, tetapi yang terpenting adalah memahami makna. Makna-makna itu dapat dikaitkan dengan tindakan, pranata, produk-produk kultural, jaringan-jaringan sosial, dan kegiatan ritual yang terdapat dalam sebuah karya sastra.

Menurut Ahimsa-Putra (2000:403) “menafsir berarti mengungkapkan apa yang dianggap sebagai hal-hal yang diacu oleh sebuah teks. Hal-hal yang diacu inilah yang dipandang sebagai makna teks yang dianalisis.” Sementara itu, Ricoeur (1996:33) mengatakan bahwa hak pembaca sebagai penafsir dan hak teks sebagai yang ditafsir harus bergabung dalam suatu perjuangan yang penting untuk menghasilkan keseluruhan dinamika interpretasi.

Dalam ruang lingkup kesusastraan, kebutuhan tentang hermeneutik sangatlah ditekankan, karena tanpa interpretasi atau penafsiran, pembaca mungkin tidak akan mengerti atau memahami apa sebenarnya yang ingin diungkapkan atau disampaikan oleh pengarang. Heidegger dan Gadamer (Bertens, 1981:227) berpendapat bahwa wilayah kesenian (kesusastraan) termasuk wilayah hermeneutik. Mereka sependapat bahwa pengalaman estetis dapat menyingkapkan kebenaran bagi kehidupan, tentunya dengan interpretasi yang luas.

Gadamer (Selden, 1991:122) mengemukakan bahwa semua tafsiran kesusastraan lama timbul dari sebuah dialog antara masa lampau dengan masa sekarang. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa usaha untuk memahami sebuah karya akan tergantung pada pertanyaan yang ditimbulkan oleh lingkungan kebudayaan terhadap karya itu sendiri. Selden (1991:123) sendiri menegaskan bahwa metode hermeneutik tampaknya menjadi bagian yang secara bertahap menampilkan totalitas makna yang membentuk kesatuan karya.

Habermas (Bertens, 1981:220; Sumaryono, 1993:87) berusaha menciptakan suatu konsepsi tentang ilmu pengetahuan yang terarah kepada praksis dan memberikan tempat penting bagi logika, yang disebutnya dengan “logika interaksi” atau “logika hermeneutik.” Pada hakikatnya, model interaksi yang dimaksudkannya adalah kepentingan melekat bukan pada penguasaan, tetapi saling pengertian atau komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan melalui tindakan atau kegiatan. Pada saat seseorang melakukan interpretasi, orang itu harus berada pada tingkatan tindakan komunikasi,

sehingga analisisnya akan bersifat dialogal atau dialektik. Dengan demikian, inti dari model ini adalah dialog yang berlangsung berdasarkan pengakuan satu sama lainnya.

Dalam perspektif hermeneutik ini, seorang peneliti dapat menafsirkan suatu peristiwa kesenian (karya sastra) dengan terlebih dahulu memperhatikan pandangan-pandangan si seniman (pengarang) atau masyarakat, lingkungan yang digambarkan oleh pengarang, kemudian baru memberikan interpretasi, tetapi bisa juga sebaliknya. Peneliti juga dapat langsung memberi interpretasi berdasarkan kerangka pemikiran atau paradigma yang dipilihnya. Dua cara ini sama-sama sah, namun secara metodologis keduanya dilakukan lewat prosedur yang berbeda, hal ini akan membawa implikasi lebih lanjut pada metode analisisnya. Menurut Ahimsa-putra (2000:405) cara yang pertama biasanya dilakukan dalam kajian simbolik (semiotik), sedangkan cara yang kedua dilakukan dalam kajian strukturalisme.

3. Langkah-Langkah dalam Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data secara hermeneutik dimulai dengan membaca karya sastra tersebut, karena sumber data yang dominan ada pada karya sastra itu. Untuk itu, peneliti semestinya membaca langsung karya tersebut, bukan membaca sinopsis atau fragmennya.

Langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan:

1. Dengan bekal pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan kepekaan yang dimiliki, peneliti membaca sekritis-kritisnya, secermat-cermatnya, dan seteliti-telitinya seluruh sumber data yang ada atau yang telah dikumpulkan. Pembacaan ini dimaksudkan untuk memahami dan memiliki kembali makna dari sumber data. (Dalam hal ini, peneliti setidaknya telah membaca dua kali sumber data).
2. Membaca sumber data secara berkesinambungan dan berulang-ulang sesuai dengan prinsip dialektik sehingga diperoleh pengertian antara bagian dan keseluruhan dari objek yang diteliti.
3. Setelah langkah kedua, peneliti membaca sekali lagi sumber data untuk memberi tanda bagian-bagian yang diangkat menjadi data yang akan dianalisis lebih lanjut.

Dengan langkah-langkah tersebut, dapat diperoleh data penghayatan dan pemahaman arti dan makna tentang karya sastra yang sedang diteliti secara mendalam dan mencukupi.

4. Langkah-Langkah dalam Penganalisisan Data

Dalam analisis data ini, peneliti bergantung pada data penelitian. Dalam hal ini pereduksian, penyajian, dan penyimpulan data pertama-tama

merupakan hasil pembacaan, penghayatan, dan pemahaman peneliti atas sumber data. Hal ini dilakukan demi orisinalitas hasil penelitian. Jika diperlukan dapat dilakukan perbandingan dengan hasil analisis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain.

Analisis data tidak dikerjakan per sumber data, tetapi per butir masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi, analisis data dikerjakan secara utuh-bulat (holistik) dan menyeluruh (komprehensif).

Analisis data dilakukan dengan logika-dialektik yang dikerjakan dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Peneliti membaca untuk menghayati dan memahami secara hermeneutik seluruh data penelitian sebagai realisasi prinsip *erlebnis* dan *verstehen*, kemudian menyeleksi data dan menandainya dengan tanda tertentu.
2. Peneliti mengidentifikasi dan mengklasifikasi seluruh data secara utuh-bulat dan menyeluruh berdasarkan butir masalah, tidak melihat bagian per bagian.
3. Peneliti kembali menafsirkan seluruh data yang teridentifikasi dan terklasifikasi untuk menemukan kepaduan, kesatuan, dan hubungan antardata, sehingga diperoleh pengetahuan secara utuh dan menyeluruh tentang makna dari karya tersebut.

5. Penutup

Metode hermeneutik sangatlah dibutuhkan dalam sebuah penelitian sastra, karena dengan metode ini si peneliti dapat mengungkapkan secara baik makna dari sebuah karya sastra. Metode hermeneutik bukanlah satu-satunya metode dalam penelitian sastra, masih ada metode lain seperti metode analitik dan metode totalitas.

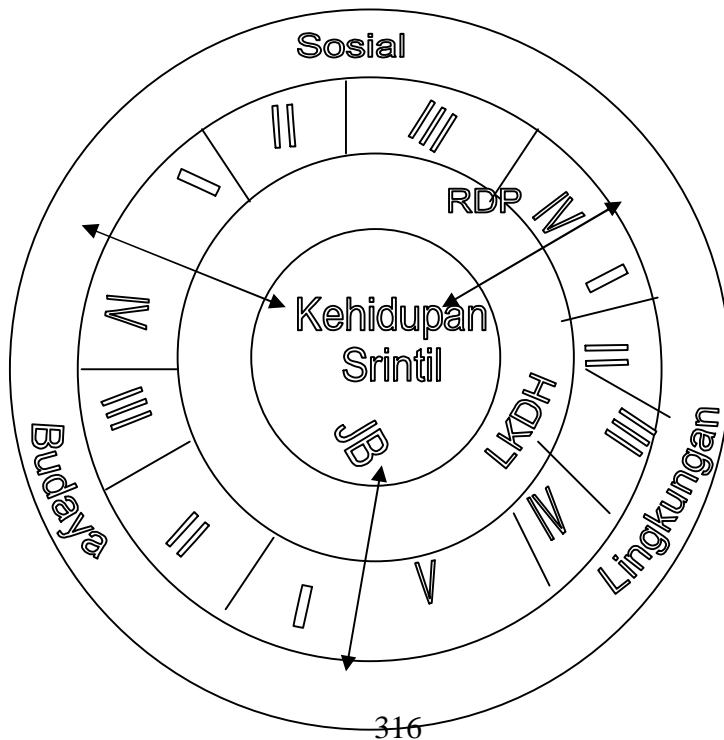
Metode hermeneutik merupakan metode yang dilakukan secara dialektik, artinya si peneliti harus bolak-balik dari bagian ke keseluruhan, dari keseluruhan ke bagian, kemudian dari unsur intrinsik ke ekstrinsik dan dari ekstrinsik ke intrinsik. Kesemuanya itu membentuk lingkaran yang berupa spiral, sehingga menghasilkan inti dari apa yang akan dianalisis.

6. Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, H. Shri. 2000. "Wacana Seni dalam Antropologi Budaya: Tekstual, Kontekstual, dan Post-Modernitis". Dalam Heddy Shri Ahimsa-Putra (ed.). *Ketika Orang Jawa Nyeni*, 399--427. Yogyakarta: Galang Press.
- Ankersmit, F.R. 1987. *Refleksi Tentang Sejarah*, diindonesiakan oleh Dick Hartono. Jakarta: PT Gramedia.
- Bertens, K. 1981. *Filsafat Barat dalam Abad XX*. Jakarta: Gramedia.

- Kleden, Ignas. 1986. "Empirisme dalam Perdebatan Metode: Sebuah Penjelasan Tambahan." Dalam M. Sastrapratedja J. Riberu dan Frans M. Parera (ed.). Menguak Mitos-Mitos Pembangunan, 179--186. Jakarta: PT Gramedia.
- Newton, K.M. 1994. Menafsirkan Teks, diterjemahkan oleh Soelistia, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Palmer, Richard E. 1982. Hermeneutics. Evanston: Northwestern University Press.
- Ricoeur, Paul. 1996. Teori Penafsiran Wacana dan Makna Tambah, diterjemahkan oleh Hani'ah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Selden, Raman. 1991. Panduan Pembaca Teori Sastra Masa Kini, diterjemahkan oleh Dr. Rachmat Djoko Pradopo. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumaryono, E. 1993. Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.
- Teeuw, A. 1984. Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Wuisman, J.J.J.M. 1996. Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Contoh Model Hermeneutik



Keterangan:

RDP = *Ronggeng Dukuh Paruk*

LKDH = *Lintang Kemukus Dini Hari*

JB = *Jantera Bianglala*

I,II,III,IV,V = Bagian-bagian dari novel tersebut

RDP: I Srintil memasukan roh *indang* ronggeng.

II Srintil mengikuti upacara pemandiaan di depan kuburan Ki

Secamengala.

III Srintil mengikuti upacara ‘bukak klambu’.

IV Srintil menjadi ronggeng yang terkenal dan cantik.

LKDH: I Srintil kecewa karena ditinggal Rasmus.

II Srintil tidak mau meronggeng dan melayani laki-laki.

III Srintil kembali meronggeng tetapi tidak mau diatur oleh dukun ronggengnya (Nyai Kertareja).

IV Srintil menjadi *gowok*.

V Srintil ditahan karena dituduh terlibat G 30 S PKI.

JB: I Srintil tidak diketahui di mana ditahan.

II Srintil kembali ke Dukuh Paruk, tidak mau meronggeng lagi apalagi “melayani” laki-laki, bahkan ia dijauhi oleh warga di luar Dukuh Paruk

III Srintil berkenalan dengan Bajus.

IV Srintil menjadi gila karena dikhianati oleh Bajus.

Tentang Penulis

Ikhwanuddin Nasution lahir di Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 25 September 1962, menjadi staf pengajar di Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara, Medan sejak 1989 hingga sekarang. Tahun 1986, menyelesaikan pendidikan Sarjana Sastra di Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara, Medan. Tahun 2000 menyelesaikan Magister Sains (M.Si.) dengan pengkonsentrasian bidang estetika di Program Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Karya ilmiah yang pernah dibuat antara lain; “Citra Ronggeng dalam Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari” Jurnal Seni Budaya Mudra. Bali. 2000., “Tortor Tapanuli Selatan” Jurnal Seni Budaya Mudra. Bali. 2001, “Modernisasi dan Postmodernisasi dalam Sastra Indonesia” jurnal Ilmu Sastra dan Seni Prasasti, Surabaya. 2001.

PERAN ORANG TUA TERHADAP KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA ANAK USIA 4-5 TAHUN

Gustianingsih

Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara

Abstract

In this paper, to analyze about the parent's role to children 4-5 years old speaking of Indonesia language, I used the Sigel and Chomsky theory. In this context, there is 4 strategies. Child utterances used norm repeatedly and permanently. So the phenomenon can be used as and evidence of development of child language competence. *First*, distancing behavior (that is the behaviour of parent to the child language by distancing in temporal, spacial, and psikological. *Second*, the zone of proximal development (that is the place, which meets the concept of child language spontaneous and rich with ideas but disturbness. Parents (especially mother) are leading the child to be constructive in activities and language. Disturbness of child language can be logic language. *Third*, controller of parent-child leadership (that is strategy of discipline's parents to child behavior activities and languages). *Fourth*, attribution dimation models (that is parents always give happiness and motivations to the child's activities and language. The meaning parent in this paper is a "mother," because mother always reveal of child to give birth to the child expresser to the child and family cognitive mediator, comforter, conselor and verbal stimulus to the child and family. By those criterions can be drawn conclusion that distancing behavior is the best to used, because this theory can be drawn competence and development of child language.

1. Pendahuluan

Pengasuhan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya begitu dekat apalagi ketika orang tua berinteraksi dengan anaknya. Sebuah penelitian tentang karakteristik interaksi vokal antara ibu dan anak membuktikan bahwa terdapat hubungan timbal balik atau respons bersama (*mutual responsive*) antara ibu dan anak. Dengan kata lain, mereka saling memberikan respons dalam suatu interaksi percakapan. Respons ibu sangat penting bagi perkembangan bahasa anak. Beberapa peneliti menegaskan bahwa kualitas perkembangan bahasa anak bergantung pada tingkat

keberhasilan komunikasinya dengan orang dewasa sejak lahir (Derrich 1984:11).

Olson juga meneliti hubungan antara interaksi ibu dan anak dalam hal kemajuan bicara anak. Hasilnya menunjukkan bahwa ibulah yang merupakan mitra utama bagi kemajuan perkembangan kosa kata anak (Olson 1986:56).

Pentingnya pembahasan yang berkaitan dengan peran orang tua terhadap kemampuan berbahasa Indonesia anak sangat berkaitan dengan tindakan dalam proses bimbingan sehari-hari sehingga akan memberi dampak pada perkembangan anak umumnya dan pemerolehan bahasa anak khususnya (Hadis, 1993:1).

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa perlu kiranya dibahas peran orang tua pada saat membangun jaringan interaksi dengan anak. Dengan demikian, alasan melakukan pembahasan ini cukup jelas dan aktual sifatnya karena berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa anak umumnya dan kemampuan berbahasa Indonesia anak khususnya.

Makalah singkat ini akan membahas faktor psikologis orang tua terhadap anak, peran orang tua yang bagaimanakah dapat menentukan kemampuan berbahasa Indonesia anak usia 4-5 tahun, dan juga akan dilihat berapakah sumbangan peran orang tua terhadap pencapaian kemampuan berbahasa Indonesia anak usia 4-5 tahun.

Faktor psikologis yang dimaksud dalam makalah ini adalah tingkat pendidikan dan kemampuan orang tua dalam memberi stimulus bahasa kepada anak. Adapun orang tua yang dimaksud dalam makalah ini adalah ibu. Hal ini disebabkan ibulah yang menjalin *attachment* pertama dan utama sejak masa kandungan sampai dewasa.

Peran orang tua yang dimaksud adalah peran yang digunakan oleh ibu yang diperoleh dalam suasana simulasi bimbingan sehari-hari. Bimbingan sehari-hari tersebut meliputi bimbingan mengontrol perilaku anak, bimbingan atribusi, bimbingan orang tua dalam ZPD, dan bimbingan perilaku berjarak.

Kemampuan berbahasa Indonesia anak usia 4-5 tahun dalam makalah ini dibatasi dalam hal kemampuan reseptif (pemahaman) dan kemampuan produktif (ujaran), yang berbentuk serangkaian perintah yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh anak. Jadi, tidak membahas sampai ke karakteristik dari masing-masing aspek kebahasaan (morfologi, sintaksis, wacana, dan semantis) dari ujaran anak.

2. Strategi Hubungan Orang Tua Terhadap Anak

Hubungan linier yang positif antara gagasan orang tua dan tindakannya, menurut Skinner (1985), dapat terjadi dalam dua arah. *Pertama*, yang

menunjukkan “arahan yang rendah” (*low directiveness*), dalam hal ini orang tua percaya bahwa anak mampu berkembang dan belajar melaksanakan inisiatif mereka sendiri dan membolehkan anak mencoba berbagai kemungkinan untuk memecahkan masalah. *Kedua*, yang menunjukkan “arahan yang tinggi” (*high directiveness*), dalam hal ini tindakan orang tua seperti yang mereka lakukan ketika sedang memberikan penjelasan mengenai suatu tugas (yang diberikan) dan sesuai dengan tuntutan yang ada pada tugas tersebut. Dalam hal ini, penjelasan orang tua bertujuan agar anak dapat bekerja secara lebih efektif.

Hubungan antara gagasan dengan tindakan orang tua dapat diketahui tidak hanya pada waktu orang tua mengajarkan sesuatu pada anak atau pada waktu mengontrol anak, tetapi dapat juga dilihat dari lingkungan bimbingan anak di rumah dan dari kehidupan rutin keluarga.

Dengan demikian, gagasan orang tua dapat berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perkembangan anak, termasuk juga pemerolehan bahasa anak (McGillicuddy-De Lisi, 1990). Pengaruh yang tidak langsung akan terjadi apabila gagasan orang tua merupakan sumber perilaku orang tua, perilaku orang tua terhadap anak itu menjadi mediator antara gagasan orang tua terhadap anak. Pengaruh yang langsung terjadi apabila gagasan orang tua itu sendiri dapat digunakan untuk memprediksi terhadap perkembangan anak. Bentuk konkret tindakan orang tua yang mengkomunikasikan harapan-harapan orang tua, tujuan, dan gagasan tentang kebaikan dan keburukan biasanya berbentuk tindakan yang dapat digolongkan sebagai pola bimbingan yang dapat diobservasi (Sigel, 1991:11).

Selanjutnya bentuk strategi bimbingan orang tua terhadap anaknya tersebut dapat dibagi menjadi empat sebagai berikut :

Pertama, perilaku berjarak (*distancing behavior*). Orang tua yang melakukan “penjauhan” pada waktu mengasuh anaknya adalah orang tua yang berusaha menuntut anak untuk: (1) merekonstruksi kejadian-kejadian yang telah lalu, (2) menggunakan imajinasi mereka untuk menghadapi berbagai objek, kejadian, dan manusia, (3) merencanakan dan mengantisipasi kegiatan di masa yang akan datang, dan (4) akhirnya mengikuti transformasi dari gejala yang ada (Sigel, 1986:56). Hanya dengan melakukan strategi semacam inilah kompetensi representasi atau kognisi dan juga kemampuan berbahasa anak dapat dipacu karena secara operasional strategi berjarak (*distancing strategy*) berarti menciptakan jarak antara diri seseorang dan objek, baik secara temporal dan atau spasial, maupun secara psikologis (Sigel, 1991:13).

Kedua, daerah perkembangan proksimal (*zone of proximal development*) adalah tempat bertemunya konsep-konsep anak yang bersifat spontan dan kaya namun *kacau balau*, “bertemu” dengan *penalaran* orang

dewasa yang bersifat sistematis dan logis. Pada “pertemuan” ini, kelemahan penalaran anak yang bersifat spontan itu akan dikompensasikan oleh kekuatan logika orang dewasa yang bersifat ilmiah. Dengan menggunakan ZPD dapat dipahami bahwa dalam proses pengasuhan yang penting bukanlah hasil akhir saja, melainkan proses “menjadi.” Bukan hanya penguasaan konsep, melainkan bagaimana konsep itu terjadi. Dengan demikian makin jelaslah betapa pentingnya bimbingan orang dewasa (dalam hal ini orang tua) dalam proses perkembangan anak umumnya dan perkembangan bahasa anak khususnya.

Ketiga, keberhasilan anak tidak saja ditentukan oleh “strategi berjarak” dan bimbingan orang tua dalam ZPD, tetapi juga oleh bagaimana orang tua mengontrol tindakan anak. Disiplin dan “strategi pengontrolan,” menurut kesimpulan Hess dan Holloway (1984) dari berbagai penelitian, telah terbukti ada hubungannya dengan perilaku anak, seperti usaha menghentikan aktivitas anak, memukul, mengabaikan, melarang, menggunakan kontrol yang bersifat otoriter, dan hukuman fisik.

Keempat, “model dimensi atribusi” dengan pemberian pujian dan motivasi dari orang tua kepada anaknya. Weiner (1980) mengemukakan teorinya tentang “model dimensi atribusi” yang menekankan efek dari atribusi tertentu terhadap respons afektif dan perilaku. Menurut Weiner, seseorang mengatribusikan keberhasilan atau kegagalan kepada empat penyebab, yaitu: kemampuan, upaya, tingkat kesulitan tugas, dan keberhasilan. Atribusi dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu stabilitas dan kedudukan kontrol (*locus of control*). *Kemampuan* dan *tingkat kesulitan tugas* dianggap bersifat stabil, sedangkan keberhasilan dan usaha mudah berubah. Dilihat dari sudut kedudukan kontrol, maka *kemampuan* dan *usaha* merupakan hal yang bersifat internal, sedangkan *keberhasilan* dan *tingkat kesulitan tugas* sebagai sesuatu yang bersifat eksternal.

Dari uraian teoretis yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa gagasan orang tua yang dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan orang tua berupa pola bimbingan anak mengandung elemen-elemen yang dapat dimanfaatkan untuk menetapkan tentang peran orang tua terhadap kemampuan berbahasa anak.

Sudah barang tentu keberhasilan bimbingan orang tua tidak terlepas dari faktor-faktor tingkat pendidikan orang tua yang membimbing, gagasan mereka tentang pemerolehan bahasa anak, dan cakupan kemampuan berbahasa anak.

Umumnya ibu-ibu yang berpendidikan tinggi dan bekerja di luar rumah cenderung menggunakan operasional strategi berjarak (*distancing strategy*).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan Subyantoro 1997 berdasarkan Tes ICP dan Analisis ANOVA, untuk 60 orang responden.

Tabel Tes ICP dan Analisis ANOVA

Tipe-Tipe Strategi Pengasuhan Orang Tua	Tingkat Pendidikan						Total	
	Dasar		Menengah		Tinggi		f	%
	f	%	f	%	f	%		
Mengontrol Anak	2	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	3,33%
Atribusi	3	15,00%	5	25,00%	3	15,00%	11	18,33%
Bimbingan	9	45,00%	8	40,00%	2	10,00%	19	31,67%
Distancing Behavior	6	30,00%	7	35,00%	15	75,00%	28	46,67%
Jumlah	20	100,00%	20	100,00%	20	100,00%	60	100,00%

D.F. = (2), (57)

F. Ratio = 3,339

PROB. = 0,0425

Sumber: Subyantoro, 1997

Berikut percakapan seorang Ibu (merahasiakan nama) di kantor dengan anaknya yang bernama Ulfa di rumah via telepon. Peristiwa ini terjadi di Medan, 16 Januari 2005 siang hari.

Ibu : Halo... Ulfa

Ulfa : Halo.... Ma... , mama di mana ?

Ibu : Mama di kantor, mama kerja.

Ulfa : Jam berapa ma pulangny.

Ibu : Jam 5.00 sore, biasalah kalau kerja.

Ulfa : Yah mama..., kerja aja.

Ibu : Oh iya, mama lupa, hari ini mama pulang cepat, mama lupa.

Ulfa : Lupa atau bohong?

Ibu : Lupa... mama tidak pernah bohong kan? Ufa pintar ya?

Ulfa : Hore... hore... mama pulang cepat ya?

Ibu : Kita lihat kuda pusing, mau?

Ulfa : Mau ma, kita pernah ke Yuki, di sana ada kuda pusing, ada motor kecil tabrakan, ada kereta api jerit (kereta api gantung jalannya cepat, kalau naik banyak orang menjerit) ada kotak gantung-gantung. Iya... ma, kita pigi ya.

Ibu : Ya kita pergi ke sana melihat bom-bom car kereta api gantung dan kereta api listrik.

Ulfa : Bom-bom kar, kereta api gantung dan kereta api listrik, Ufa bisa kan ma.

Ibu : Ya... mama sayang Ufa, Ufa udah pintar sekali.

Ibu : Oya... kita kan pernah lihat bule masuk kampung kita? Di sana ada juga orang bulenya.

Ulfa : Bule kampungan?

Ibu : Bule kampungan itu bulenya kotor, bau, jelek dan tidak mandi kalau bulek masuk kampung adalah bule yang datang ke tempat kita.

- Ulfa : Kalo enggak mandi bulek kampungan ma...? Ufa mandi, bersih-besih, Ufa cantik kan ma!
- Ibu : Kalau sudah makan, mandi yang bersih, pakai minyak wangi, cantik-cantik, kita pergi ke Yuki ya...! Orang tidak suka melihat anak yang kotor
- Ulfa : Tidak suka ya? Ufa mesti bersih! Ufa mesti cantik! Ufa suka orang kan!
- Ibu : Ya... udah dulu ya? Cium pipi kanan dan kiri ummaaaah.
- Ulfa : Cepat pulang ya ma...? Ummaaaah... mama !

3. Peran Ibu dalam Membimbing Anak

Peran sebagai ibu ini unik sifatnya dan disandang oleh kebanyakan wanita karena peristiwa biologis yaitu kelahiran seorang anak. Walaupun demikian, wanita juga dapat menjadi ibu melalui pengangkatan anak atau cara-cara lainnya. Lewis (1978) mengatakan bahwa salah satu tanggung jawab ibu adalah mengadakan perawatan fisik dan emosional bagi anaknya. Bigner mengatakan bahwa ibu dipandang memiliki karakteristik ekspresif, yang mengacu pada ekspresi-ekspresi afeksi, kehangatan, dan dukungan emosional terhadap anggota keluarga lainnya. Fungsi peran tersebut dipandang dari sudut tradisional sebagai mediator, pemberi kenyamanan (*comforter*) dan pembimbing (*conselor*) bagi anggota keluarga lainnya (1979:42).

Winch, dalam Bigner (1979) menyebutkan salah satu dari dua fungsi perilaku sebagai orang tua adalah fungsi bimbingan yang secara tradisional atau kultural dikaitkan dengan peran ibu. Bimbingan dapat didefinisikan dalam pengertian sempit dan luas. Secara sempit, fungsi ini dapat diinterpretasikan sebagai aspek-aspek perawatan anak sehari-hari, seperti memberi makan, memandikan, dan memberi pakaian anak. Secara lebih luas, dapat didefinisikan sebagai proses psikologis dari pemuasan emosi dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan emosional melalui kata-kata, tindakan, dan sentuhan fisik. Dengan kata lain, nada emosional dari interaksi yang dihubungkan dengan bimbingan baik ditampilkan oleh ibu maupun ayah adalah *kehangatan*. Hal ini sejalan dengan pendapat Chodorow, Boulton yang menyebutkan bahwa membimbing anak bukan sekedar suatu set perilaku, tetapi partisipasi dalam hubungan antarpribadi yang difus dan yang afektif (1983:147).

Selain memiliki fungsi pengasuh, ibu juga mempunyai fungsi sebagai pendidik. Bigner (1979) mengutip Duvall mengkatagorikan tugas ibu dalam dua konsep, yaitu konsep tradisional dan konsep pengembangan. Konsep tradisional diinterpretasikan oleh Duval memiliki kualitas semuanya atau tidak sama sekali. Berbeda dari konsep pengembangan, yang menekankan perubahan dari kekakuan (pada konsep tradisional) menuju keluwesan bagaimana peran sebagai ibu itu ditampilkan. Pada konsep ini, penekanannya terletak pada mendorong perkembangan individu daripada

bagaimana cara membuat peran tersebut berfungsi. Tugas-tugas ibu yang baik menurut konsep pengembangan adalah berikut ini :

- a. Melatih anak menjadi percaya pada diri sendiri.
- b. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosional anak.
- c. Merangsang pertumbuhan mental anak.
- d. Menyediakan lingkungan yang mengasuh bagi anak.
- e. Menunjang perkembangan sosial anak.
- f. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perkembangan individu.
- g. Disiplin dengan pemahaman.

Clarke-Stewart (1982:92) mengemukakan peran orang tua, khususnya ibu berkenaan dengan bimbingan, yaitu pemberi kasih sayang dan cinta, penegak disiplin, stimulator verbal, pemberi respons yang sensitif, penyedia bahan-bahan, dan penata pengalaman bagi anak. Lebih lanjut Clarke-Stewart menjelaskan peran orang tua yang mempengaruhi perkembangan anak sebagai pemberi kasih sayang dan cinta serta penegak disiplin diperlukan kombinasi kehangatan dan cinta kasih, bimbingan dan sensitivitas dengan kontrol (pengawasan) dalam jumlah sedang. Orang tua menetapkan batas-batas yang tegas terhadap anak, tetapi masuk akal dan tidak terlalu sering. Tuntutan bersifat konsisten dan diberikan bersamaan dengan penjelasan yang masuk akal. Dengan demikian, tanggung jawab sosial dan otonomi yang mandiri akan tumbuh dengan sendirinya dari dalam diri anak. Anak-anak yang orang tuanya bersikap demikian cenderung menunjukkan sikap yang ramah, kooperatif, percaya diri, mandiri, dan bahagia.

Tugas ibu yang lain adalah sebagai pemberi stimulasi verbal dan respon. Masukan verbal ibu secara khusus berhubungan dengan perkembangan intelektual anak. Makin sering ibu berbicara kepada anak, makin baik perkembangan intelektual anak (Clarke-Stewart, 1982:92). Namun, para ibu juga memodifikasi pembicaraan mereka kepada anak sehingga responsif dan sesuai bagi anak. Para ibu tersebut menggunakan kalimat-kalimat yang lebih singkat, sederhana dan lebih sering diulang. Mereka membicarakan objek-objek dan aktivitas-aktivitas yang sedang dialami anak.

Mereka menerima kegagalan anak sebagai usaha pertama untuk berbicara yang kurang memadai, bukan mengkritik ketidaktepatan mereka. Clarke-Stewart dan Friedman (1987) mengutip hasil penelitian Hoff-Ginsburg yang menyebutkan bahwa jika bahasa ibu kepada anak mengandung lebih banyak ujaran-ujaran yang lebih kompleks, lebih banyak diulang dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban lebih dari sekadar 'ya' atau 'tidak', maka bahasa anak akan berkembang lebih cepat.

Selain sebagai stimulator verbal, respon yang sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan dan minat-minat anak, ibu juga berperan mendorong

anak untuk mengeksplorasi situasi-situasi baru dan orang-orang baru. Hal ini akan meningkatkan perkembangan dan rasa percaya diri anak.

Sebagai penyedia bahan-bahan dan penata pengalaman bagi anak, ibu berperan menyediakan bahan-bahan dan menyusun pengalaman-pengalaman intelektual, saling berbagi, memperluas dan menambah pengalaman anak, memfokus perhatian anak pada objek-objek eksplorasi, menghibur dan berbicara kepada anak sehingga semakin baik hasil pengukuran intelegensi anak. Termasuk dalam tes intelegensi tersebut juga diukur kemampuan anak usia 4-5 tahun yang menggunakan dan memahami bahasa (Clarke-Stewart, 1982:65). Lihat kasus komunikasi verbal berikut ini.

- Ibu : Mama mau membeli KFC
Eh... mamau mau membeli Cocacola ajalah.
Ulfa : Mama, KFC atau cocacola ?
Ibu : Mama akan membeli KFC dan Cocacola.
Ulfa : Tapi... tapi ma Ufa suka KFC sama Cocacola.
Ulfa : Ma... ma melainkan Nisa Pigi sama papanya terus mamanya tidur.
Ibu : Nisa pergi sama papanya, sedangkan mamanya tidur.
Ulfa : Sedangkan...? apa ma?
Ibu : Iya, Nisa pergi sama papanya, terus mamanya tidur. (Si anak tidak tahu arti sedangkan, setelah dijelaskan arti dan pengembangannya, anak baru memahami, hal ini juga akan membentuk pengalaman baru tentang bahasa Indonesia yaitu “kata sambung”).

4. Pemerolehan Bahasa pada Anak Usia 4-5 Tahun

Anak belajar bahasa sekaligus menggunakannya, baik dalam memproduksi maupun dalam memahami pesan-pesan, baik dalam memproduksi maupun dalam memahami pesan-pesan. Penggunaan bahasa atau secara lebih spesifik pemerolehan kosakata, fonologi, semantik, sintaksis, dan fungsi bahasa merupakan proses yang dipelajari dalam konteks sosial tertentu.

Bahasa lebih dari sekadar sekumpulan kata-kata. Kecepatan yang dapat diamati pada waktu anak berada pada masa prasekolah mempelajari kata-kata sebagian tergantung pada kerangka kerja sintaksis. Clarke-Stewart dan Koch (1983) melaporkan bahwa anak yang berusia antara 2-3 tahun walaupun sudah menggunakan kalimat dua kata, tetap menggunakan ujaran satu kata dan kadangkala memakai tiga kata sekaligus bersama-sama. Dalam fase ini, anak menggunakan kosakata yang masih sedikit, tetapi terus berkembang dan ujaran dua kata yang terbatas dengan kecerdikan yang luar biasa. Dengan berbagai cara mereka mengkombinasikan kata-kata yang baru sedikit mereka kuasai. Ketika anak berusia 5 tahun, kalimat-kalimatnya menjadi lebih kompleks.

Sebelum anak mampu mengatur kalimat-kalimat lengkap dengan subjek, predikat, dan objek, menurut Scollon (dikutip oleh Clarke-Stewart dan Friedman, 1987), anak menggunakan ujaran satu kata yang saling berhubungan atau menurut Branigan, anak mengatakan dua kata dan berhenti. Anak tidak melakukan loncatan dari ujaran kata pertama menjadi ujaran banyak kata. Anak tidak mengembangkan keseluruhan sistem sintaksis dalam satu langkah, tetapi sebaliknya anak dengan perlahan-lahan menggabungkan kata-kata ke dalam kalimat-kalimat yang lebih panjang dan kompleks.

Kalimat seorang anak terdiri atas dua kata-kata yang panjang dan sangat mendasar, yang merupakan kata-kata paling penting dalam kalimat tersebut. Itulah yang disebut *kalimat telegrafis*, berbentuk seperti kata-kata dalam telegram atau judul surat kabar. Kalimat telegrafik terjadi karena keterbatasan ingatan atau *memory* dan keterampilan memproses informasi. Anak hanya mengekspresikan inti kalimat dan menghilangkan *emblem-emblem* (tambahan) seperti kata kerja penghubung 'adalah,' artikel misalnya kata sandang 'itu,' preposisi misalnya 'pada' dan konjungsi.

Kalimat tiga kata atau lebih sudah dikuasai anak usia 4-5 tahun, bahkan sampai pada kalimat kompleks, hanya saja masih perlu bimbingan agar bahasanya benar. Anak-anak tetapi mengikuti pola umum : subjek-predikat-objek-keterangan. Sekarang anak sudah dapat mengatakan misalnya "mama minta susu yang manis".

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa pada proses pemerolehan bahasa, anak memperoleh dua hal: pertama, 'kinerja' (*performance*) yang terdiri atas proses pemahaman dan proses produksi kalimat-kalimat; dan kedua, 'kemampuan' (*competence*) (Simanjuntak, 1987:157). Proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau kemampuan mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar, sedangkan proses produksi mencakup kemampuan menghasilkan atau mengeluarkan kalimat-kalimat.

5. Simpulan

Suatu hal positif yang patut dicatat adalah digunakannya 'perilaku penjarahan' (*distancing behavior*) sebagai strategi pengasuhan oleh sebagian besar ibu (46,67 %), sehingga memungkinkan terjadinya *dyad primer* seperti dikatakan Bronfenbrenner (1979) yang akan menambah kualitas interaksi dialogis antara ibu dan anak. Dengan demikian, orang tua tidak sekadar berfungsi sebagai *cognitive mediator*, tetapi lebih diharapkan dapat masuk ke dalam *zone of proximal development* anak dan dapat membantu mensistematisasikan pikiran anak yang 'kacau' menjadi pikiran yang logis. Cara pengasuhan inilah yang sebenarnya dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Para ibu dengan strategi pengasuhan ini berusaha untuk mempertemukan penalaran anak dengan penalarannya sendiri seperti yang dikemukakan oleh Vygotsky sehingga 'interaksi' dalam situasi pengasuhan di sini tetap saja bersifat percakapan yang dialogis (Vygotsky dalam

Kozulin, 1987). Akibatnya, terjadi proses internalisasi dan proses komunikasi selama pengasuhan. Dengan demikian, hendaknya orang tua berpandangan *constructivist* (Skinner, 1985) yang melihat anaknya sebagai makhluk yang mampu membentuk diri mereka sendiri.

Dengan demikian, perlu dikembangkan model strategi pengasuhan *distancing behavior* agar kemampuan berbahasa anak dapat meningkat.

6. Daftar Pustaka

- Bigner, J.J. 1997. *Parent-Child Relations*. New York: Macmillan Publishing a. Inc.
- Blumental, A.L. and Boaks, R. 1967. *Prompted Recall of Sentences*. Cambridge: Mass. MIT Press.
- Boulton, M.G. 1983. *On Being A Mother, A Study of Women With Preschool Children*. New York: Tavistock Publication.
- Chomsky N. 1999. *On Nature, Use, And Acquisition of Language*. Dalam Ritchie Bhatia.
- Clarke-Stewart, A. 1982. *Day Care*. Glasgow : Fontana Paperbacks.
- . 1987. *Child Development Infancy Through Adolescence*. New York: John Willey and Sons Inc.
- Dale, Philip S. 1976. *Language Development: Structure and Function*. (edisi kedua). New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Dardjowidjojo, Soenyono. 1981. *Dasar-dasar Neorosifologis dalam Penguasaan Bahasa Anak dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Thn. VII Nomor 5.
- Derrich, June. 1984. *The Child's Acquisition of Language*. England: National Foundation for Educational Research.
- Gustianingsih. 2001. *Pemerolehan Kalimat Majemuk Bahasa Indonesia Anak Usia Taman Kanak-kanak*. Medan: Pascasarjana USU.
- Hadis, Fawzia Aswin. 1993. *Gagasan Orang Tua dan Perkembangan Anak*. Disertasi Universitas Indonesia. Jakarta.
- King, Robert D. 1969. *Historical Linguistic and Generative Grammar*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Kiparsky, Paul. 1968. *Linguistic Universal and Linguistic Change*. New York: Halt, Rinerhart and Winston.
- Lewis, G.L. 1978. "Change in Women's Role Participation." Dalam I.H. Frieze *et al.* (ed.). *Women and Sex Roles, A Social Psychological Perspective*. New York: W.W. Norton and Co. Inc.
- Mc. Gillicuddy-De Lisi, A.V. 1980. *Parental Belief with in The Family Context: Development of a Research Program*. New Jersey: Lawrences Erlbaum Association. Inc.

- Olson, Shery L. 1986. "Mother-Child Interaction and Children's Speech Progress: A Longitudinal Study of the First-Two-Years." *Merrill-Palmer Quaterly Journal* 32/1 : 39-52.
- Sigel, I.E. 1991. "Socialization of Cognition: The Distancing Model." Makalah dalam seminar ISSBD, 3-7 Juli 1991.
- Simanjuntak, Mangantar. 1987. *Pengantar Psikolinguistik Modern*. Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Skinner, E.A. 1985. "Determinants of Mother-Sensitive and Contingently Responsive Behavior: The Role of Child Rearing Beliefs and Socio Economic Status.," dalam I.E. Sigel (ed.). *Parental Belief Systems*, 51-88. New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates Inc.
- Subyantoro. 1997. *Strategi Pengasuhan Orang Tua Terhadap Akselerasi Kemampuan Berbahasa Indonesia*. Semarang: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni.
- Weiner, B. 1980. "Attribution, Emotion, and Action," dalam *Handbook of Motivation and Cognition*, 89-90. New York: The Guilford Press.

Tentang Penulis

Gustianingsih, lahir di Medan, 28 Agustus 1964. Memperoleh gelar Sarjana Sastra (Dra.) pada 1987 dari Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara dan Magister Humaniora Universitas Sumatera Utara 2001 pada Program Studi Linguistik. Judul Thesis "Pemerolehan Kalimat Majemuk Bahasa Indonesia Anak Usia Taman Kanak-kanak." Di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia F.S. USU, dia mengajar mata kuliah *Psikolinguistik* dan *Neurolinguistik*.

POLA FONOTAKTIS KOMPONEN KONSONAN AKHIR SUKU KATA BAHASA INDONESIA

Namsyah Hot Hasibuan

Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara

Abstract

This paper is particularly concerned with the coda of syllable in bahasa Indonesia that might vary in amount of their phonemic elements. The coda meant here uncomprises all sorts of coda. So restriction is compulsorily made here to clusterous codas which consist always of two or more phonemic elements. One presumably may come to an opinion that the result derived as its generalization is much wider than its real subject matter (clusterous coda). Such an opinion may due to the urgency of usable rules pertaining with phonotactic grammaticality of phonemic elements in Indonesian clusterous codas. Generally speaking, such meant rules could also be found in the generalization. By sistematic analising process, such an expectation isn't an impossible one to be realized.

1. Pendahuluan

Unit morfem berupa kata, dalam bahasa Indonesia, pada umumnya terdiri dari hasil kombinasi sejumlah suku kata.¹ Hal demikian dapat didasarkan pada kenyataan bahwa kata bahasa Indonesia pada umumnya masih dapat diuraikan atas sejumlah suku, yang dalam hierarki besaran unit bahasa, satu tingkat lebih kecil dari morfem berupa kata.² Membagi kata atas suku atau sejumlah suku kata dalam bahasa dapat dilakukan melalui satu upaya yang lazim disebut penyukuan. Dari penyukuan akan dihasilkan sejumlah suku kata. Suku yang diperoleh melalui upaya penyukuan pada dasarnya masih dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah pola. Ciri yang terdapat pada masing-masing suku kata berupa, antara lain, bentuk maupun jumlah komponen fonemis yang membuat terwujudnya suku, dapat mendasari pengelompokan seperti yang³²⁹ disebut di atas. Hal lanjut yang terlihat dari pengelompokan ini ialah adanya aneka bangun suku. Di antaranya terdapat bangun yang hanya terdiri dari satu buah fonem saja. Bangun lainnya ada yang terdiri dari dua fonem sampai kepada yang memiliki komponen fonemis terbanyak. Dalam bahasa Indonesia tercatat bahwa jumlah komponen fonemis terbanyak suku hanya mencapai batas lima buah (lihat Hasibuan, 1996:93; Aminoedin, 1984). Selanjutnya dapat dikatakan bahwa tidak semua suku diawali atau diakhiri oleh sebuah

konsonan. Tidak terdapatnya sebuah konsonan yang mengawali suku menandakan bahwa pada suku itu tidak terdapat *konsonan awal*. Sebaliknya, tidak terdapatnya sebuah konsonan yang mengakhiri suku dapat dikatakan bahwa suku tersebut tidak memiliki *konsonan akhir*. *Konsonan awal* di sini dapat diartikan sebagai konsonan tunggal yang dapat mengawali suku, dan *konsonan akhir* untuk konsonan tunggal yang dapat menjadi akhir suku. Selanjutnya, kenyataan pula bahwa suku dapat juga diawali atau diakhiri oleh dua atau lebih konsonan. Dengan demikian kita terbawa pula kepada pengenalan adanya suku bergugus konsonan; baik pada awal, akhir, atau pada awal dan akhir suku.

Fonem konsonan apa saja yang dapat menempati posisi awal ataupun akhir suku sudah tentu harus melalui upaya penentuan yang cermat, terlebih-lebih apabila yang dimaksudkan itu adalah awal atau akhir suku yang terdiri dari gugus konsonan (selanjutnya GK). Pada suku yang berawal atau berakhir dengan konsonan tunggal penentuan fonem awal atau akhir suku dapat dilakukan dengan pengamatan terhadap fonem konsonan tunggal apa saja yang dapat menempati posisi awal atau akhir suku. Namun, pada suku ber-GK pengamatan tidak hanya terbatas pada penentuan GK apa saja yang dapat ditemukan pada awal atau akhir suku, tetapi juga memerlukan upaya lanjut hingga ditemukannya kaidah fonotaktis yang memungkinkan setiap komponen fonemis GK tersebut dapat bersusun taut sesamanya. Penelitian terhadap yang terakhir ini, dalam studi bahasa Indonesia, terlihat belum dilakukan secara khusus (bandingkan dengan Lapoliwa, 1982; Aminoedin, dkk., 1984; Moeliono, dkk., 1988). Terhadap yang terakhir ini, jika pada kesempatan ini seluruhnya mendapat penguraian, menurut hemat penulis terlalu luas untuk ditampilkan. Untuk itu penulis membatasinya pada uraian tentang akhir suku berupa GK bahasa Indonesia.

2. Ancangan Teoretis

Penataan bunyi-bunyi bahasa ke dalam sistem bahasa serta bagaimana pula bunyi-bunyi itu digunakan adalah tanggung jawab fonologi. Studi yang pada pokoknya membicarakan bagaimana menata bunyi-bunyi bahasa ke dalam sistem serta bagaimana pula bunyi-bunyi itu digunakan dalam bahasa disebut fonologi (Catford, 1988:187).³³⁰ Konsep fonologi Catford di atas sangat relevan dan sejalan dengan Fromkin, *et al.* yang memberi penekanan kepada upaya sistematisasi bunyi serta penggunaannya dalam bahasa. Fonologi berurusan dengan cara bagaimana bunyi-bunyi bahasa dikelompokkan serta bagaimana pula penerapannya ke dalam kaidah bahasa. Mengerti fonologi memungkinkan orang dapat membuat tuturannya lebih bermakna, menata bunyi secara benar, serta sanggup memberikan penjelasan tentang dapat tidaknya suatu bunyi masuk ke dalam sistem suatu bahasa

(Lyons, 1981:87). Uraian ringkas di atas menunjukkan bahwa penataan bunyi yang relevan ke dalam sistem suatu bahasa merupakan tugas fonologi.

Untuk pengertian kombinasi fonem konsonan yang terdapat pada suku yang sama telah ada usulan dari Pulgram (1970:79) agar menyebutnya sebagai GK. Batasan ringkas GK Pulgram di atas dapat lagi dijelaskan melalui Catford (1988:207), yang memberi batasan GK sebagai kombinasi konsonan yang terdapat pada awal ataupun akhir suku. Pengertian GK tersirat dari kedua ahli di atas yang patut dicatat, di antaranya, adalah bahwa komponen fonemis GK lebih dari satu buah. Satu buah konsonan pada awal atau akhir suku, dalam hal ini, masih belum dapat dikatakan GK. Dengan demikian, jumlah komponen fonemis GK bisa terdiri dari dua atau lebih pada awal atau akhir suku; atau terdapat pada awal dan akhir suku sekaligus. Di awal suku pada kata *praktek*, misalnya, *pr* dapat dicatat sebagai GK; demikian juga *rs* yang dapat dicatat sebagai GK di akhir suku pada kata *pers*. Dengan demikian, baik *pr* maupun *rs* pada kedua kata itu adalah GK karena masing-masing terdapat pada sebuah suku. Yang pertama (*pr*) terdapat pada awal, dan yang kedua (*rs*) pada akhir suku.

Kemudian, terdapatnya GK pada awal dan akhir suku terlihat, misalnya, pada awal dan akhir suku pertama kata *transformasi*.³ Baik kombinasi fonem konsonan *tr* maupun *ns*, masing-masing, dapat disebut GK karena terdapat pada sebuah suku yang sama. Kombinasi fonem konsonan *tr* terdapat terdapat pada awal, sedangkan kombinasi fonem konsonan *ns* terdapat pada akhir suku. Dalam hal ini, *tr* merupakan GK yang mengawali suku, dan GK yang mengakhirinya adalah *ns*.

Penelitian terhadap urutan komponen fonemis GK telah pernah dilakukan oleh Roach. Dengan memperhatikan urutan komponen fonemisnya, Roach (1983:58-59) membagi GK awal suku dan akhir suku atas tiga kategori posisi. Posisi pertama sampai ketiga, pada awal suku, masing-masing adalah praawal (*pre-initial*), awal (*initial*), dan pascaawal (*post-initial*). Pada akhir suku terdapat pula posisi praakhir (*pre-final*), akhir (*final*), dan pascaakhir (*post-final*). Setiap posisi dapat ditempati oleh konsonan tertentu, selanjutnya konsonan tersebut, diberi nama sesuai kategori posisi yang dapat ditempatinya. Dengan demikian, untuk ketiga kategori posisi di atas dikenal adanya³³¹ konsonan praawal (*pre-initial consonant*), konsonan awal (*initial consonant*), dan konsonan pascaawal (*post-initial consonant*) pada awal suku, dan konsonan praakhir (*pre-final consonant*), konsonan akhir (*final consonant*), dan konsonan pascaakhir (*post-final consonant*) pada akhir suku. Setiap awal dan akhir suku yang berkomponen tiga buah konsonan (selanjutnya disingkat 3K) dengan sendirinya memiliki tiga kategori posisi seperti disebutkan di atas. Dengan demikian, awal suku berupa GK-3K adalah kombinasi tiga buah konsonan dari urutan kategori posisi *praawal* + *awal* + *pascaawal*. Begitu

juga dengan akhir suku berupa GK-3K, terdiri dari kombinasi tiga konsonan dari urutan kategori posisi *praakhir* + *akhir* + *pascaakhir*.

Awal suku atau akhir suku berkomponen dua buah konsonan (selanjutnya disingkat 2K) masing-masing memiliki dua jenis kemungkinan kombinasi. Kemungkinan pertama pada awal suku adalah kombinasi *praawal* + *awal*, dan kemungkinan keduanya *awal* + *pascaawal*. Pada akhir suku, kemungkinan kombinasi pertamanya adalah *praakhir* + *akhir*; sedangkan kemungkinan keduanya *akhir* + *pascaakhir*.

3. Uraian

Data pada (01) berikut ini menunjukkan sejumlah kata yang berakhir dengan GK. Di antara GK yang terdapat pada akhir kata, dua di antaranya terdiri dari tiga buah konsonan, yaitu pada kata *korps* dan *hertz*. Selainnya hanya akhir suku berupa GK yang komponen fonemisnya terdiri dari dua buah konsonan.

(01)	a. konteks / kon.teks /	k. sport /sport /
	b. stimulans / sti.mu.lans /	l. Isomorf / i.so.morf /
	c. golf / golf /	m. lift / lift /
	d. helm / helm /	n. alarm / a.larm /
	e. volt / volt /	o. korps / korps /
	f. pers / pers /	p. hertz / herts /
	g. mark / mark /	q. ons /ons /
	h. pulp / pulp /	r. elips /e.lips /
	i. kalk / kalk /	s. front /front /

Dari segi jumlah komponen fonemisnya, melalui data (01) terlihat bahwa GK yang menjadi akhir suku tidak menunjukkan perbedaan dengan GK yang menjadi awal suku. Komponen fonemis keduanya (awal dan akhir suku) hanya dua sampai tiga buah saja. Namun, terlihat juga perbedaan dari segi jumlah GK yang berkomponen fonemis 3K di antara yang menjadi awal dan akhir suku. Perbedaan itu adalah pada jumlah akhir suku berupa GK-3K yang amat terbatas. Dari data yang diperoleh tercatat bahwa hanya ada dua buah saja akhir suku berupa GK-3K yang ditemukan sebagai akhir suku, sedangkan jumlah GK-3K sebagai awal suku ditemukan sebanyak lima buah (lihat Hasibuan 2002b). 332

Dapat dikatakan bahwa semua akhir suku berupa GK yang terdapat pada (01) adalah akhir suku dari bahasa asing yang dalam pelafalannya terlihat belum akrab dengan lidah orang Indonesia. Untuk melafalkannya penutur bahasa Indonesia biasanya menempuh upaya penyesuaian pola sehingga mendekati atau sama dengan pola kanonik bahasa Indonesia. Di antara upaya yang ditempuh dalam penyesuaian pola itu dapat berupa penghilangan konsonan tertentu, atau dengan jalan menyisipkan vokal yang

sesuai di antara komponen fonemis akhir suku berupa GK-nya (lihat juga Lapoliwa, 1982; Moeliono dkk., 1988). Di antara akhir suku pada (01), apabila dibandingkan dengan yang lainnya, hanya / ks ns ps rs / saja yang pelafalannya terlihat lebih mudah. Hal demikian dapat dimaklumi karena keempat akhir suku tersebut, selain terdapat pada akhir kata, ditemukan juga sebagai akhir suku dari hasil penyukuan *konsonan antara* di tengah kata (lihat hasil penyukuan pada (02a) (02b)).

- (02) a. instalasi / ins.ta.la.si /
 inspektur / ins.pek.tur /
 tekstil / teks.til /
 transmigrasi / trans.mi.gra.si /
 persneling / pers.ne.liŋ /
 substantif / sups.tan.tif /
- b. demonstrasi / de.mons.tra.si /
 ekstraksi / eks.trak.si /
 menstruasi / mens.tru.a.si /
 eksklusif / eks.klu.sif /
 transplantasi / trans.plan.ta.si /
 eksploitasi / eks.plo.i.ta.si /

Distribusinya yang tidak hanya terbatas pada akhir kata memungkinkan keempat akhir suku tersebut (/ ks ns ps rs /) terdapat pada kata yang jumlahnya lebih banyak. Kelebihan semacam itu, yang justru tidak dimiliki oleh akhir suku lainnya pada (01), dapat menambah tingkat kekerapan pelafalan yang pada akhirnya mengurangi rasa keasingan itu.

Fonem mana di antara konsonan akhir yang menjadi komponen fonemis akhir suku berupa GK dapat diperoleh melalui data (01). Dari 17 buah *konsonan akhir* (lihat Hasibuan 1996), sembilan di antaranya (/ f k l m n p r s t /) dapat ditemukan sebagai komponen fonemis akhir suku berupa GK. Fonem / f k l n p r / tercatat sebagai konsonan yang tidak dapat didahului oleh konsonan lain dalam pembentukan akhir suku berupa GK-2K. Dengan kata lain, pada setiap akhir suku berupa GK-2K tidak terlihat kehadiran setiap fonem / f k l n p r / sebagai fonem kedua dalam urutan komponen fonemis GK-nya. Pada pembentukan akhir suku berupa GK-2K, yang terlihat³³³ adalah adanya konsonan tertentu yang dapat mengikut kepada kelima fonem tersebut. Konsonan yang dimaksud adalah / f k m n p s t /. Dalam hal *konsonan akhir* tidak dapat didahului oleh konsonan lain, *konsonan akhir* menjadi komponen fonemis pertama pada akhir suku berupa GK-2K; sedangkan konsonan sesudahnya menjadi komponen fonemis kedua. Tidak terdapatnya konsonan lain yang mendahului *konsonan akhir* dalam membentuk akhir suku berupa GK-2K menunjukkan bahwa pada akhir suku berupa GK-2K tidak dikenal

adanya *konsonan praakhir*. Hal ini dengan sendirinya menutup kemungkinan adanya akhir suku jenis *praakhir + akhir*. Jenis kombinasi konsonan pada akhir suku berupa GK-2K, dengan demikian, hanya satu saja; yaitu *akhir + pascaakhir*. Enam buah konsonan pertama yang disebutkan di atas (/ f k l n p r /) dapat menjadi *konsonan akhir*-nya, dan tujuh buah yang terakhir (yang dapat mengikuti yang pertama dalam pembentukan akhir suku berupa GK-2K (/ f k m n p s t /)) sebagai *konsonan pascaakhir*-nya.

Untuk meliputi konsonan akhir-nya, yang berjumlah enam buah, setidaknya diperlukan dua ciri, yaitu *obstruen* dan *sonoran*. Penggunaan kedua ciri terakhir ini sebenarnya kurang tepat karena di dalamnya terliput juga / m s t / yang justru perlu dikecualikan karena ketiga konsonan tersebut tidak ditemukan sebagai konsonan akhir pada akhir suku jenis *akhir + pascaakhir*. Tidak terdapatnya ciri yang dapat mencakup atau yang lebih tepat menyebabkan kedua ciri di atas tetap dipakai dengan mengubahnya sedemikian rupa agar tiga konsonan (/ m s t /) tidak termasuk di dalamnya. Caranya ialah dengan jalan merubahnya menjadi *obstruen non-dental* dan *sonoran non-labial*. Ciri pertama (*obstruen non-dental*) mengharuskan dikeluarkannya konsonan / s t /, sedangkan yang kedua (*sonoran non-labial*) tidak memasukkan / m /. Dengan demikian diperoleh suatu kaidah fonotaktis yang memberi ketentuan bahwa konsonan yang dapat menempati akhir pada awal suku jenis *akhir + pascaakhir* adalah *obstruen non-dental* dan *sonoran non-labial*.

Tujuh *konsonan pascaakhir* berikutnya dapat juga diliput dengan ciri *obstruen* dan *sonoran*. Dari sembilan konsonan yang dapat ditemukan sebagai komponen fonemis akhir suku berupa GK, terdapat dua di antaranya yang tidak dapat menempati posisi *pascaakhir*, yaitu / l r /. Ciri *obstruen* dan *sonoran* yang dari semula juga meliputi / l r / perlu dirubah agar kedua konsonan tersebut tidak termasuk di dalamnya. Perubahannya menghasilkan *obstruen* dan *sonoran nasal*. Dengan batasan ciri terakhir (*sonoran nasal*) berarti, / l r / tidak termasuk lagi di dalamnya. Jadi, yang dapat menempati posisi *pascaakhir* pada akhir suku jenis *akhir + pascaakhir* adalah konsonan *obstruen* dan *sonoran nasal*.

Konsonan akhir pada GK-3K menunjukkan perbedaan dengan yang terdapat pada GK-2K. Kedua *konsonan akhir* / p t / pada GK-3K terlihat tidak hanya didahului, tetapi dapat³³⁴ juga diikuti oleh konsonan lain. Konsonan yang dapat mendahului dan mengikutinya masing-masing hanya satu buah saja, yaitu / r / dan / s /. Terdapatnya konsonan lain yang dapat mendahului dan mengikuti konsonan akhir dalam hal ini menyebabkan adanya *konsonan praakhir* dan *konsonan pascaakhir* pada akhir suku berupa GK-3K. Jenis akhir suku yang dihasilkan, dengan sendirinya, adalah *praakhir + akhir + pascaakhir*.

Soal yang timbul sekarang adalah, apakah ada kaidah yang dapat diambil dari akhir suku jenis terakhir ini – mengingat jumlah konsonan pada masing-masing posisi dalam urutan komponen fonemisnya yang sangat terbatas. Pemunculan konsonan yang sama pada *praakhir* (/ r /) dan *pascaakhir* (/ s /) dalam mendahului dan mengikuti dua *konsonan akhir* (/ p t /) yang berbeda (lihat bagan akhir suku berupa GK) dapat menjadi pertanda adanya keteraturan. Artinya, yang dapat menempati setiap posisi dalam urutan komponen fonemis akhir suku jenis *praakhir* + *akhir* + *pascaakhir* terbatas pada konsonan tertentu.

**Bagan Akhir Suku Berupa
Gugus Konsonan**

<u>Praakhir</u>	<u>Akhir</u>	<u>Pascaakhir</u>	<u>Contoh</u>
	r -----	t -----	/ sport /
		s -----	/ pers /
		n -----	/ modern /
		m -----	/ alarm /
		f -----	/ isomorf /
		k -----	/ mark /
		t -----	/ volt /
		k -----	/ kalk /
	l -----	m -----	/ helm /
		f -----	/ golf /
		p -----	/ pulp /
		t -----	/ front /
	n -----	s -----	/ stimulans /
	p -----	s -----	/ elips /
	k -----	s -----	/ konteks /
	f -----	t -----	/ lift /
	p -----	s 335-----	/ korps /
r -----	t -----	s-----	/ herts /

Berdasarkan dua data yang ada (/ rps, rts /), kaidah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. *Konsonan praakhir* suku berupa GK-3K adalah *sonoran*, *konsonan akhir*-nya *hambat tansuara*, sedangkan *pascaakhir*-nya konsonan *frikatif dental tansuara*. Hasil pengamatan terhadap konsonan yang dapat menempati setiap posisi dalam urutan komponen fonemis akhir

suku berupa GK-3K menunjukkan bahwa akhir suku berupa GK-3K adalah merupakan kebalikan dari awal suku berupa GK-3K (lihat data (03)).

- (03) struktur / struk.tur /
sprinter / sprin.ter /
strategi / stra.te.gi /
sprayer / spra.yer /

Sebagaimana diisyaratkan sebelumnya, melafalkan akhir suku berupa GK-2K, terlebih lagi yang 3K, seperti dua yang terakhir (/ rps rts /), masih sulit bagi penutur bahasa Indonesia. Masa lalu bahasa Indonesia yang dari bahasa daerah tidak mendapat pengenalan GK di akhir (suku) kata setidaknya dapat dipandang sebagai penyebab kesulitan pelafalan itu. Penutur bahasa Indonesia dapat diyakini lebih mudah melafalkan kata pungut asing yang berawal suku GK daripada kata yang berakhir suku GK. Hal demikian dapat terjadi karena sebelum masuknya kata asing, bahasa Indonesia (Melayu) telah mengenal lebih dahulu dari bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, adanya awal suku berupa GK. Bahasa Sanskerta yang diketahui memiliki awal suku berupa GK, secara langsung maupun tidak, telah berperan dalam pengenalan awal suku berupa GK itu.

Pada data (01) tercatat bahwa dalam bahasa Indonesia terdapat 19 buah akhir suku berupa GK. Akhir suku tersebut berbeda dengan akhir suku pada umumnya yang diperoleh melalui upaya penyukuan kata. Kesembilan belas akhir suku berupa GK tersebut kebanyakan tidak diperoleh melalui upaya penyukuan melainkan melalui penetapannya sebagai akhir suku karena semuanya terdapat sebagai akhir kata. Akhir suku GK semacam itu masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui kata pungut (lihat juga Moeliono, dkk., 1988:67).

4. Simpulan

Pengamatan terhadap uraian yang telah dilakukan dalam telaah ini memberi sejumlah ketentuan yang dapat dipandang sebagai kaidah yang berlaku dalam susun taut komponen fonemis GK akhir suku bahasa Indonesia. Pada dasarnya GK akhir suku³³⁶ bahasa Indonesia, melihat jumlah komponen fonemisnya, terdiri dari dua jenis. Jenis pertama dan keduanya adalah GK-2K dan GK-3K. GK-2K-nya hanya terdiri dari satu jenis pola saja, yaitu *akhir + pascaakhir*. Hal demikian disebabkan oleh tidak terdapatnya konsonan yang dapat mendahului posisi *akhir* dalam pembentukan akhir suku berupa GK-2K. Pada akhir suku berupa GK-3K, karena terdapatnya konsonan yang dapat mendahului dan mengakhiri *konsonan akhir*, dengan sendirinya ditemukan pola tetap *praakhir + akhir +*

pascaakhir. Secara sederhana, kaidah yang berlaku pada setiap jenis GK tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada akhir suku berupa GK-2K, komponen fonemis pertamanya adalah *obstruen non-dental* dan *sonoran non-labial*, sedangkan komponen fonemis keduanya adalah *obstruen* dan *sonoran nasal*.
2. Pada akhir suku berupa GK-3K, komponen fonemis pertamanya adalah *sonoran*, komponen fonemis keduanya *hambat tansuara*, dan *frikatif dental tansuara* untuk komponen ketiga.

Jika kedua jenis GK di atas diringkasskemakan bersama ciri konsonan yang dapat menempati masing-masing posisinya, akan terlihat sebagai berikut.

- | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| 1. <u>akhir</u> | + | <u>pascaakhir</u> |
| <i>obstruen non-dental</i> | | <i>obstruen</i> |
| <i>sonoran non-labial</i> | | <i>sonoran nasal</i> |
| 2. praakhir + | | |
| <i>Sonoran</i> | + | <u>akhir</u> |
| | | <i>hambat tansuara</i> |
| | + | <u>pascaakhir</u> |
| | | <i>frikatif dental tansuara</i> |

Catatan

1. Konsep suku di sini mengacu kepada Pulgram (1970:65) yang memberi batasannya atas dasar sejumlah ciri yang terdapat pada suku itu sendiri. Antara lain disebutkan bahwa suku itu termasuk satuan bahasa berwujud figura yang tidak bermakna dan tidak pula menyatakan makna (*the figura does not by and of itself convey meaning*), tetapi figura berguna dalam upaya melengkapi makna tanda (*sign*). Untuk pemahaman lanjut tentang suku menurut Pulgram, lihat juga Hasibuan 2001, ``Urgensi Penentuan Lokus Operasional Fonotaktik`` dalam jurnal *OASIS* No. 7, Desember 2001.
2. Suku menduduki posisi di atas fonem³³⁷ dalam hierarki satuan bahasa, dengan pengertian bahwa suku³³⁷ pada dasarnya terwujud berkat adanya kombinasi fonem tertentu menurut kaidah fonotaktik yang berlaku dalam suatu bahasa. Atas dasar itu suku, ada kalanya, disebut satuan fonem (lihat juga O'Connor 1973:259; Hawkins 1984:62). Di sisi lain suku tidak pula dapat disebut sebagai satuan maksimal sebab dalam hierarki kepemilikan komponen, suku masih merupakan satuan lain yang oleh Pulgram disebut *seksi* (section), termasuk di dalamnya morfem

berupa kata. Untuk pemahaman tentang pengertian *seksi* dapat selanjutnya dirujuk pada Pulgram 1970.

3. Tentang suku yang dihasilkan dari upaya penyukuan terhadap kata tersebut – serta ketentuan yang diberlakukan atas penyukuannya dapat dilihat pada Hasibuan 2002a, ``Dari Penyukuan ke Kaidah Penyukuan: Sebuah Alternatif Penyukuan Kata Bahasa Indonesia`` dalam jurnal *Studia Kultura* No.1, Februari 2002.

5. Daftar Pustaka

- Aminoedin, A., dkk. 1984. *Fonologi Bahasa Indonesia: Sebuah Studi Deskriptif*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Catford, J.C. 1988. *A Practical Introduction to Phonetics*. New York: Oxford University Press.
- Coetsem, V. Frans. 1988. *Loan Phonology and the Two Transfer Types in Language Contact*. Dordrecht-Holland: Foris Publications.
- Lie, Tie G. 1964. *Dasar-dasar Utjapan Bahasa Indonesia*. Jakarta: P. Erlangga.
- Eckman, Fred R. 1987. ``The Reduction of Word-final Consonant Clusters in Interlanguage``. Dalam A. James & J. Leather (ed.). *Sound Patterns In Second Language Acquisition*. Dordrecht-Holland: Foris Publications.
- Fromkin, V., R.Rodman, A.Nijt. 1991. *Universele Taalkunde: Een Inleiding in de algemene taalwetenschap*. Dordrecht: ICG Publications.
- Hasibuan, Namsyah Hot. 1996. *Fonotaktik Dalam Suku Kata Bahasa Indonesia* (Tesis S2). Jakarta: Fakultas Pascasarjana UI.
- Hasibuan, Namsyah Hot. 2001. ``Urgensi Penentuan Lokus Operasional Fonotaktik: Sebuah Studi Bahasa Indonesia``. Dalam jurnal *OASIS* No. 7, Desember 2001. Medan: Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kesusastraan Sumatera Utara.
- Hasibuan, Namsyah Hot. 2002a. ``Dari Penyukuan ke Kaidah Penyukuan: Sebuah Alternatif Penyukuan Kata Bahasa Indonesia``. Dalam jurnal *Studia Kultura* No. 1, Februari 2002. Medan: Fakultas Sastra USU.
- Hasibuan, Namsyah Hot. 2002b. ``Pola Fonotaktis Komponen Fonemis Gugus Konsonan Awal Suku Kata Bahasa Indonesia``. Dalam jurnal *Studia Kultura* No. 2, Agustus 2002. Medan: Fakultas Sastra USU.
- Hawkins, Peter. 1984. *Introducing Phonology*. Great Britain: Anchor Brendon Ltd.
- Lapoliwa, Hans. 1982. "Phonological Problems of Loan Words in Bahasa Indonesia". Dalam *Pacific Linguistics*. Series C 75.

- Lass, Roger. 1984. *Phonology (Cambridge Textbooks in Linguistics)*. Great Britain: Pitman Press, Bath.
- Lyons, John. 1981. "The Sounds of Language." Dalam *Language and Linguistics*. Great Britain: Cambridge University Press.
- Nijt, Anneke. 1991. *Universele Fonologie*. Dordrecht: Foris Publications.
- O'Connor. 1973. *Phonetics*. England: Penguin Books Ltd.
- Pulgram, E. 1970. *Syllable, Word, Nexus, cursus*. The Netherland: Mouton & Co.
- Roach, Peter. 1983. *English Phonetics and Phonology*. Great Britain: Cambridge University Press.
- Scholes, Robert J. 1966. *Phonotactic Grammaticality*. The Hague: Mouton & Co.
- Sigurd, Bengt. 1974. "Phonotactic aspects of the linguistic expression". Dalam B. Malmberg (ed.). *Manual of Phonetics*. Netherlands: North-Holland Publishing Company.
- Singh, Rajendra & A. Foord. 1987. "Interphonology and Phonological Theory". Dalam James & Leather (ed.). *Sound Patterns in Second Language Acquisition*. Dordrecht-Holland: Foris Publications.
- Stokhof, W.A.L. 1975. "On The Phonology of Bahasa Indonesia". Dalam *Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde*, deel 131. 's Gravenhage: Nijhoff.
- Stokhof, W.A.L. 1980. *Tatabunyi Bahasa Indonesia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Tiffany, W.R & James Carrell. 1987. *Phonetics, Theory and Application*. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Treiman, Rebecca. 1984. "On the Status of Final Consonant Clusters in English Syllables". Dalam *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 23. Academic Press, Inc.

Kamus

- Crystal, David. 1991. *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Massachusetts: Basil Blackwell, Inc.
- Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus³³⁹Linguistik*. (Edisi ketiga) Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Moeliono, Anton., dkk. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tentang Penulis

Namsyah Hot Hasibuan dengan gelar akademik doktorandus dan magister humaniora, adalah dosen tetap di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara Medan. Beliau adalah seorang pakar linguistik yang telah meneliti dan menulis kemampuan ilmunya di berbagai penerbitan di dalam dan luar negeri/

